

Kata Pengantar

Penyusunan laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan dari Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut, serta evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai yang diperoleh dari laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Dari kegiatan pemantauan diharapkan mendapatkan pelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang berguna untuk meningkatkan kinerja kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan.

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Triwulan II Tahun 2014 berisikan pemantauan kinerja pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri. Pemantauan dilakukan terhadap proyek-proyek yang sudah efektif masa berlakunya dan belum melewati tanggal berakhirnya pinjaman (*closing date*). Kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri dalam laporan ini selain dilihat dari tingkat penyerapan dana, juga difokuskan pada realisasi pencapaian *output*/fisik. Dalam laporan disampaikan pula pelaksanaan hibah luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga serta hibah dengan pembiayaan bersumber dari Hibah Lembaga PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*) dan Pemerintah Amerika Serikat (*Millennium Challenge Corporation/MCC*).

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri edisi Triwulan II Tahun 2014 disusun berdasarkan i) hasil rapat pemantauan Triwulan II Tahun 2014 yang dilaksanakan di Bappenas pada bulan Juli 2014, ii) hasil laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Bappenas dari Kementerian/Lembaga selaku instansi pelaksana sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, dan iii) hasil kunjungan lapangan.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri termasuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap proyek pada Triwulan II Tahun 2014 dan kami harapkan jika diperlukan dapat dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Armida S. Alisjahbana

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman	1
Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	3
Permasalahan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri	5
Pinjaman Proyek Yang Baru Efektif dan Yang Berakhir Masa Berlakunya Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2014.....	6
Pelaksanaan Hibah Luar Negeri.....	8
BAB II KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI.....	9
Kreditor Multilateral	9
Bank Dunia	10
ADB	25
IDB.....	32
Multilateral Lain	44
Kreditor Bilateral	46
JICA	47
Australia.....	56
Jerman	57
Korea	60
Perancis dan AFD	62
RR Tiongkok.....	67
Spanyol.....	71
Proyek Fasilitas Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)	73
BAB III KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI.....	77
Hibah Lembaga PBB	77
<i>United Nations Development Programme (UNDP)</i>	77
Hibah Pemerintah Amerika Serikat	84
<i>Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact</i>	84
BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI	89
<i>Java Bali Power Restructuring and Strengthening & Add. Financing for the Extended Deployment of the ERP System (ERP Sumatera and Sulawesi)</i>	89
BAB V PENUTUP.....	93
Kesimpulan.....	93
Tindak Lanjut	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014.....	1
Tabel 1.2	Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman	2
Tabel 1.3	Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab.....	4
Tabel 1.4	Proyek yang Baru Efektif di Triwulan II Tahun 2014	7
Tabel 1.5	Proyek yang Berakhir Masa Berlakunya di Triwulan II Tahun 2014.....	8
Tabel 1.6	Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan II Tahun 2014.....	8
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral.....	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	9
Tabel 2.3	Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan II TA 2014.....	11
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab, Triwulan II TA 2014	26
Tabel 2.5	Perbandingan Nilai PV Proyek Pinjaman ADB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV ≤ 30,00) pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2014	32
Tabel 2.6	Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan II TA 2014	33
Tabel 2.7	Perbandingan Nilai PV Proyek Pinjaman IDB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV ≤ 30,00) pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2014	39
Tabel 2.8	Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain Menurut Instansi Penanggung Jawab	44
Tabel 2.9	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral.....	46
Tabel 2.10	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	46
Tabel 2.11	Pinjaman Proyek yang Dibiayai JICA sampai dengan Triwulan II TA 2014.....	48
Tabel 2.12	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014	49
Tabel 2.13	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemen PU)	49
Tabel 2.14	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemendikbud)	50
Tabel 2.15	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemenhub)	51
Tabel 2.16	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemenkominfo)	51
Tabel 2.17	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (BIG)	51
Tabel 2.18	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Bappenas).....	52
Tabel 2.19	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Penda DKI).....	52
Tabel 2.20	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (PT. PLN).....	53
Tabel 2.21	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (PT. Pertamina).....	53
Tabel 2.22	<i>Progress Variant</i> Proyek Pinjaman JICA	54

Tabel 2.23 Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik	54
Tabel 2.24 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	57
Tabel 2.25 Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (Status Pada Triwulan I dan Triwulan II 2014)	59
Tabel 2.26 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab	60
Tabel 2.27 <i>Progress Variant</i> Proyek Pinjaman Korea.....	62
Tabel 2.28 Daftar Pinjaman Proyek Korea yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014.....	62
Tabel 2.29 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	63
Tabel 2.30 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	63
Tabel 2.31 Daftar Pinjaman Proyek AFD Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014	66
Tabel 2.32 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman RR Tiongkok menurut Instansi Penanggung jawab ..	67
Tabel 2.33 <i>Progress Variant</i> Proyek Pinjaman RR Tiongkok	68
Tabel 2.34 Daftar Pinjaman Proyek RR Tiongkok yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014.....	69
Tabel 2.35 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	71
Tabel 2.36 Daftar Pinjaman Proyek Spanyol Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014	72
Tabel 2.37 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	73
Tabel 2.38 Total Alokasi, Komitmen Pinjaman dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA	74
Tabel 2.39 Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014	74
Tabel 2.40 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia	75
Tabel 2.41 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN	75
Tabel 3.1 Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab.....	77
Tabel 3.2 Hibah On-going Lembaga-lembaga PBB yang Tercatat dalam DRKH	78
Tabel 3.3 Pencapaian output <i>Low Emission Capacity Building Programme (LECB)</i>	79
Tabel 3.4 Pencapaian output <i>Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI)</i>	81
Tabel 3.5 Gambaran umum Hibah Program <i>MCC Compact</i>	84
Tabel 3.6 Komponen Pembiayaan Program <i>MCC Compact</i>	84
Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran <i>Compact</i>	85
Tabel 4.1 Profil Proyek <i>Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening</i>	89
Tabel 4.2 Profil Proyek <i>ERP (Enterprise Resources Planning) Sumatera and Sulawesi</i>	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman	3
Gambar 1.2 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri dari Instansi Penanggung Jawab	5
Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	10
Gambar 2.2 Jumlah Pinjaman Proyek ADB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	25
Gambar 2.3 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan II TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	32
Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan II TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan ..	33
Gambar 3.1 Jumlah Hubah <i>On-going</i> Lembaga-lembaga PBB yang Tercatat dalam DRKH menurut Instansi Penanggung Jawab.....	78

BAB I GAMBARAN UMUM

Nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 (posisi 30 Juni 2014) sebesar ekuivalen USD 19.696,28 juta dengan jumlah proyek 154 proyek (164 *Loan Agreement*). Pada Tahun Anggaran 2014 untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap suatu proyek maka perhitungan proyek tidak berdasarkan jumlah *Loan Agreement*, beberapa *Loan Agreement* dalam pembiayaan suatu proyek dihitung menjadi 1 proyek saja. Total penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 sebesar ekuivalen USD 7.550,41 juta atau 38,33% dari total nilai pinjaman. Realisasi penyerapan pada Tahun Anggaran 2014 periode Januari – Juni 2014 sebesar ekuivalen USD 1.306,42 juta atau 41,3% dari target penyerapan TA 2014 sebesar ekuivalen USD 3.163,04 juta.

Pada Triwulan II Tahun 2014, nilai total pinjaman proyek yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2014. Perubahan nilai total pinjaman ini disebabkan karena i) adanya 12 proyek yang baru efektif pada Triwulan II tahun 2014 dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 1.079,41 juta dan ii) adanya proyek yang telah berakhir masa berlakunya di triwulan sebelumnya dengan nilai pinjaman ekuivalen USD 624,91 juta. Selain itu, terdapat perubahan nilai proyek yang disebabkan adanya perbedaan penggunaan nilai tukar pada saat pelaporan. Perbandingan jumlah proyek, jumlah *Loan Agreement* (LA) dan total nilai pinjaman yang sedang berjalan (*on going*) pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014

(Ekuivalen Juta USD)

TA 2014 Triwulan	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA		
			Jumlah	%		Target	Realisasi	%
I	143*)	19.317,86	7.305,95	37,82	12.011,94	3.007,10	826,65	27,49
II	154**)	19.696,28	7.550,41	38,33	12.145,89	3.163,04	1.306,42	41,30

Catatan : *) Terdiri dari 143 proyek dengan 152 *Loan Agreement*

***) Terdiri dari 154 proyek dengan 164 *Loan Agreement*

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

Berdasarkan sumber pinjamannya, 154 pinjaman luar negeri yang dipantau pelaksanaannya pada Triwulan II Tahun 2014 yang berasal dari 3 kelompok sumber pinjaman luar negeri. Kelompok sumber pinjaman luar negeri terdiri dari Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). Sumber pinjaman Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan *Saudi Fund*. Sumber pinjaman Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga

yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti *Japan Bank for International Cooperation (JICA)*, Australia, Jerman, Korea, Perancis, AFD, RR Tiongkok, dan Spanyol. Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti *BNP Paribas*, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*. Rekapitulasi pinjaman luar negeri berdasarkan sumber pinjaman sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	% Terhadap Total Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
							Target	Realisasi	%
I	Kreditor Multilateral	58	6.716,77	34,10	2.097,63	4.619,14	963,79	171,73	17,82
	Bank Dunia	26	4.670,50	23,71	1.541,32	3.129,18	560,83	143,98	25,67
	ADB	11 ^{*)}	771,27	3,92	282,56	488,71	155,73	22,39	14,38
	IDB	16 ^{*)}	1.076,79	5,47	192,11	884,68	229,25	2,03	0,88
	IFAD	4	162,21	0,82	81,64	80,57	17,98	3,33	18,62
	<i>Saudi Fund</i>	1	36,00	0,18	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
II	Kreditor Bilateral	68	7.677,38	38,98	2.658,92	5.018,48	1.080,96	201,23	18,62
	JICA	44	5.941,77	30,71	2.081,72	3.860,05	737,39	103,70	14,06
	Australia	1	282,35	1,43	233,76	48,58	18,77	5,89	31,39
	Jerman	3	85,67	0,43	32,86	52,81	26,66	0,20	0,76
	Korea	7	373,43	1,90	57,30	316,12	39,27	0,83	2,12
	Perancis	4	278,79	1,42	26,24	252,55	36,08	6,11	16,96
	AFD	3	129,50	0,66	39,00	90,50	34,50	0,00	0,00
	RR Tiongkok	5	531,89	2,70	156,89	375,00	156,67	74,51	47,56
Spanyol	2	53,98	0,27	31,14	22,84	31,63	9,98	31,51	
III	KSA/LPKE	27	5.302,13	26,92	2.793,88	2.508,25	1.118,29	933,46	83,47
Total		154^{*)}	19.696,28	100,00	7.550,41	12.145,89	3.163,04	1.306,42	41,30

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

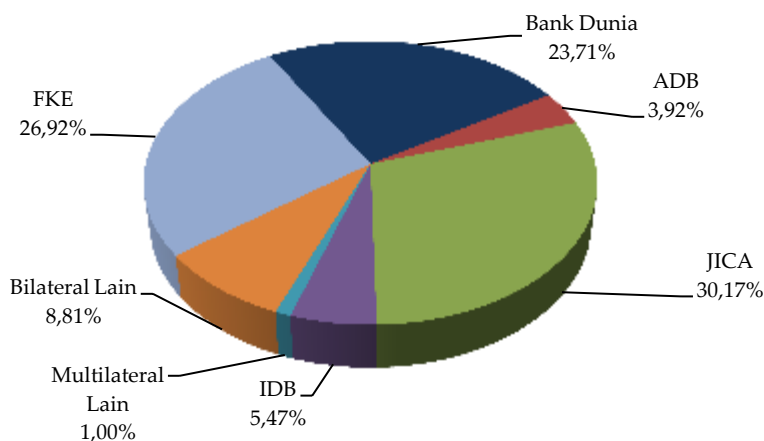
Catatan : *) Terdiri dari 154 proyek dengan 164 Loan Agreement: ADB terdiri dari 11 proyek dengan 12 Loan Agreement dan IDB terdiri dari 16 proyek dengan 25 Loan Agreement.

Dari 154 proyek yang dipantau berdasarkan sumber pinjamannya, proyek yang berasal dari Kreditor Multilateral berjumlah 58 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.716,77 juta. Target penarikan pinjaman TA 2014 dari Kreditor Multilateral sebesar ekuivalen USD 963,79 juta dengan realisasi penyerapan sebesar USD 171,73 juta atau 17,82% dari total target penarikan pinjaman TA 2014. Realisasi penyerapan pada IDB pada triwulan ini dikategorikan rendah karena realisasi penyerapannya hanya mencapai 0,88%. Rendahnya penyerapan diakibatkan adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek antara lain lamanya waktu bagi IDB untuk memberikan atau menerbitkan *approval (NOL)*, seperti pada proyek *the Development of IAIN Sunan Ampel* yang membutuhkan waktu lebih dari 9 bulan untuk proses tender pekerjaan fisik.

Jumlah proyek dari Kreditor Bilateral berjumlah 68 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 7.677,38 juta. Target penarikan pinjaman TA 2014 dari Kreditor Bilateral sebesar ekuivalen USD 1.080,96 juta dengan realisasi penyerapan sebesar USD 201,23 juta atau 18,62% dari total target penarikan pinjaman TA 2014. Rendahnya nilai realisasi penyerapan sampai dengan Juni 2014 utamanya disebabkan pelaksanaan pinjaman pemerintah Jerman untuk proyek *Sustainable Economic Development through Tech & Vocational Education and Training (SED-TVET)* dan proyek *Track Maintenance Improvement Programme*. Pelaksanaan proyek tersebut terkendala oleh keterlambatan pencantuman DIPA, perpanjangan masa laku pinjaman, dan pengadaan barang dan. Selain pemerintah Jerman, proyek *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement* yang dibiayai AFD tidak melakukan penyerapan sampai dengan Juni 2014. Salah satu penyebabnya yaitu pada proyek tersebut, yang dilaksanakan oleh PT. PLN, terdapat permasalahan terkait mekanisme penarikan pinjaman memiliki batas waktu yang tidak sama dengan pinjaman yang berasal dari ADB.

Jumlah proyek KSA/LPKE berjumlah 27 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 5.302,13 juta. Target penarikan pinjaman TA 2014 dari LPKE/KSA sebesar ekuivalen USD 1.118,29 juta dengan realisasi penyerapan sebesar USD 933,46 juta atau 83,47% dari total target penarikan pinjaman TA 2014. Instansi pelaksana yang dibiayai oleh KSA/LPKE adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia dan PT. PLN.

Komposisi pinjaman luar negeri Triwulan II TA 2014 berdasarkan sumber pinjaman dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Keterangan: - Pinjaman Multilateral lain terdiri pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund
 - Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Australia, Jerman, Korea, Perancis, AFD, RR Tiongkok dan Spanyol

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Pada Triwulan II Tahun 2014 terdapat 154 proyek yang dilaksanakan oleh 21 Kementerian/Lembaga, 4 BUMN dan 1 Pemda selaku instansi penanggung jawab. Dari jumlah tersebut, 127 proyek merupakan pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, 25 proyek merupakan pinjaman proyek yang diteruskanpinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 2 proyek

diterushibahkan ke Pemda DKI. Rekapitulasi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	% Terhadap Total Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/Lembaga	127	15.330,32	77,83	6.742,04	43,98	8.588,31	2.672,38	1.228,43	45,97
Kemendagri	3	1.044,39	5,30	682,98	65,40	361,41	138,72	31,44	22,66
Kemenhan	21	5.229,93	26,55	2.769,87	52,96	2.460,06	1.086,75	933,46	85,89
Kemenkeu	2	169,97	0,86	33,05	19,44	136,92	28,06	8,40	29,94
Kementan	3	147,07	0,75	40,00	27,20	107,07	32,32	10,48	32,43
Kemenhub	9	1.341,32	6,81	156,34	11,66	1.184,98	235,69	15,51	6,58
Kemendikbud	13 ²⁾	832,88	4,23	175,63	21,09	657,25	192,60	10,09	5,24
Kemenkes	3	80,27	0,41	69,61	86,72	10,66	1,14	0,00	0,00
Kemenag	4 ²⁾	172,05	0,87	0,84	0,49	171,21	45,77	0,18	0,39
Kemen KP	5	186,76	0,95	21,31	11,41	165,45	27,46	2,11	7,68
Kemen PU	44 ²⁾	5.201,30	26,41	2.564,22	49,30	2.637,08	730,57	195,20	26,72
Kemenristek	1	95,00	0,48	0,06	0,06	94,94	12,02	0,05	0,42
Kemenakertrans	1	32,50	0,17	0,00	0,00	32,50	0,38	0,00	0,00
BPS	1	65,00	0,33	0,00	0,00	65,00	5,25	0,00	0,00
Bappenas	4	306,01	1,55	116,42	38,04	189,59	32,89	7,31	22,23
Kemenkominfo	2	94,24	0,48	11,66	12,37	82,58	13,52	0,00	0,00
Kepolisian RI	6	96,73	0,49	4,55	4,71	92,17	29,12	0,49	1,70
Badan Otorita Batam	1	52,84	0,27	0,00	0,00	52,84	1,59	0,00	0,00
BPKP	1	57,75	0,29	3,32	5,75	54,43	13,63	1,41	10,34
BMKG	1	41,35	0,21	26,24	63,47	15,11	26,24	6,11	23,30
LIPI	1	20,06	0,10	12,53	62,45	7,53	6,52	0,00	0,00
BIG	1	62,91	0,32	53,36	84,81	9,55	12,13	6,18	50,94
Diteruspinjamkan (SLA)	25	3.872,23	19,66	692,74	17,89	3.179,50	308,53	70,75	22,93
PT. PLN	20	3.076,44	15,62	502,57	16,34	2.573,87	237,48	50,36	21,21
PT. Pertamina	2	566,19	2,87	3,56	0,63	562,62	36,48	0,38	1,05
PT. SMI	2	200,00	1,02	186,60	93,30	13,40	33,40	20,00	59,88
PT. PII	1	29,60	0,15	0,00	0,00	29,60	1,16	0,00	0,00
Diterushibahkan	2	493,75	2,51	115,67	23,43	378,08	182,13	7,25	3,98
Pemda DKI	2	493,75	2,51	115,67	23,43	378,08	182,13	7,25	3,98
Total	154¹⁾	19.696,28	100,00	7.550,41	38,33	12.145,89	3.163,04	1.306,42	41,30

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan : 1) Terdiri dari 154 proyek dengan 164 Loan Agreement

2) Kemendikbud terdiri dari 13 proyek dengan 18 Loan Agreement, Kemenag terdiri dari 4 proyek dengan 5 Loan Agreement dan Kemen PU terdiri dari 44 proyek dengan 48 Loan Agreement.

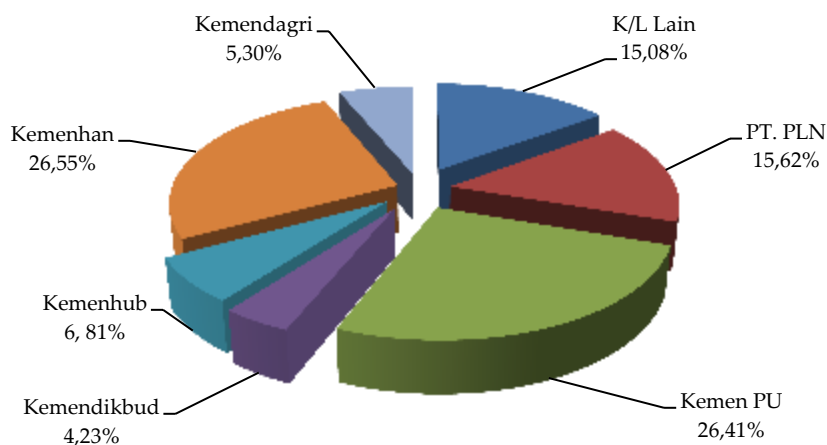
Secara rinci dari tabel di atas ini, proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga nilainya sebesar ekuivalen USD 15.530,32 juta dengan penyerapan kumulatif mencapai ekuivalen USD 6.742,04 juta dan realisasi penyerapan pada Triwulan II Tahun 2014 mencapai ekuivalen USD 1.228,43 juta atau sebesar 45,97% dari target penyerapan ekuivalen USD 2.672,38 juta. Jika dilihat dari

persentase penyerapan pinjaman selama Tahun Anggaran 2014, penyerapan di beberapa Kementerian dan Lembaga dapat dikategorikan rendah dengan persentase dibawah 10% antara lain di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.

Proyek yang diteruskan nilainya sebesar ekuivalen USD 3.872,23 juta dengan penyerapan kumulatif mencapai ekuivalen USD 692,74 juta dan realisasi penyerapan pada Triwulan II Tahun 2014 mencapai ekuivalen USD 70,75 juta atau sebesar 22,93% dari target penyerapan ekuivalen USD 308,53 juta. Jika dilihat dari Tabel 1.3, PT. Pertamina dan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT. PII) masih rendah realisasi penyerapannya pada posisi Triwulan II Tahun 2014 ini. Rendahnya realisasi penyerapan pada PT. Pertamina karena sedang dalam tahapan proses evaluasi teknik atas dokumen penawaran.

Proyek yang terus dihibahkan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu proyek *E/S Jakarta Mass Rapid Transit System* dan *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project*. Proyek yang terus dihibahkan memiliki nilai sebesar ekuivalen USD 493,75 juta dengan penyerapan kumulatif mencapai ekuivalen USD 115,67 juta dan realisasi penyerapan pada Triwulan II Tahun 2014 mencapai ekuivalen USD 7,25 juta atau sebesar 3,98% dari target penyerapan ekuivalen USD 182,13 juta.

Komposisi dan besaran pinjaman luar negeri dari masing-masing Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemda DKI selaku instansi penanggung jawab dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

PERMASALAHAN PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Permasalahan umum yang diidentifikasi dari Rapat pemantauan Triwulan II Tahun 2014 dan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri yaitu:

- Permasalahan **pengadaan barang dan jasa** menjadi kendala di beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan dan PT. PLN. Lamanya proses pengadaan barang jasa disebabkan lamanya

penyiapan dokumen tender sampai dengan hasil pemenang tender serta proses mendapatkan persetujuan lender. Selain itu terdapat beberapa proyek seperti *Loan Korea, INA-19, Construction of Karian Multipurpose Dam; Loan JICA, IP-559, Upper Citarum River Basin Flood Management; Loan IDB IND-140/141, The Quality Improvement of Padjajaran University* yang harus melakukan tender ulang. Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan ini yaitu proses pengadaan diusahakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan melakukan koordinasi dengan *Lender*.

- Permasalahan dalam **pengadaan lahan** lebih sering terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan PT. PLN. Pada proyek PT. PLN masalah lahan sebagian besar menyangkut pembangunan jalur transmisi dan pembangunan PLTA, seperti *Loan JICA IP-532, Asahan Hydroelectric Power Plant Constructions III, IP-538 Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction, IP-539 North-West Sumatera Inter-Connector Transmission Line Construction, Loan JBIC Scattered Transmissions and Substantions Package 8* dan *Loan Bank Dunia 8057-ID, Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1040 MW)*. Berdasarkan laporan dari instansi penanggung jawab pada Triwulan II Tahun 2014 dapat diidentifikasi bahwa masalah pengadaan lahan/pembebasan lahan antara lain menyangkut ketersediaan dana untuk pembebasan lahan, penolakan masyarakat, kesepakatan harga tanah, perijinan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan mengalokasikan dana APBN dalam jumlah yang cukup untuk membiayai pembebasan tanah, berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab dan mitra pembangunan baik secara vertikal dan horizontal sehingga keputusan yang telah disepakati antar level pimpinan (direksi) dapat dipenuhi pada level teknis.
- **Revisi DIPA** terjadi pada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan dan Bappenas. Penyebab dilakukannya revisi DIPA karena kekurangan alokasi dana dalam DIPA, perbedaan pagu DIPA dengan sisa kontrak dan perencanaan yang kurang matang. Tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu mengajukan revisi DIPA secepatnya dan mempersiapkan rencana anggaran tahun berikutnya dengan baik.
- **Penyebab teknis** menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan adalah: i) penyelesaian dan perubahan detail desain, ii) penyelesaian amdal, iii) ijin kerja, minimnya tenaga kerja dan material di lokasi proyek, kinerja kontraktor kurang baik, dan iv) kendala cuaca dan kondisi lapangan.
- **Proses pencairan dan pencatatan** menjadi kendala dalam triwulan ini dikarenakan sistem baru yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

PINJAMAN PROYEK YANG BARU EFEKTIF DAN YANG BERAKHIR MASA BERLAKUNYA PADA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2014

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2014, terdapat 12 proyek yang baru efektif, yaitu dari sumber pinjaman Bank Dunia, ADB, IDB dan JICA, Pemerintah RR Tiongkok dan Perancis. Terdapat 2 proyek yang dibiayai dari dua sumber pembiayaan (*co-financing*), yaitu proyek *Coremap-CTI* yang merupakan proyek dari sumber pinjaman Bank Dunia yang baru efektif pada triwulan ini dan *co-financing* dengan sumber pinjaman ADB. Selain itu, proyek *Strengthening West Kalimantan Power Grid* merupakan proyek dari sumber pinjaman ADB yang *co-financing* dengan sumber pinjaman AFD. Detail proyek-proyek baru tersebut dapat dilihat berikut ini:

Tabel 1.4 Proyek yang Baru Efektif di Triwulan II Tahun 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Loan	Instansi Penanggung Jawab	Nama Proyek	Masa Laku Loan	Nilai Loan
Bank Dunia					
1	8336-ID	Kemen KP	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program- Coral Triangle Initiative</i>	05/06/2014-30/06/2019	47,38
ADB					
2	3015-INO	PT.PLN	<i>Strengthening West Kalimantan Power Grid Project</i>	04/04/2014-31/01/2016	49,5
IDB					
3	IND-168	Kemendikbud	<i>The Support to Higher Education Project (7 in 1)</i>	14/04/2014-14/04/2018	174,01
JICA					
4	IP-568	Bappenas	<i>Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV</i>	25/04/2014-24/02/2020	69,84
5	IP-566*)	Kemen PU	<i>Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II</i>	24/02/2014-24/02/2018	50,04
6	IP-567*)	Kemen PU	<i>Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)</i>	24/02/2014-24/02/2018	48,5
7	IP-564*)	Kemen PU	<i>Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development</i>	24/02/2014-24/02/2017	98,18
8	IP-565*)	Kemen PU	<i>Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta ES</i>	24/02/2014-24/02/2018	19,27
9	IP-562*)	Kemenhub	<i>Railway Double Tracking on Java South Line Project (IV)</i>	24/02/2014-24/02/2019	165,21
10	IP-563*)	Kemenhub	<i>Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I</i>	24/02/2014-20/02/2020	159,79
RR Tiongkok					
11	21661901*)	PT. PLN	<i>Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project</i>	26/03/2013-28/04/2017	132,19
Perancis					
12	21686401*)	Kemenkominfo	<i>The Improvement on Television Weather Services</i>	13/12/2013-13/12/2016	65,50
Total					1.079,41

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan : *) Proyek yang efektif di Triwulan I TA 2014 namun baru tercatat di Triwulan II TA 2014

Sementara itu, terdapat 3 proyek yang berakhir masa berlakunya di Triwulan II TA 2014, proyek tersebut bersumber dari Bank Dunia, JICA, Korea dan RR Tiongkok (Tabel 1.4). Masih terdapat sisa Loan untuk proyek *Strategic Road Investment* diharapkan dapat terserap selama jangka waktu *closing account* (4 bulan setelah *closing date*). Untuk proyek *Ulubelu Geothermal Power Plant* terdapat sisa loan sebesar USD 41,54 juta yang tidak dimanfaatkan, dalam rangka pencapaian tujuan proyek yang akan berakhir pada triwulan ini dan akan dilanjutkan dengan menggunakan anggaran PT. PLN Untuk lebih detail proyek yang berakhir masa berlakunya pada triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Proyek yang Berakhir Masa Berlakunya di Triwulan II Tahun 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Loan	Instansi Penanggung Jawab	Nama Proyek	Masa Laku Loan	Nilai Loan	Sisa Loan
Bank Dunia						
1	4834-IND	Kemen PU	<i>Strategic Road Investment Project</i>	01/11/2007-30/06/2014	181,46	29,41
2	8079-ID	Kemendagri	PNPM Rural IV	01/09/2011-30/06/2014	531,19	6,22
JICA						
3	IP-525	PT. PLN	<i>Ulubelu Geothermal Power Plant</i>	28/12/2005-30/06/2014	200,27	41,54
Total					912,92	77,17

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pada Triwulan II Tahun 2014, terdapat 129 proyek hibah yang dilaporkan oleh 13 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 969.302.817. Dari 13 Kementerian/Lembaga, Kementerian Pertanian mengelola 73 proyek dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 127.217.244, Kementerian Lingkungan Hidup mengelola 16 proyek dengan total nilai hibah ekuivalen USD 44.786.138, dan Kementerian ESDM mengelola 8 proyek dengan total nilai hibah ekuivalen USD 31.534.159.

Tabel 1.6 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan II Tahun 2014

(Ekuivalen USD)

Hibah	Jumlah	Nilai
Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang	65	628.778.045
Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga	47	228.648.549
Hibah Lainnya	17	111.876.224
TOTAL	129	969.302.817

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

- **Pemantauan hibah luar negeri bersumber dari hibah lembaga PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*)**

Pada tahun 2014 terdapat 11 kegiatan hibah dari lembaga-lembaga PBB yang masih aktif dan tercatat dalam DRKH, dengan total nilai hibah indikatif sebesar USD 37,69 juta. Kegiatan yang dibiayai hibah tersebut dilaksanakan oleh 7 Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kementerian PDT dan kementerian lainnya yang dapat dilihat pada Bab Hibah UNDP.

- **Pemantauan hibah luar negeri bersumber dari hibah Pemerintah Amerika Serikat (*Millennium Challenge Corporation/MCC*).**

Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah institusi independen Pemerintah AS yang menyalurkan bantuan dengan misi penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dana hibah MCC senilai USD 600 juta dan penyerapan kumulatif sampai dengan Juni 2014 mencapai USD 32,99 juta atau sebesar 5,49% dari total nilai hibah. Hibah *Program Compact* digunakan untuk membiayai 5 komponen yaitu *Green Prosperity, Community-based Nutrition, Procurement Modernization, Administration and Control, dan Monitoring and Evaluation*.

BAB II

KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

KREDITOR MULTILATERAL

Pada Triwulan II TA 2014 jumlah proyek pinjaman dari Kreditor Multilateral adalah sebanyak 58 proyek, jumlah ini bertambah sebanyak 4 proyek dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada Penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai 31,23% (USD 2.097,63 juta) dari total nilai pinjaman sebesar USD 6.716,77 juta, sedangkan realisasi pinjaman pada triwulan ini mencapai 17,82% dari target atau senilai USD 171,73 juta. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 26 proyek pinjaman dari Bank Dunia, 11 proyek pinjaman dari ADB, 16 proyek pinjaman dari IDB, 4 proyek pinjaman IFAD, dan 1 proyek pinjaman dari *Saudi Fund*, seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	Bank Dunia	26	4.670,50	1.541,32	33,00	3.129,18	560,83	143,98	25,67
2	ADB	11 ¹⁾	771,27	282,56	36,64	488,71	155,73	22,39	14,38
3	IDB	16 ¹⁾	1.076,79	192,11	17,84	884,68	229,25	2,03	0,88
4	IFAD	4	162,21	81,64	50,22	80,57	17,98	3,33	18,62
5	<i>Saudi Fund</i>	1	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Total		58²⁾	6.716,77	2.097,63	31,23	4.619,14	963,79	171,73	17,82

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan : 1) ADB terdiri dari 11 proyek dengan 12 Loan Agreement & IDB terdiri dari 16 proyek dengan 25 Loan Agreement

2) Terdiri dari 58 proyek dengan 68 Loan Agreement

Menurut instansi penanggung jawab, sebanyak 49 proyek pinjaman dari Kreditor Multilateral dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan sebanyak 9 proyek diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*). Nilai total pinjaman yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebesar USD 4.897,67 juta dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai USD 1.842,48 juta (37,62%), sedangkan nilai pinjaman yang diteruspinjamkan mencapai USD 1.819,1 juta dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini sebesar USD 255,12 juta (14,02%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		49	4.897,67	1.842,48	37,62	3.055,17	838,83	124,94	14,89
1	Kemendagri	3	1.044,39	682,98	65,40	361,41	138,72	31,44	22,66
2	Kemenkeu	2	169,97	33,05	19,44	136,92	28,06	8,40	29,94
3	Kementan	3	147,07	40,00	27,20	107,07	32,32	10,48	32,43
4	Kemendagri	1	87,55	0,75	0,86	86,80	2,62	0,27	10,31

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
5	Kemendikbud	9 ¹⁾	529,57	72,80	13,75	456,77	118,57	3,65	3,08
6	Kemenag	4 ¹⁾	172,05	0,84	0,49	171,21	45,77	0,18	0,39
7	Kemen KP	4	156,76	12,75	8,13	144,01	15,78	2,11	13,37
8	Kemen PU	17 ¹⁾	2.199,81	945,31	42,97	1.254,50	400,86	61,05	15,23
9	Kemenristek	1	95,00	0,06	0,06	94,94	12,02	0,05	0,42
10	Kemenakertrans	1	32,50	0,00	0,00	32,50	0,38	0,00	0,00
11	BPS	1	65,00	0,00	0,00	65,00	5,25	0,00	0,00
12	Bappenas	2	140,25	50,62	36,09	89,63	24,85	5,90	23,74
13	BPKP	1	57,75	3,32	5,75	54,43	13,63	1,41	10,34
Diteruspinjamkan (SLA)		9	1.819,10	255,12	14,02	1.563,98	124,95	46,80	37,45
14	PT. PLN	5	1.289,50	68,52	5,31	1.220,98	67,70	26,80	39,59
15	PT. Pertamina	1	300,00	0,00	0,00	300,00	22,69	0,00	0,00
16	PT. SMI	2	200,00	186,60	93,30	13,40	33,40	20,00	59,88
17	PT. PII	1	29,60	0,00	0,00	29,60	1,16	0,00	0,00
Total		58²⁾	6.716,77	2.097,63	31,23	4.619,14	963,79	171,74	17,82

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

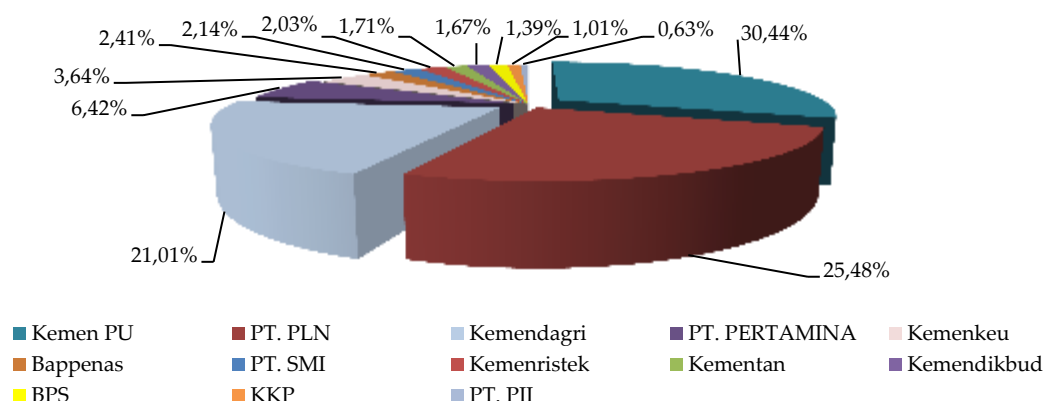
Catatan : 1) Kemendikbud terdiri dari 9 proyek dengan 14 Loan Agreement, Kemenag terdiri dari 4 proyek dengan 5 Loan Agreement, dan Kemen PU terdiri dari 17 proyek dengan 21 Loan Agreement.

2) Terdiri dari 58 proyek dengan 68 Loan Agreement

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek pinjaman dari lembaga multilateral berdasarkan lembaga pemberi pinjaman. Pembahasan terdiri dari gambaran umum pinjaman, kinerja pelaksanaan permasalahan dan tindak lanjut serta hasil kunjungan lapangan.

Bank Dunia

Pada triwulan II tahun 2014 jumlah pinjaman proyek Bank Dunia yang sedang berjalan adalah USD 4.670,5 juta. Jumlah pinjaman tersebut sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya karena terdapat 1 proyek yang baru efektif sehingga jumlah proyek yang sedang berjalan menjadi 26 proyek. Sebanyak 20 proyek diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan 6 proyek lainnya diteruspinjamkan.



Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Jumlah pinjaman terbesar pada triwulan II TA 2014 yaitu pada Kementerian PU, PT. PLN, dan Kementerian Dalam Negeri dengan proporsi masing-masing secara berurutan 30,44%, 25,48% dan

21,01%. Kementerian/Lembaga dengan jumlah pinjaman terendah pada triwulan ini adalah PT. PII dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan proporsi masing-masing secara berurutan 0,63% dan 1,01% dari total nilai pinjaman proyek Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia.

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Pada Triwulan II TA 2014 terdapat dua proyek pinjaman Bank Dunia yang tutup yaitu i) *Strategic Road Investment Project* yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga) dan ii) *Fourth National Program for Community Empowerment Programme for Self-reliant Rural Community Empowerment* (PNPM Rural IV) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa). Selain itu, juga terdapat 1 proyek yang baru efektif yaitu *Coral Reef Rehabilitation and Management Program- Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)* dengan *executing agency* Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proyek ini dilaksanakan secara *co-financing* dengan ADB, namun *Loan* ADB telah lebih dahulu efektif pada triwulan sebelumnya. Proyek *Coremap CTI* direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan bulan Juni tahun 2019.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Kinerja Pencapaian Output

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2014 penyerapan kumulatif untuk proyek-proyek pinjaman Bank Dunia telah mencapai USD 1.541,32 juta atau sebesar 33,00% dari total komitmen pinjaman. Realisasi pada triwulan I dan II telah mencapai USD 143,98 juta (25,67%) dari target tahun 2014.

Tabel 2.3 Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan II TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Instansi Pelaksana	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum ditarik	Penyerapan Tahun 2014		
				Nilai	%		Target ¹⁾	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		20	3.050,90	1.396,16	45,76	1.654,76	466,40	101,63	21,80
1.	Kemen PU	10	1.421,91 ²⁾	621,08	43,68	800,83	227,51	46,04	20,24
2.	Kementan	1	80,00	13,10	16,38	66,90	21,84	7,59	34,75
3.	Kemendikbud	1	77,80	62,27	80,04	15,53	12,80	2,47	19,30
4.	Kemendagri	2	981,19	630,91	64,30	350,28	136,90	31,28 ³⁾	22,85
5.	Kemenkeu	2	169,97	33,05	19,44	136,92	28,06	8,40	29,94
6.	Kemenristek	1	95,00	0,06	0,06	94,94	12,02	0,05	0,42
7.	KKP	1	47,38	0,00	0,00	47,38	1,60	0,00	0,00
8.	Bappenas	1	112,65	35,69	31,68	76,96	20,42	5,82	28,50
9.	BPS	1	65,00	0,00	0,00	65,00	5,25	0,00	0,00
Diteruspinjamkan (SLA)		6	1.619,60	145,16	8,96	1474,44	94,43	42,33	44,83
10.	PT. PLN	3	1.190,00	53,16	4,47	1.136,84	42,58	22,33	52,44
11.	PT. Pertamina	1	300,00	0,00	0,00	300,00	22,69	0,00	0,00
12.	PT.SMI	1	100,00	92,00	92,00	8,00	28,00	20,00	71,43
13.	PT. PII	1	29,60	0,00	0,00	29,60	1,16	0,00	0,00
Total		26	4.670,50	1.541,32	33,00	3.129,18	560,83	143,98	25,67

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan:

¹⁾ Data target telah diperbaharui sesuai dengan data yang disampaikan dalam LPKPHLN, pada beberapa proyek terdapat perubahan nilai DIPA.

²⁾ Terdapat partial Cancellation proyek SRIP sebesar USD 10 juta.

³⁾ Terdapat revisi angka realisasi triwulan I 2014 yang dokumen SP3-nya baru disahkan pada triwulan ini sebesar USD 1,48 juta.

Menurut instansi pelaksana kegiatan, terdapat 4 instansi yang belum ada progres penyerapan dana sampai dengan Triwulan II Tahun 2014. Dua diantaranya merupakan instansi yang kegiatannya baru efektif yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT. PII, sementara itu 2 instansi lainnya (BPS dan PT. Pertamina) masih belum dapat menyerap dana pinjaman. Penyebab belum adanya penyerapan pinjaman akan dibahas lebih rinci pada bagian pembahasan per-proyek.

Beberapa instansi juga telah menunjukkan progres yang signifikan dalam realisasi dana pinjaman pada tahun 2014, antara PT. SMI. Dari target penyerapan sebesar USD 28 juta untuk tahun ini, pada Triwulan II telah terealisasi sebesar USD 20 juta (71,43%). Begitu juga dengan progres penyerapan untuk proyek-proyek di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, pada Triwulan II Tahun 2014 nilainya telah melebihi target awal untuk tahun ini.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- ***Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)***

Dari jumlah pinjaman sebesar USD 50 Juta, sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 penyerapan kumulatif telah mencapai USD 29,50 juta (58,99%). Jika dibandingkan dengan waktu yang sudah terpakai, persentase nilai penyerapan dana tersebut masih jauh lebih rendah sehingga nilai *progress variant* masih cukup tinggi yaitu mencapai -18,11, artinya proyek ini masih mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah terhentinya proses pengadaan peralatan pengerukan sedimen (*Dredger*) senilai Rp 24,8 miliar yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar yang cukup besar dan tidak tercakup dalam ruang lingkup kontrak yang menggunakan nilai rupiah. Upaya tindak lanjut telah dilakukan evaluasi terhadap kontrak dan pendekatan kepada kontraktor sehingga dihasilkan kesepakatan untuk segera menyelesaikan kontrak tersebut.

Capaian untuk indikator *Project Development Objective (PDO)* maupun *intermediate result* proyek DOISP telah menunjukkan progres yang signifikan, termasuk pada indikator PDO yang pada triwulan sebelumnya belum menunjukkan progress yaitu *The Directorate General of Water Resources (DGWR) Dam Portfolio Management Program Established*. Sampai dengan Triwulan II TA 2014 beberapa kegiatan telah dilakukan yaitu *annual O&M finding program* pada 58 bendungan (sedang berjalan), *human resources development program* untuk staff dan operator oleh *The Dam Safety Unit (DSU)* di 28 bendungan dan oleh *Technical Assistance Central Project Implementation Unit (TA CPIU)* di 64 bendungan serta *dam hydrology program* pada 33 bendungan.

Dua indikator *intermediate result* yang pada triwulan sebelumnya belum menunjukkan kemajuan yaitu *Special studies for dams completed* dan *Household joining catchment management Activities*, pada triwulan ini telah terdapat capaian yang cukup baik. Untuk kajian khusus dan analisis resiko telah dilakukan pada 23 bendungan, sedangkan terkait partisipasi masyarakat pada daerah percontohan telah mencapai 34% dari target sebesar 25%.

Untuk *DGWR Dam Portfolio Management Program Establishment* diperlukan pemutakhiran status capaian saat ini. Untuk itu direncanakan akan dibentuk tim teknis

untuk meninjau, meneliti dan melakukan verifikasi. Capaian pada indikator studi khusus (*special study*) sebelumnya terkendala oleh terbatasnya tenaga ahli bendungan dan perusahaan yang berpengalaman dalam konstruksi bendungan. Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan mutu tenaga ahli bendungan melalui sertifikasi dan *training* spesialis. Selanjutnya, untuk meningkatkan capaian indikator *intermediate result* terkait keterlibatan masyarakat dalam manajemen dan pemeliharaan bendungan, pelaksana kegiatan terus melakukan berbagai upaya optimalisasi melalui program-program percontohan yang berkelanjutan.

Selain itu juga terdapat permasalahan dalam pekerjaan rehabilitasi bendungan dimana detail *design* pada 5 paket yang tersisa terkendala pelaksanaan revisi dan koreksi oleh konsultan. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan triwulan ini diantaranya rehabilitasi peralatan hidromekanikal (*Fixed Cone Valve*) yang diperkirakan membutuhkan waktu 18 bulan, mengalami keterlambatan dalam penandatanganan kontrak sehingga dikhawatirkan memerlukan perpanjangan masa berlaku *Loan Agreement*. Terkait dengan kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan (O&M) bendungan, sampai saat ini belum dihasilkan perencanaan yang baik disebabkan oleh terbatasnya SDM yang berpengalaman serta tipe dan kondisi bendungan yang beragam pula.

- ***Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP-II)***

Pada Triwulan II Tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek ini mencapai USD 16,8 juta (11,2%) dan *progress variant* sebesar -41,09. Penyerapan dana masih rendah karena beberapa pembayaran di daerah belum ditagihkan oleh pelaksana kegiatan. Perubahan metode pengadaan barang dan jasa menjadi metode *shopping* saat ini masih menunggu persetujuan amandemen *Loan Agreement*. Terkait dengan permasalahan belum adanya penganggaran di 3 daerah (Solo, Mamuju, dan Morowali) yang diidentifikasi pada triwulan sebelumnya saat ini telah dimasukkan dalam DIPA perubahan. Realisasi dana diperkirakan akan membaik pada triwulan selanjutnya karena beberapa paket konsultan telah terkontrak dan akan segera dilakukan penarikan uang muka.

Pada proyek WISMP 2, dokumen *Implementation Status Report (ISR)* terbaru (Juni 2014) menunjukkan belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam capaian indikator PDO maupun *intermediate result*. Pada indikator PDO hanya 1 indikator yang telah menunjukkan kemajuan dari total sebanyak 6 indikator, yaitu *number of irrigation commissions fully functional* pada triwulan ini telah terealisasi sebanyak 30 (tiga puluh). Indikator *intermediate result* yang telah menunjukkan kemajuan capaian adalah *establishment of effective institutional mechanism for Jatiluhur system management* pada periode sebelum sedang dilakukan finalisasi draft, kemajuan yang dicapai pada periode ini telah dilakukan negosiasi MoU untuk draft tersebut.

Perbedaan progres pelaksanaan kegiatan di masing-masing daerah dikhawatirkan dapat menyebabkan kinerja proyek menjadi rendah, oleh karena itu pelaksana proyek perlu membuat peta progres pelaksanaan proyek pada masing-masing daerah serta kendala yang dihadapi sehingga dapat segera dirumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya.

- ***Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)***

Penyerapan kumulatif proyek JUFMP sampai dengan saat ini adalah sebesar USD 9,7 juta dengan *progress variant* -33,8. Dengan angka *progress variant* tersebut proyek ini mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Sementara itu realisasi untuk Triwulan II TA 2014 belum dilaporkan sehingga jika terdapat realisasi maka akan dicatatkan pada triwulan selanjutnya.

Pada Triwulan II Tahun 2014 belum terdapat *update* untuk dokumen ISR, sehingga status capaian untuk indikator PDO maupun *intermediate result* masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu belum ada progres capaian. Pada Triwulan II Tahun 2014 masih terdapat permasalahan untuk LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*), meskipun tanggal *cut-off* telah ditetapkan namun belum ada tindak lanjut yang konkrit berdasarkan pedoman yang ada dalam RPF (*Resettlement Policy Framework*). Pengadaan untuk paket 6 (Banjir Kanal Barat dan Sunter) sampai saat ini juga masih terhambat oleh *Resettlement Plans* (RPs) yang belum dapat diselesaikan. Selain itu, terdapat penolakan dari beberapa Warga Terkena Proyek (WTP) di Kelurahan Penjaringan dan Roa Malaka, penolakan ini akan menghambat proses pemindahan penduduk.

- ***Strategic Road Infrastructure Project (SRIP)***

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2014 yang juga merupakan akhir dari masa berlaku proyek SRIP, penyerapan kumulatif telah mencapai USD 152,05 juta atau 83,79% dari total nilai proyek. Dengan demikian sisa pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar USD 29,41 juta yang diharapkan dapat terserap selama jangka waktu *closing account* (4 bulan setelah *closing date*). Permasalahan yang dihadapi dalam administrasi keuangan adalah penerbitan dokumen SP3 di 3 lokasi yang membutuhkan waktu cukup lama dan sampai saat ini belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Saat ini pihak penanggung jawab proyek terus melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. BPKP sudah melakukan *closing audit* untuk proyek SRIP namun terdapat beberapa paket yang *pending* terkait rekomendasi supaya eskalasi tidak dibayarkan. Penanggung jawab proyek telah menyetujui rekomendasi BPKP tersebut dan akan segera mengirimkan surat resmi sebagai tindak lanjutnya.

Sampai dengan akhir pelaksanaan proyek pada Triwulan II Tahun 2014, capaian untuk indikator PDO maupun *intermediate result* telah menunjukkan hasil yang sangat baik, semua indikator dapat dicapai melampaui target akhir yang ditetapkan meskipun terdapat 1 paket yang *di-cancel* pelaksanaannya. Penanggung jawab kegiatan diharapkan dapat segera menyusun *Project Completion Report* yang mencakup *lesson learned* dari perencanaan hingga pasca pelaksanaan proyek beserta pelembagaannya, begitu juga dengan strategi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan.

- ***Western Indonesia National Road Improvement (WINRIP)***

Kinerja penyerapan proyek sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 dari total nilai proyek sebesar USD 250 juta, hingga saat ini baru terealisasi sebesar USD 18,28 juta atau 7,31% dari total pinjaman. Meskipun sudah terdapat penambahan realisasi dana

pada triwulan ini angka *progress variant* masih mencapai -31,79 yang artinya proyek masih mengalami keterlambatan. Permasalahan terkait administrasi keuangan antara lain adanya temuan BPK mengenai perbedaan tanggal pencatatan dokumen SP2D dengan tanggal transaksi pada rekening kontraktor, jeda waktu tersebut rata-rata 4 hari, selain itu penarikan dana pinjaman dan dana pendamping yang seharusnya bersamaan, namun di dalam pelaksanaannya hal tersebut sulit dilakukan. Pelaksana menjelaskan bahwa pada saat pengajuan dana pinjaman dan dana pendamping selalu bersamaan, namun biasanya waktu pencairan dana berbeda dimana pencairan dana pinjaman selalu lebih lambat daripada dana pendamping.

Dokumen ISR terbaru menunjukkan bahwa belum ada progres baik dalam pencapaian indikator *intermediate result* maupun indikator PDO pada proyek WINRIP. Progres pelaksanaan pekerjaan pada komponen 1 (*civil work*) sebagai berikut:

Sebanyak empat paket pekerjaan telah terkontrak dan saat ini dalam tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi terjadi keterlambatan dari jadwal semula, salah satunya disebabkan oleh terlambatnya mobilitas peralatan.

Adapun tujuh paket pekerjaan lainnya sedang dalam proses pelelangan diharapkan dapat memulai pekerjaan pada tahun ini. Sementara itu, empat paket dalam proses pengecekan *road safety*, 4 paket lainnya dalam tahap penyelesaian DED oleh DSC dan 2 paket sedang menunggu instruksi DED dari BBPJN-II. Pada pertengahan tahun 2015 diharapkan semua paket pekerjaan telah terkontrak sehingga pada pertengahan tahun 2017 semua pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam *civil work* adalah proses pengadaan yang membutuhkan waktu lama disebabkan berbagai hal antara lain permintaan Bank Dunia untuk melakukan lelang dengan sistem *group*, keterlibatan BUMN dalam lelang, pelelangan yang dilakukan oleh pokja (kelompok kerja) di daerah membutuhkan waktu lama, lamanya pembentukan konsultan DSC serta permintaan dari Menteri Pekerjaan Umum untuk memberlakukan sistem *full e-proc* juga menyebabkan lamanya proses lelang. Saat ini telah disepakati dengan Bank Dunia pelelangan dapat dilakukan individual (masing-masing paket pekerjaan) dan untuk paket-paket dengan metode pelelangan NCB diberlakukan *full e-proc* sedangkan untuk ICB digunakan *semi e-proc*.

Untuk mempercepat proses pelelangan yang dilakukan oleh pokja di daerah diadakan forum pertemuan/konsultasi rutin dengan tim Bank Dunia. Selain itu, diperkirakan terjadi perubahan biaya pada paket-paket pekerjaan sehingga dikhawatirkan terdapat paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. Sebagai langkah tindak lanjut penanggung jawab proyek akan mengidentifikasi perubahan biaya yang terjadi pada masing-masing paket pekerjaan.

Progres pelaksanaan pekerjaan pada komponen 2 (dukungan pelaksanaan) saat ini *Core Team Consultant* (CTC) dalam proses pembuatan amandemen ke 2 untuk penambahan *road safety specialist*. Untuk *Design and Supervision Consultant* (DSC) sudah bertugas namun *team leader* mengajukan pengunduran diri, tindak lanjut untuk permasalahan ini sedang dibahas di internal penanggung jawab proyek.

Progres Pelaksanaan komponen 3 (pengembangan institusi penyelenggara jalan) masih dalam proses finalisasi TOR 4 paket oleh Subdit TLKJ-Dit BinteK Ditjen Bina Marga. Satu paket (*Disaster Risks Reduction*) masih membutuhkan persetujuan Bank Dunia, dengan nilai paket pekerjaan sebesar USD 1 juta. Permasalahan yang dihadapi adalah terdapat tiga paket pekerjaan yang belum ada pos pendanaannya, kebutuhan dana sebesar USD 0,67 juta. Terdapat isu untuk memanfaatkan dana dari komponen *unallocated*.

- **Proyek PNPM Perkotaan**

Proyek PNPM perkotaan yang masih aktif terdiri dari 2 *Loan* yaitu *Loan 7664-IND Additional Financing for The National Program for Community Empowerment in Urban Area* dan *Loan 8213-ID PNPM 2012-2015*. Pada Triwulan II TA 2014 penyerapan kumulatif untuk *Loan 7664-IND* telah mencapai 93,55% dengan nilai PV yang sangat baik yaitu 7,45. Untuk *Loan 8213-ID* penyerapan kumulatif mencapai 34,21% dari nilai pinjaman dengan PV sebesar -12,75. Pada triwulan ini tidak ditemui permasalahan terkait aspek keuangan proyek PNPM perkotaan.

Pada PNPM Urban 2012-2015 (*Loan 8213-ID*) hampir semua indikator *intermediate result* dapat dicapai melampaui target, kecuali indikator terkait pinjaman bergulir dan ketepatan waktu dalam pengisian MIS saat ini masih dibawah target. Sementara itu, capaian indikator PDO juga telah menunjukkan progres yang cukup baik meskipun sebagian besar belum mencapai target. Indikator PDO dengan capaian sangat baik adalah indikator yang terkait dengan penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat dengan target 90% namun dapat dicapai hingga 99%.

Pada *Loan 7664-IND additional financing PNPM Urban* hampir semua indikator PDO dapat dicapai dengan baik dan melampaui target, kecuali capaian untuk indikator terkait dana bergulir sangat rendah dibandingkan target yang ditetapkan.

- **Proyek *Third WSSLIC-PAMSIMAS dan PAMSIMAS II***

Hingga akhir Triwulan II belum ada realisasi dana untuk proyek *WSSLIC-PAMSIMAS* pada tahun 2014, namun penyerapan kumulatif telah mencapai 99,39%. Sementara itu, untuk *PAMSIMAS 2* pada triwulan ini terdapat realisasi dana sebesar USD 0,72 juta, sehingga penyerapan kumulatif menjadi USD 30,31 juta atau sebesar 30,34% dari nilai proyek. Rendahnya realisasi dana disebabkan oleh belum dapat dicairkannya BLM karena masih menunggu hasil *review*, selain itu dalam hal administrasi pencairan dana juga terkendala oleh sistem SPAN.

Pada Triwulan II TA 2014 belum ada *update* dokumen ISR sehingga capaian untuk indikator PDO maupun *intermediate result* masih sama dengan triwulan sebelumnya. Capaian pada triwulan sebelumnya (Maret 2014) menunjukkan progres yang cukup baik. Sebagian besar indikator PDO dan *intermediate result* hampir mencapai target akhir, bahkan 2 indikator *intermediate result* telah berhasil tercapai melampaui target yaitu i) *percent of districts with capacity building plan to support the adoption and mainstreaming of the PAMSIMAS approach and progress towards achieving its objectives* dengan target sebesar 80%, dan telah berhasil dicapai sebesar 100%; ii) *percent of District*

with project monitoring structure and tools (IMIS, M&E) provides regular information on project information quality dari target sebesar 90% telah berhasil dicapai sebesar 91,48%.

- **Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP)**

Penyerapan kumulatif proyek UWSSP hingga Triwulan II TA 2014 telah mencapai USD 20,42 juta atau sebesar 86,67% dari nilai proyek. *Progress variant* untuk proyek ini cukup baik yaitu -3,45, begitu juga dengan realisasi dana pada tahun ini telah mencapai 50% dari target (DIPA) yang ditetapkan. Terdapat permasalahan keterlambatan dalam pembayaran dana *Loan* di Bogor karena terjadinya pergantian Kepala Daerah (Walikota) selaku Pengguna Dana yang memerlukan waktu untuk pengenalan proyek, untuk itu akan dilakukan upaya percepatan sebagai langkah tindak lanjut.

Capaian untuk indikator PDO pada Triwulan II Tahun 2014 telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya. Namun, terdapat 1 indikator PDO yang capaiannya belum menunjukkan progres yaitu terkait *operating ratio* dengan target <1 , hanya Kota Bogor yang telah berhasil mencapai target tersebut sementara itu Kabupaten Kapuas dan Muara Enim belum mencapai target. Indikator PDO yang telah mencapai target adalah mengenai tingkat kepuasan masyarakat terkait standar kualitas air di 3 lokasi proyek telah mencapai target sebesar 100%.

Capaian untuk indikator *intermediate result* pada masing-masing lokasi cukup beragam. Di Kabupaten Muara Enim dan Kapuas Capaian untuk indikator *Number of individual meters replaced or repaired* telah menunjukkan kemajuan, sedangkan di Kota Bogor masih belum ada progres. Pada indikator *number of employees per 1.000 connection* di semua lokasi proyek telah tercapai melampaui target, begitu juga dengan capaian untuk indikator *non revenue water*. Capaian untuk indikator *incremental volume of water produced* juga sudah menunjukkan kemajuan di semua lokasi proyek, namun belum mencapai target akhir.

Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Kapuas tidak mengalami kendala yang signifikan pada triwulan ini, namun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Muara Enim dan Kota Bogor. Di Kabupaten Muara Enim, progres paket BWSC1.8 *Uprating* IPA Cikareteg mengalami keterlambatan karena terjadinya longsor banjir di lokasi *intake*, oleh karena itu diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar tidak melampaui batas waktu kontrak. Di Kota Bogor, paket MWSC 1.1 mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena sulitnya proses perijinan dari PT. KAI dalam pemasangan pipa yang melintas rel kereta api serta penyambungan listrik PLN pada gardu *intake*. Sementara itu pada paket MWSC 1.2 juga mengalami keterlambatan penyelesaian karena pergantian *project manager*, longsor di beberapa lokasi pekerjaan, proses perijinan untuk pemasangan pipa air baku yang melintasi jalan nasional serta keterlambatan dalam penambahan daya listrik dari PLN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan berbagai percepatan dan koordinasi yang lebih intensif dengan *stakeholder* terkait.

- **Kementerian Dalam Negeri**

- **PNPM Perdesaan**

Proyek PNPM Perdesaan IV telah berakhir masa berlakunya pada triwulan ini dengan penyerapan kumulatif sebesar 98,83%, penanggung jawab proyek diharapkan dapat segera menyusun laporan akhir pelaksanaan proyek yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, pembelajaran selama masa perencanaan maupun pelaksanaan serta upaya untuk menjaga keberlanjutan hasil-hasil proyek tersebut.

Proyek PNPM Perdesaan 2012-2015 terdiri dari 2 bagian berdasarkan mekanisme penyaluran dana pinjamannya yaitu komponen pinjaman proyek sebesar USD 450 juta dan komponen *refinancing* sebesar USD 200 juta. Dana dari komponen pinjaman proyek digunakan untuk membiayai kategori *consultant services* (kategori 2 dan 3) sedangkan dana dari komponen *refinancing* digunakan untuk membiayai kategori 1 *kecamatan grants* (Bantuan Langsung Masyarakat/ BLM). Realisasi komponen *refinancing* pada triwulan ini telah mencapai USD 199,98 juta atau setara dengan 99,99% dari total nilai komponen *refinancing*. Sementara itu, realisasi untuk komponen pinjaman proyek secara kumulatif sampai triwulan ini baru mencapai 23% dari total nilai pinjaman proyek, dan penyerapan pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2014 baru mencapai USD 31,28 juta atau setara dengan 22,93 % dari target tahun ini.

Untuk proyek PNPM Rural IV belum ada *update* ISR sejak bulan Desember 2013, karena proyek telah berakhir masa berlakunya perlu dipastikan mengenai capaian seluruh indikator keberhasilan proyek. Sementara itu, capaian ISR terbaru untuk proyek PNPM Rural 2012-2015 menunjukkan bahwa beberapa indikator PDO telah mencapai target, namun beberapa indikator lainnya membutuhkan *study/survey* khusus untuk pengukuran capaiannya. Capaian untuk indikator *intermediate result* juga sudah menunjukkan kemajuan, beberapa indikator telah tercapai melampaui target, tetapi indikator terkait pendanaan proposal bisnis, koordinasi dengan program PNPM Perdesaan lainnya dan pembentukan tim *oversight* belum menunjukkan progres yang signifikan.

- **PT. PLN**

- ***Power Transmission Development Project (PTD I) dan Scattered Transmission and Substation in Indonesia (Phase II)/IPTD II***

Pada Triwulan II TA 2014 proyek PTD I telah menunjukkan kemajuan dalam realisasi dana, terdapat tambahan realisasi pada triwulan ini sebesar USD 21,85 juta atau sebesar 57,08% dari target (DIPA) tahun 2014. Meskipun demikian, nilai *progress variant* masih lebih rendah dari -30 artinya proyek masih mengalami keterlambatan yang cukup serius. Penanggung jawab proyek menyampaikan bahwa anggaran yang ditetapkan tahun ini akan terserap bahkan diperkirakan akan dilakukan percepatan penarikan. Diperkirakan akan ada sisa dana sebesar USD 80 juta yang pemanfaatannya membutuhkan tambahan waktu selama 2 tahun, usulan pemanfaatan dana tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada pemerintah. Untuk proyek IPTD II belum ada penyerapan karena belum dialokasikan anggaran pada triwulan ini.

Pada proyek PTD I dan IPTD II belum menunjukkan kemajuan dalam pencapaian indikator *intermediate result*. IPTD II merupakan proyek baru efektif saat ini masih dalam tahap pelelangan sehingga tahun ini tidak dialokasikan anggaran. Pada proyek PTD I terdapat pekerjaan tambahan untuk paket J2, saat ini sedang dalam proses pengajuan amandemen kontrak. Sementara itu, pada paket J3 material belum dapat dipasang karena proses administrasi yang belum selesai. Pada paket J3 juga diperkirakan akan diperlukan amandemen kontrak karena metode-metode baru yang diterapkan oleh kontraktor sehingga menimbulkan pekerjaan tambahan.

- ***Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power***

Realisasi dana untuk proyek ini pada Triwulan II masih belum signifikan yaitu hanya sebesar USD 0,48 juta, dengan demikian penyerapan kumulatif proyek adalah USD 3,97 juta atau hanya sebesar 0,62% dari nilai proyek, sehingga *progress variant* mencapai -34,23.

Capaian untuk indikator PDO dan *intermediate result* proyek ini pada bulan Juni 2014 belum menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya (Oktober 2013). Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini adalah proses pembebasan lahan membutuhkan waktu yang sangat lama. Di Kabupaten Bandung Barat, penetapan lokasi kegiatan telah diterbitkan pada Oktober 2012 dengan masa berlaku 2 tahun, dan akan habis masa berlakunya pada bulan Oktober 2014 sementara lahan yang sudah selesai dibebaskan baru mencapai 60 Ha (26%) sisanya seluas 173 Ha diperkirakan akan dapat diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Pelaksana proyek perlu memastikan bahwa proses pembebasan lahan yang tersisa tersebut sesuai dengan waktu yang diperkirakan karena apabila melewati masa berlaku izin lokasi maka pengajuan ijin lokasi harus diulang dari awal dengan peraturan yang baru.

Selain permasalahan lahan, penanggung jawab proyek memperkirakan telah terjadi perubahan biaya dari perkiraan di awal, sehingga diperlukan *additional financing* sebesar USD 150 juta – USD 200 juta. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan ini, penanggung jawab proyek perlu menyusun rencana detail pelaksanaan dan penyerapan dana proyek hingga 2018. Mengenai kebutuhan tambahan dana diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan penanggung jawab proyek.

• **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- ***Health Professional Education Quality Project (HPEQ)***

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 penyerapan kumulatif untuk proyek HPEQ telah mencapai 80,04% dari nilai proyek, dengan *progress variant* sebesar -10. Persentase penyerapan pada tahun ini dibandingkan dengan target yang ditetapkan sudah menunjukkan kemajuan yaitu sebesar 19,30%.

Pada Triwulan II TA 2014 belum terdapat update terbaru untuk capaian indikator PDO maupun *intermediate result*, sehingga capaian untuk triwulan ini masih sama dengan triwulan sebelumnya. Pada awal tahun 2014, Kemdikbud telah menyampaikan surat ke Bappenas dan Kementerian Keuangan mengusulkan perubahan indikator utama berkaitan dengan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-

PTKes) dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes). Namun pada akhir Juli 2014, Kemdikbud telah menyampaikan bahwa LAM-PTKes dan LPUK-Nakes telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemkumham dan telah menjalankan fungsi akreditasi dan uji kompetensi.

Pengesahan badan hukum pada awal tahun 2014 tersebut mengakibatkan adanya kebutuhan akselerasi berupa tambahan program LAM-PTKES dan LPUK, termasuk tambahan program di komponen 2 dan penanganan *retaker* uji (uji kompetensi ulang). Oleh karena itu, penanggung jawab kegiatan telah segera mengajukan usulan realokasi untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Pemerintah telah menyampaikan usulan ini ke Bank Dunia pada awal September 2014.

- **Bappenas**

- *Scholarships Program for Strengthening Reforming Institutions*

Realisasi dana untuk proyek SPIRIT tahun 2014 tergolong rendah karena terkendala oleh sistem SPAN sehingga SP2D tidak dapat dibebankan ke rekening khusus. Penyerapan kumulatif hingga saat ini baru mencapai 31,68% dari nilai pinjaman sehingga *progress variant* menjadi -17,42, dan penyerapan tahun 2014 baru mencapai 28,5% dari target (DIPA) yang ditetapkan.

Capaian indikator *intermediate result* dan PDO untuk proyek SPIRIT masih sama dengan triwulan sebelumnya karena belum ada dokumen ISR terbaru. Saat ini sedang dilakukan proses Pengadaan untuk *Project Management Consultant*, *IT Consultant* dan *Assisten Financial Management Consultant*, namun konsultan-konsultan tersebut belum dapat memulai pekerjaan karena anggaran dalam DIPA saat ini tidak mencukupi. Untuk itu, penanggung jawab proyek akan segera mengusulkan revisi DIPA untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.

- **Kementerian Keuangan**

- *Government Financial Management & Rev. Adm. Project (GFMRAP) dan Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR)*

Pada Triwulan II TA 2014 *progress variant* untuk proyek PINTAR dan GFMRAP masing-masing telah mencapai -76,01 dan -30,61. Untuk proyek PINTAR sampai dengan saat ini belum menyampaikan usulan resmi untuk pembatalan proyek, sedangkan untuk proyek GFMRAP telah mengalami perbaikan kinerja penyerapan dana dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun nilai *progress variant* masih cukup tinggi.

Pencapaian PDO dan *intermediate result* proyek GFMRAP pada ISR terakhir (Juni 2014) belum menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan ISR periode sebelumnya (Desember 2013). Permasalahan yang dihadapi pada triwulan ini untuk SPAN adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor, untuk itu penanggung jawab kegiatan menilai perlu dilakukan amandemen kontrak dan terdapat kebutuhan penambahan dana untuk pembiayaan *reccurent cost*. Kebutuhan penambahan dana ini akan dilakukan dengan rupiah murni.

- **Badan Pusat Statistik (BPS)**

- *Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic (Statcap-Cerdas)*

Kegiatan Statcap-Cerdas baru di restrukturisasi pada awal tahun 2014. Dengan adanya perubahan-perubahan proyek Statcap-Cerdas, pelaksana kegiatan sedang dalam proses pengadaan sesuai dengan struktur proyek yang baru. Sampai dengan Triwulan II TA 2014 belum ada realisasi atau penyerapan dana pinjaman untuk proyek ini, sehingga *progress variant* mencapai angka -55,6, artinya proyek mengalami keterlambatan yang sangat serius. Pada akhir Triwulan II permintaan untuk *initial deposit* sudah dikirimkan kepada Bank Dunia, diharapkan dapat disetujui dalam waktu dekat. Selain itu, proses pengadaan juga sudah dimulai dan untuk pengadaan *Project Management Unit (PMU) support* saat ini sedang dalam proses *review*, diperkirakan persetujuan dari Bank Dunia akan diterbitkan pada bulan Juli 2014. Dengan demikian pada tahun ini kinerja penyerapan dana proyek akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Proyek Statcap-Cerdas baru direstrukturisasi pada akhir tahun 2013. Dengan demikian belum ada progres pencapaian indikator PDO dan *intermediate result*. Meskipun demikian, pada tahun ini diperkirakan kinerja pelaksanaan proyek akan meningkat cukup signifikan, hal ini dibuktikan dengan penguatan *Project Management Unit* yang saat ini berada di bawah Biro Bina Program, selain itu proses pengadaan pada beberapa paket pekerjaan juga sudah mulai berjalan dengan baik.

- **PT. SMI dan PT. PII**

- *Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)*

Kinerja penyerapan proyek IIF sampai dengan triwulan ini telah menunjukkan progres yang sangat baik. Dari target penyerapan sebesar USD 28 juta untuk tahun 2014, pada triwulan ini telah terealisasi sebesar USD 20 juta sehingga penyerapan kumulatif proyek ini telah mencapai 92% dari total nilai proyek. Sementara itu, untuk proyek IIGF belum ada progres penyerapan dana (proyek baru).

Pada Triwulan II TA 2014 belum ada dokumen ISR terbaru sehingga capaian untuk indikator PDO dan *Intermediate result* masih sama dengan triwulan sebelumnya, sementara itu untuk proyek IIGF telah terdapat capaian yang cukup signifikan pada indikator *intermediate result* dan beberapa indikator PDO juga sudah menunjukkan kemajuan capaian.

Pada tanggal 26 Maret 2014, PT. IIF sebagai *executing agency* proyek IIF telah mengusulkan perubahan *Project Development Objective (PDO)* dan pengaturan syarat-syarat *Environmental and Social Safeguards Framework (ESFF)* untuk lebih menyesuaikan pelaksanaan proyek dengan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi PT. IIF sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Penanggung jawab proyek telah melakukan diskusi dengan pihak Bank Dunia mengenai pencapaian target dari PDO, dan sudah didapatkan figur capaiannya. Namun, ada saran dari Bank Dunia mengenai usulan perubahan PDO untuk

digabungkan dengan usulan tambahan pendanaan baru terkait dengan perubahan PDO tersebut. Pemerintah Indonesia menyarankan agar proses perubahan PDO diselesaikan terlebih dahulu tanpa usulan pendanaan baru.

- **Kementerian Pertanian**

- *Sustainable Agricultural Research and Technology (SMART-D)*

Penyerapan kumulatif proyek SMART-D sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 mencapai USD 13,1 juta atau 16,38% dari nilai proyek dan nilai *progress variant* mencapai -18,56. Target penyerapan untuk tahun ini cukup besar namun, sampai dengan Triwulan II baru terserap sebesar 34,75%. Permasalahan revisi DIPA yang terjadi pada triwulan sebelumnya saat ini telah berhasil diselesaikan.

Capaian untuk indikator PDO dan *Intermediate result* proyek SMART-D triwulan ini masih sama dengan triwulan sebelumnya karena belum terdapat *update* untuk dokumen ISR. Capaian pada sebelumnya adalah beberapa indikator PDO maupun *intermediate result* capaiannya telah mendekati target, namun masih terdapat sebagian kecil indikator yang belum ada progres capaian, misalnya indikator PDO *Clients who have adopted an improved agricultural technology promoted by the project*, dan indikator *intermediate result*: i) *Accredited Experimental Stations*, ii) *accredited laboratories* dan iii) *Collaborative research or extension subprojects-completed (number)*.

Terdapat permasalahan yang menghambat proses pengadaan barang dan jasa pada proyek ini yaitu ketidaksesuaian antara mekanisme pengadaan pemerintah dan mekanisme pengadaan Bank Dunia, untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut akan diadakan pertemuan antara Badan Litbang Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan Bank Dunia.

- **Kementerian Riset dan Teknologi**

- *Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)*

Penyerapan kumulatif untuk proyek Riset-Pro sampai dengan triwulan ini telah mencapai USD 0,06 juta atau 0,06% dari nilai proyek, penyerapan masih rendah diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian AWP pada triwulan sebelumnya.

Pada Triwulan II TA 2014 belum terdapat *update* dokumen ISR sehingga capaian indikator PDO dan *intermediate result* masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 1 indikator PDO telah tercapai melampaui target dan 2 indikator *intermediate result* juga telah mencapai target yang ditetapkan. Tidak ditemui permasalahan yang menghambat pelaksanaan proyek pada triwulan ini.

- **PT. Pertamina**

- *Geothermal Clean Energy Investment Project*

Sampai dengan Triwulan II TA 2014 belum ada realisasi dana untuk proyek ini sehingga *progress variant* mencapai -72,71, artinya proyek mengalami keterlambatan yang sangat serius. Rencana penarikan dana untuk tahun ini adalah sebesar USD 22,69 juta dengan alokasi terbesar untuk *advance payment* kontrak Ulubelu dan pekerjaan konstruksi yang diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

Pencapaian indikator PDO pada triwulan ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, sementara itu untuk *intermediate result* beberapa indikator sudah tercapai yaitu i) *Yearly agreement reached between PGE and Partner on support program*; ii) *Bid documents including FEED issued for one geothermal plant; Studies issued for new developments/investments* dan iii) *IT software purchased, installed, and being utilized by PGE staff*. Sementara itu, indikator terkait *training* dan *workshop* belum menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Untuk komponen *engineering, procurement and construction* (EPC) Ulubelu paket 3 dan 4 sudah dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 8 Agustus 2014. Permintaan pencairan dana untuk *advance payment* juga sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, diharapkan dapat dicairkan dalam waktu maksimal 45 hari dari tanggal tanda tangan kontrak. Sementara itu, pelaksanaan lelang untuk komponen EPC Lahendong paket 5 dan 6 memasuki tahap evaluasi di PT. PLN. Pada tanggal 8 September hasil evaluasi akan disampaikan kepada Direksi PT. PLN untuk memperoleh persetujuan, kemudian akan disampaikan kepada Bank Dunia. Diperkirakan pada tanggal 9 Oktober akan diperoleh *No Objection Letter* (NOL) dari Bank Dunia.

Bappenas telah menerima surat usulan perpanjangan masa laku kegiatan dari yang semula berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 menjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, saat ini sedang dalam proses di internal Bappenas untuk kemudian disampaikan menjadi rekomendasi kepada Kementerian Keuangan.

Box 1: Kunjungan Lapangan

Loan Bank Dunia: PNPM Mandiri Perkotaan

Executing Agency: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Tujuan kunjungan lapangan:

Melihat perkembangan proyek *Additional Financing for The National Program for Community Empowerment in Urban Area* dari pinjaman Bank Dunia.

Hasil kunjungan Lapangan:

1. PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

- Sejak tahun 2007, pemilu di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Langgeng Joyo sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan masa bakti 3 tahun setiap periode. BKM Langgeng Joyo dengan jumlah anggota saat ini sebanyak 9 orang menjadi pelaksana 5 kegiatan. Meskipun kondisi ini cukup menyulitkan BKM karena kebijakan, proses administrasi, dan pencatatan keuangan yang berbeda-beda namun hal ini sesuai dengan tujuan awal pembentukan BKM yaitu sebagai suatu wadah kelembagaan masyarakat yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tingkat masyarakat.
- Kegiatan yang dilaksanakan tahun ini diantaranya adalah pembangunan infrastruktur dan kegiatan pinjaman bergulir. Kegiatan infrastruktur berupa pembangunan tower air dan rehab rumah untuk warga miskin. Untuk kegiatan pinjaman bergulir mengalami berbagai kendala sehingga tingkat pengembalian dana dari masyarakat cukup rendah. BKM bersama dengan Pemerintah Kelurahan Kandri terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kinerja kegiatan pinjaman bergulir tersebut, salah satunya dengan pembinaan yang intensif pada KSM agar dapat meningkatkan produktivitas usaha dan dapat mengakses pasar yang lebih luas. Usaha yang saat ini dilakukan KSM antara lain batik tulis dan makanan ringan.



Gambar 1. Tower Air (kiri), Diskusi dengan Masyarakat (tengah) dan Produk Batik Tulis (kanan)

2. PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

- BKM Sari Usaha yang telah dibentuk sejak tahun 2007 di Kelurahan Tegalsari saat ini mengelola berbagai kegiatan berupa kegiatan infrastruktur maupun kegiatan sosial ekonomi. Kegiatan infrastruktur yang dilakukan pada tahun ini adalah perbaikan jalan dan rehab rumah untuk penduduk miskin..
- Kegiatan sosial ekonomi yang dilaksanakan di Kelurahan Tegalsari terbilang cukup berhasil dibandingkan dengan daerah lain. Salah satunya adalah kegiatan pinjaman bergulir yang tingkat pengembalian dananya mencapai 98,4% dari total dana yang saat ini mencapai Rp 423 juta. Kegiatan lainnya yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu pendirian Rumah Pintar (RumPin) karena di desa ini belum terjangkau layanan PAUD. Namun, RumPin tersebut belum terkoneksi dengan layanan PAUD pemerintah sehingga diharapkan kedepan dapat dikoneksikan agar kualitas RumPin dapat meningkat sesuai dengan standar pelayanan PAUD nasional.

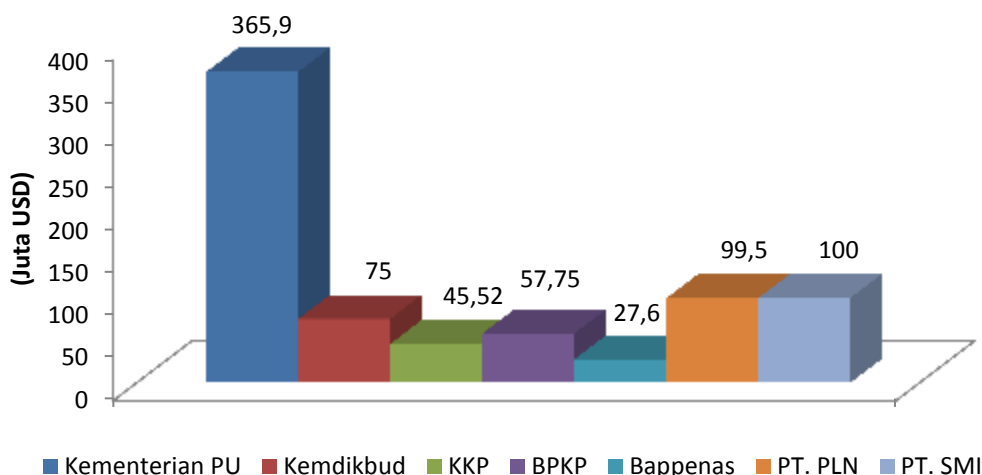


Gambar 2. Rumah Pintar Kenanga (kiri) dan Perbaikan Jalan (kanan)

ADB

Pada Triwulan II TA 2014, terdapat 11 kegiatan yang dibiayai oleh *Asian Development Bank* (ADB) dengan total nilai pinjaman sebesar USD 771,27 juta. Dari sejumlah kegiatan tersebut, terdapat 4 (empat) proyek yang mengajukan usulan perpanjangan *Loan*, dan yang telah mendapatkan persetujuan untuk usulan perpanjangan tersebut adalah kegiatan *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program* (ICWRMIP) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum diperpanjang sampai dengan 31 Mei 2016 baik untuk *Loan* nomor 2500-INO maupun 2501-INO (SF). Sedangkan untuk tiga kegiatan lainnya masih dalam proses pengusulan, yaitu *Infrastructure Reform Structure Development* (IRSDP), di mana Kementerian PPN/Bappenas sebagai *executing agency*, *Regional Road Development* (RRDP) yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum, serta *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* yang dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara, Persero. Untuk kegiatan IRSDP yang seharusnya berakhir pada 30 Agustus 2014, mengajukan usulan perpanjangan *Loan* selama 16 bulan (31 Desember 2015), namun untuk usulan ini masih dalam proses baik dipihak Pemerintah maupun ADB. Untuk kegiatan RRDP, yang akan berakhir di tanggal 30 Agustus 2016, dengan mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan yang dihadapi di lapangan, maka merencanakan untuk mengajukan usulan perpanjangan *Loan* selama 12 bulan (sampai tahun 2017). Selain itu, pada Triwulan II TA 2014 ini ada kegiatan yang baru efektif, yaitu *Strengthening West Kalimantan Power Grid Project* dengan nomor *Loan* 3015-INO yang dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara, Persero. Kegiatan tersebut menggunakan dana dari ADB sebesar USD 49,5 juta.

Berdasarkan instansi pelaksana, kesebelas kegiatan tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



Gambar 2.2 Jumlah Pinjaman Proyek ADB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Jumlah pinjaman terbesar dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total nilai mencapai USD 365,9 juta yang terdiri dari 4 proyek. Sedangkan jumlah pinjaman paling rendah dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan total nilai pinjaman USD 27,6 juta yang terdiri dari 1 proyek.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman ADB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab, Triwulan II TA 2014

(juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		8	571,77	172,59	30,19	399,18	125,20	17,93	14,32
1	Kemen PU	4	365,90	147,31	40,26	218,59	81,16	15,01	18,49
2	Kemendikbud	1	75,00	6,03	8,04	68,97	24,01	0,43	1,80
3	Kemen KP	1	45,52	1,00	2,20	44,52	1,97	1,00	50,72
4	BPKP	1	57,75	3,32	5,75	54,43	13,63	1,41	10,36
5	Bappenas	1	27,60	14,93	54,11	12,67	4,43	0,08	1,76
Diteruspinjamkan (SLA)		3	199,50	86,49	43,35	113,01	30,52	4,47	14,65
6	PT PLN	2	99,50	15,36	15,44	84,14	25,12	4,47	17,78
7	PT SMI	1	100,00	94,60	94,60	5,40	5,40	0,00	0,00
Total		11	771,27	282,56	36,64	488,71	155,73	22,39	14,38

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Juni tahun 2014 mencapai USD 282,56 juta atau 36,64% dari total nilai pinjaman kegiatan. Namun, penyerapan sampai Triwulan II TA 2014 hanya mencapai 14,38% dari target penyerapan dana pinjaman.

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

Pada umumnya, kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADB tidak mengalami hambatan secara serius walaupun banyak yang memerlukan perpanjangan *Loan*. Perpanjangan tersebut diperlukan karena adanya keterlambatan dalam proses dokumen (administrasi). Beberapa pengelola proyek pun belum bisa beradaptasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang baru sehingga menyebabkan keterlambatan proses.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- ***Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)***

Proyek ICWRMIP ini merupakan proyek yang seharusnya sudah selesai pada 30 Juni 2014. Namun, proyek ini mengajukan perpanjangan sampai dengan 31 Mei 2016. Perpanjangan *Loan* ini sudah disetujui oleh ADB pada 18 Juni 2014 dan amandemennya mulai efektif pada 8 Juli 2014. Pada dasarnya untuk *Loan* 2501-INO (SF), komponen program di beberapa kementerian, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian telah selesai sepenuhnya. Namun komponen program di Kementerian Lingkungan Hidup belum selesai. Kementerian Lingkungan hidup baru menyelesaikan *procurement* dan mengajukan rencana penandatanganan kontrak kepada konsultan. Paket 1 konstruksi sudah berjalan dan paket 2 sedang menunggu revisi DIPA yang sudah diajukan ke Kementerian Keuangan. Sampai dengan 31 Mei 2015, pengerjaan proyek ICWRMIP terfokus kepada pengerjaan *civil works* di dua paket dengan

menggunakan strategi parsial. Proyek ini juga mengajukan *Loan saving* sebesar USD 11 juta dan realokasinya sudah disetujui.

Untuk kegiatan ICWMRIP ini, memiliki deviasi yang cukup besar khususnya untuk *Loan* 2500-INO terkait dengan pembebasan lahan yang berakibat pada kegiatan konstruksi belum bisa dilakukan, karena proses pemindahan penduduk belum selesai dilaksanakan. Selain itu, kegiatan ini juga mengalami kendala dalam hal amandemen kontrak dengan dana yang membengkak. Namun, apabila akan melakukan *re-tender* maka akan memakan waktu yang lama, sehingga proses ini tidak disarankan untuk dilaksanakan.

- ***Regional Road Development (RRDP)***

Proyek RRDP merupakan proyek *co-financing* antara ADB dan *Islamic Development Bank*. Dari delapan paket proyek, terdapat dua paket proyek yang didanai oleh ADB. Salah satu paket proyek tersebut memerlukan *re-tender* dan dokumennya sudah dikirimkan ke ADB pada tanggal 21 Juli 2014, sedangkan satu paket proyek lainnya telah tujuh kali diperpanjang. Konsultan untuk wilayah Kalimantan dan Jawa sudah direkrut dari tahun kemarin. Kementerian Perhubungan sudah menyampaikan TOR kepada ADB dan ADB sudah mengembalikannya disertai respon namun belum ada respon lagi dari Kementerian Perhubungan.

Untuk kegiatan RRDP, penyerapan yang dapat dicapai sampai dengan tahun pelaksanaan kedua (Triwulan II) masih relatif kecil, yaitu sebesar 0,76%. Sebagai upaya penyelesaian kegiatan yang masih belum tercapai, pihak pelaksana kegiatan mengajukan usulan perpanjangan *Loan*. Hal ini disampaikan lebih awal untukantisipasi proses pelaksanaan usulan perpanjangan yang memerlukan waktu, baik di pihak pemerintah maupun di pihak mitra pembangunan. Pihak ADB telah menyarankan untuk perpanjangan *Loan* ini, dengan memepertimbangkan proses pelaksanaan yang dihadapi di lapangan dapat mengakibatkan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, yaitu adanya isu mengenai proses pembebasan lahan untuk tiga paket kontrak di Kalimantan Barat dan di Jawa Timur. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perhitungan biaya pembebasan lahan antara ADB dan pemerintah daerah. Hal lain yang semula menjadi kendala di triwulan sebelumnya, yaitu mengenai format *full e-procurement*, bukan merupakan suatu isu permasalahan lagi, karena sudah dapat disetujui pihak ADB untuk penggunaan sistem *full e-procurement*. Namun demikian, terkait dengan proses pengadaan ini, perlu dilakukan percepatan penyerapan, karena bukan menjadi isu/permasalahan lagi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

- ***Metropolitan Sanitation Management Health (MSMHP)***

MSMHP memiliki 2 daerah pelaksanaan, yaitu Yogyakarta dan Medan. Di Yogyakarta, terdapat dua paket, yaitu paket *Sewerage System Yogyakarta Phase 3* yang telah terselesaikan 100% dan paket *Sewerage System Yogyakarta Phase 2* yang baru terlaksana 89,74%. Paket *Sewerage System Yogyakarta Phase 2* diperkirakan akan mengalami keterlambatan selama satu bulan. Di Medan, terdapat lima paket, yaitu paket *Sewerage System Medan - Optimization*, paket *Sewerage System Medan - Expansion (Zone 9)*, paket

Sewerage System Medan - Expansion (Zone 10), paket *Sewerage System Medan - Expansion (Zone 11)*, dan paket *Sewerage System Medan - Expansion (Zone 12)*. Paket proyek di Medan tersebut terlambat dan belum mengantongi Izin Membangun Bangunan (IMB) karena belum memiliki dokumen AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup.

Keterlambatan lima paket proyek di Medan disebabkan belum tersedianya dokumen AMDAL sehingga Izin Membangun Bangunan (IMB) belum bisa dikeluarkan. Keterlambatan jadwal pada paket 2 akan memengaruhi *closing Loan* yang akan berakhir pada Juni 2015. Paket 3, 4, dan 5 juga mengalami keterlambatan karena izin dari Bina Marga baru keluar 8 bulan setelah kontrak sehingga pelaksanaan galian untuk proyek terlambat dimulai. Selain itu, kondisi tanah yang berpasir juga menyulitkan pelaksanaan teknis proyek. Kendala juga terjadi di pihak PDAM karena PDAM hanya memiliki 150 juta dari 600 juta yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mencoba untuk mengalokasikan dana untuk menutup kebutuhan biaya dan dana tersebut diperkirakan dapat dilakukan di bulan September 2014. Selain itu, untuk pelaksanaan lelang mengalami hambatan terkait dengan ketentuan yang mewajibkan penggunaan *full e-procurement*. Sehubungan dengan beberapa isu/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, pihak pelaksana kegiatan akan mengusulkan perpanjangan *Loan*. Terkait dengan usulan ini, akan ditindaklanjuti dalam pertemuan untuk pembahasan usulan perpanjangan dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

- ***Proyek Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM-II (USRI)***

Kegiatan ini mengalami keterlambatan proses penyusunan *Withdrawal Application* (WA) untuk *replenishment* karena adanya aplikasi baru Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Keterlambatan tersebut berpotensi untuk mengurangi jumlah dana di rekening khusus. Oleh karena itu, pengelola kegiatan ini mengajukan pengisian rekening khusus untuk *additional* deposit sebesar kurang lebih USD 10 juta. Selain itu, pengelola kegiatan ini juga mengkoordinasikan ke daerah supaya melakukan percepatan pengiriman dokumen SP2D dan SPM ke pusat agar dapat segera menyusun *Withdrawal Application*. Selain itu, kegiatan ini telah melakukan realokasi anggaran karena kegiatan ini diperkirakan akan memiliki sisa dana pada akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar USD 12,12 juta yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pengajuan realokasi anggaran ini dilakukan pada tanggal 3 Maret 2014 dan mulai efektif pada tanggal 9 Juni 2014. Sisa dana tersebut akan digunakan untuk optimalisasi penanganan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di 500 desa tambahan di wilayah *Rural Infrastructure* dengan 1 siklus (sebesar USD 11.320.000) dan addendum konsultan (sebesar USD 796.183).

• **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- ***Polytechnic Education Development (PEDP)***

Kegiatan *Polytechnic Education Development* ini sedang berada dalam proses lelang (*bidding*) di paket-paket kontraknya. Beberapa paket proyek mengalami *first re-bidding*. Salah satu komponen dari kegiatan ini (yaitu sebesar 70%) dialokasikan untuk pengadaan barang di politeknik penerima, dalam rangka memperkuat laboratorium penelitian sebagai *Center of Excellence* di politeknik. Isu/permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaannya adalah terkait dengan lambatnya proses pengadaan karena *template* pengadaan tidak sesuai dengan format yang disepakati oleh ADB. Oleh karena itu, pengelola kegiatan ini mengadakan *workshop* dan pendampingan dalam penyusunan dokumen pengadaan. Selain itu, proyek ini juga mengalami kendala dari pengajuan NOL ke ADB yang disebabkan keterlambatan pengajuan dokumen dari pihak politeknik itu sendiri, yaitu adanya ketidakkonsistenan mengenai *honor estimation* di dalam *bidding document*.

Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian isu/permasalahan tersebut di atas, telah dilakukan *coaching clinic* mengenai pelaksanaan proyek kepada seluruh perwakilan politeknik terkait. Kegiatan *coaching clinic* ini dinilai berhasil karena dapat mempertemukan tiga pihak sekaligus, yaitu *Project Management Unit* (PMU), Mitra Pembangunan (ADB), dan politeknik sebagai upaya dalam percepatan pelaksanaan kegiatan.

Melalui *coaching clinic*, telah ada perkembangan dengan adanya persetujuan *Submission 1* dan menuju proses *bidding*, sehingga akan dilanjutkan ke *Submission 2*.

Hal lain, yang diindikasikan dapat berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- Belum siapnya infrastruktur, sehingga beberapa politeknik harus menunda pengadaan barang, misalnya untuk pembangunan laboratorium minyak kelapa sawit yang belum terselesaikan, sehingga pengerjaannya ditunda ketahun berikutnya;
- Pemberian uang muka yang tidak memadai, yang berakibat pada masalah pembiayaan pelaksanaan kegiatan;
- Pengadaan konsultan melalui paket (*firm*), tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Sehingga diusulkan untuk dapat dilakukan melalui penyediaan *expert* sebagai *resource person* dalam pelaksanaan *workshop*;
- Proses registrasi dalam sistem DIPA, dan untuk hal ini telah dilakukan disampaikan melalui surat yang ditujukan ke Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Terkait dengan kinerja politeknik swasta, untuk pelaksanaannya telah diupayakan melalui model bantuan sosial, namun saat ini masih dalam proses pembahasan dengan ADB.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)**

- ***Coral Reef Rehabilitation and Managemet Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)***

Kegiatan COREMAP-CTI pembiayaannya dilakukan melalui *co-financing* antara ADB dan *World Bank*, dan baru efektif mulai 5 Februari 2014 dengan total pinjaman ADB sebesar USD 47,38 juta dan hibah sebesar USD 10 juta. Sampai saat ini, untuk pelaksanaan kegiatan COREMAP-CTI baru memproses pembukaan rekening khusus, dan untuk rencana penarikan di tahun 2014 sebesar USD 1,63 juta.

Untuk perkembangan pelaksanaan kegiatan, sudah ada kegiatan yang pada minggu terakhir bulan Juli 2014, juga telah ada NOL untuk *procurement plan*. Sedangkan untuk pelaksanaan *training* telah mulai dilakukan dilaksanakan di tahun 2014 sesuai dengan

work plan yang sudah di-*review* bersama antara Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

- ***State Accountabilty Revitalization (STAR)***

Sampai dengan Triwulan II TA 2014, proyek ini telah menyerap dana sekitar USD 1,41 juta, yaitu 10,36% dari seluruh total pinjaman TA 2014. Dalam pelaksanaan dilapangan, untuk kegiatan STAR ini terdapat beberapa potensi yang dapat berakibat pada kinerja pelaksanaan kegiatan, yaitu terkait dengan persyaratan perguruan tinggi yang harus mempunyai akreditasi A untuk jenjang S1 dan akreditasi B untuk jenjang S2, yang akan mempengaruhi diakui atau tidaknya kelulusan mahasiswa di pemerintah daerah tempat mereka mengabdikan. Sampai saat ini, belum ada tim konsultan yang membantu pelaksanaan kegiatan.

Hal lain yang dapat diusulkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya tambahan dana pendukung dari sumber rupiah murni, untuk kegiatan pendukung. Terhadap beberapa isu/permasalahan tersebut, perlu diadakan pembahasan lebih lanjut untuk upaya peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan.

- **Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

- ***Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)***

Kegiatan IRSDP akan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2014, dan saat ini dalam proses pengusulan perpanjangan *Loan*. Namun demikian untuk usulan perpanjangan ini perlu ada target pencapaian kinerja sesuai dengan kesepakatan dengan ADB, yaitu sebelum berakhirnya kegiatan ini diharapkan terdapat dua kegiatan yang terkontrak. Untuk hal ini telah diupayakan untuk kegiatan pengelolaan sampah di kota Bandung dan jalur kereta batu bara di Kalimantan Tengah.

Isu/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di Bandung yaitu terkait dengan adanya pergantian kepala daerah dan adanya permintaan untuk peninjauan kembali atas rencana kegiatan yang diharapkan 50% dari saham tersebut dapat menjadi milik Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan di Kalimantan terkendala masalah *termination guarantee* yang melebihi 2 tahun, yang perlu dinegosiasi ulang agar di akhir tahun 2014, kontrak ditandatangani.

Terkait dengan definisi transaksi, apakah kontrak kegiatan atau hanya sampai dengan *request for proposal*, pihak ADB menyampaikan bahwa keberhasilan transaksi diukur dari *prepared projects, put up on bidding*, dan *announcement of bidding*. Terkait dengan usulan perpanjangan *Loan* yang diajukan selama 16 bulan, dengan mempertimbangkan target kinerja yang akan dicapai, maka diusulkan antara 6 – 10 bulan untuk penyelesaian kegiatan *on-going* saja. Sedangkan untuk 5 (lima) usulan kegiatan baru disarankan tidak termasuk dalam usulan perpanjangan *Loan*, karena dikhawatirkan tidak akan mencapai target yang diharapkan pada saat *Loan* berakhir. Sebagai tindak lanjut dalam proses usulan perpanjangan ini, perlu diadakan pembahasan lebih lanjut antara ADB dan pelaksana kegiatan IRSDP, khususnya terkait dengan lima usulan baru.

- **PT. PLN**

- ***Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement***

Kegiatan ini bertujuan untuk efisiensi energi utama sebagai pilihan perencanaan strategis untuk mengurangi biaya keseluruhan operasi bisnis distribusi PLN dan pelanggan serta memberikan kualitas listrik yang baik (fluktuasi tegangan kurang dan peningkatan harmonik) dan dapat diandalkan (durasi gangguan lebih pendek dan lebih jarang). Kegiatan ini merupakan kegiatan *co-financing* dari dana pinjaman ADB dan *Agence Francaise Developpement* (AFD) serta dana hibah dari *Clean Energy Fund* (*Multi Donor*). ADB memberikan pinjaman sebesar USD 50 juta, AFD memberikan pinjaman sebesar USD 50 juta, dan *Clean Energy Fund* (*Multi Donor*) memberikan hibah sebesar USD 1 juta. Sampai saat ini, kegiatan *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* telah mengalami satu kali perpanjangan *loan* tetapi kegiatan ini masih membutuhkan perpanjangan *Loan*. Durasi perpanjangan *loan* sedang didiskusikan dengan pihak ADB. Pada Triwulan II TA 2014, perekrutan *Project Implementation Consultant* (PIC) telah berada di tahap akhir proses negosiasi kontrak. Proses lelang dari lima paket mayor untuk suplai peralatan dan material telah selesai dan proses evaluasi lelang sedang dilakukan. Dokumen lelang (*bidding document*) untuk enam paket kontrak terakhir sedang dipersiapkan.

- ***Strengthening West Kalimantan Power Grid Project***

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jaringan listrik di Kalimantan Barat agar dapat memberikan suplai listrik yang memadai kepada masyarakat di Kalimantan Barat dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini merupakan kegiatan *co-financing* antara dana pinjaman dari ADB dan *Agence Francaise Developpement* (AFD) serta dana hibah dari *Clean Energy Fund* (*Multi Donor*). ADB memberikan pinjaman sebesar USD 49,5 juta, AFD memberikan pinjaman sebesar USD 49,5 juta, dan *Clean Energy Fund* (*Multi Donor*) memberikan hibah sebesar USD 2 juta. Kegiatan ini baru efektif tanggal 4 April 2014. Sampai pada akhir Triwulan II TA 2014, perekrutan *Project Implementation Consultant* (PIC) serta *procurement* dari empat *turnkey contract* telah dilakukan. Selain itu, lima kontrak yang sudah ditandatangani sudah berjalan. Se jauh ini, kegiatan diperkirakan akan selesai sesuai jadwal. Bagaimanapun, saat ini, revisi proposal mengenai rencana pelaksanaan di 8.000 sambungan ke rumah-rumah di Kalimantan Barat masih dalam proses *review* oleh ADB.

- **PT. SMI**

- ***Indonesian Infrastructure Financing Facility (IIFC Company)***

Sumber pembiayaan kegiatan *IIFC Company* dilakukan melalui *co-financing* antara ADB dan *World Bank*, dengan target akan tersalurkan semua pada akhir tahun 2014. Kegiatan *IIFC Company* ini diperpanjang sampai Desember 2014 dan sampai saat ini, diperkirakan akan bisa diselesaikan tepat waktu. Namun, kegiatan ini mengalami permasalahan yang dapat mempengaruhi jadwal kegiatan dan penyerapan, yaitu adanya penarikan sebesar USD 6.400.000 dengan NOD dari ADB tertanggal 9 Desember 2013 tetapi sampai saat ini, SP3 atas penarikan tersebut belum diterima dari KPPN sehingga perlu diajukan kembali ke dalam DIPA APNBN-P. Selain itu, DIPA revisi atas alokasi sebesar USD 5.395.139 masih belum diperoleh. Jumlah tersebut muncul karena adanya selisih kurs yang digunakan pada saat pengajuan DIPA dan

pada saat penarikan. Oleh karena itu, pengelola kegiatan ini akan mengusulkan DIPA revisi melalui mekanisme APBN-P.

1.2 Progress Variant Proyek Pinjaman ADB ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan akhir Triwulan II TA 2014, dari 11 kegiatan (dengan 12 nomor *Loan Agreement*) yang ada, 3 kegiatan (dengan 3 nomor *Loan Agreement*) mengalami keterlambatan proses (*serious delay*) yang diindikasikan oleh *progress variant* (PV) yang nilainya kurang dari sama dengan -30 seperti yang dapat dilihat pada tabel Perbandingan Nilai PV Proyek Pinjaman ADB dengan kinerja penyerapan rendah (PV ≤ -30) pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2014.

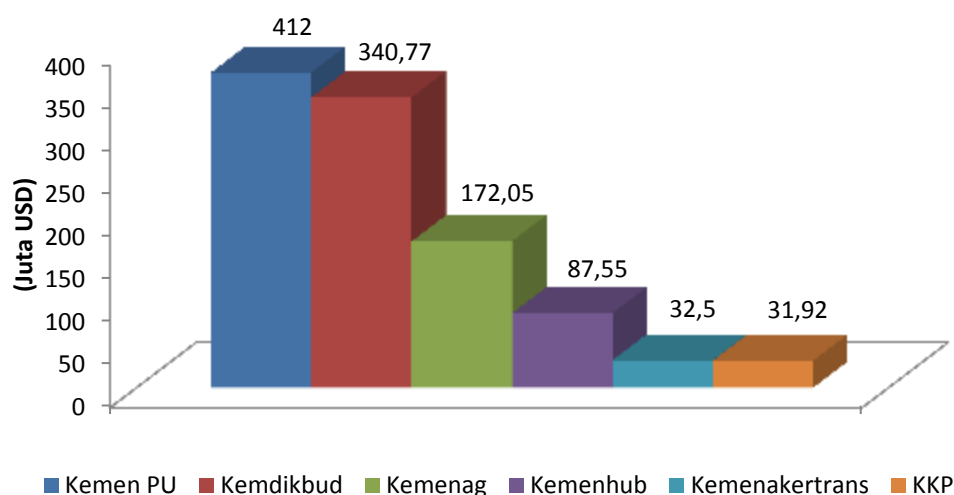
Tabel 2.5 Perbandingan Nilai PV Proyek Pinjaman ADB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV ≤ -30,00) pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2014

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TW I 2014	TW II 2014
1	2500-INO	<i>Integrated Citarum Water Resources Management Project</i>	03/06/2009	30/06/2014	-63,50	-40,96
2	2264-INO (SF)	<i>Infrastructure Reform Sector Development Project</i>	29/11/2006	30/08/2014	-40,52	-43,74
3	2619-INO	<i>Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement</i>	25/04/2011	31/10/2014	-61,56	-59,71

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

IDB

Pada Triwulan II TA 2014, terdapat 16 kegiatan dengan 25 *Loan Agreement* yang didanai oleh pinjaman dari IDB dengan total nilai pinjaman USD 1.076,79 juta. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada enam Kementerian/Lembaga seperti yang dapat dilihat di gambar berikut:

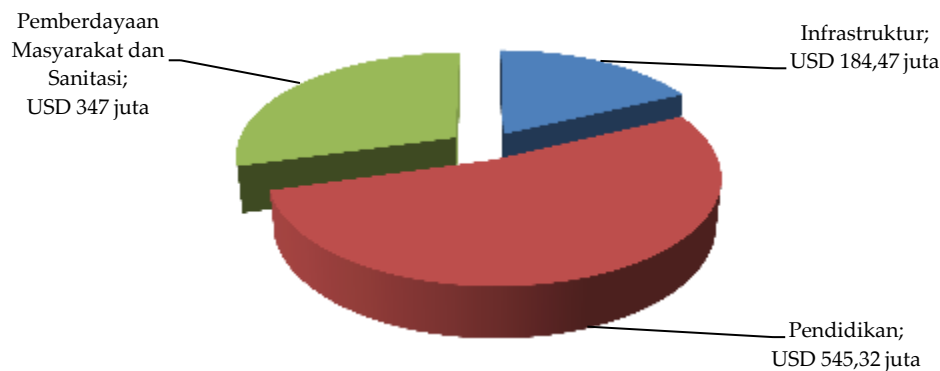


Gambar 2.3 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan II TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Sampai dengan Triwulan II, jumlah proyek IDB paling banyak berada pada sektor pendidikan tinggi, yaitu 10 proyek, yang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 6 proyek dan 4 sisanya di Kementerian Agama. Kementerian Pekerjaan Umum, yang memiliki total nilai pinjaman IDB di Indonesia terbanyak, yaitu sebesar USD 412 juta, hanya melaksanakan tiga proyek namun nilainya cukup besar yaitu ICDD PNPM Phase II, PNPM Phase III, *Regional Road Development*. Sedangkan Kementerian/Lembaga yang mengelola dana pinjaman terkecil adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah pinjaman sebesar USD 31,92 juta yang mendanai satu kegiatan yaitu *Development of Belawan and Sibolga Fishing Port* dan kegiatan tersebut akan tutup pada tahun 2014 ini.

Pada Triwulan II ini, terdapat satu kegiatan baru, yaitu *The Support to Higher Education Project (7 in 1)* yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan tersebut mulai efektif pada tanggal 14 April 2014 dengan nilai pinjaman sebesar USD 174,01 juta. Berikut tabel pembagian proyek IDB berdasar sektor:



Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan II TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman IDB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat di tabel di berikut ini:

Tabel 2.6 Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan II TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	3	412,00	176,92	34,55	235,08	92,19	0,00	0,00
2	Kemendikbud	6	340,77	4,50	1,32	336,27	81,76	0,75	0,91
3	Kemenhub	1	87,55	0,75	0,85	86,80	2,62	0,27	10,22
4	Kemenag	4	172,05	0,84	0,49	171,21	45,77	0,18	0,39
5	Kemen KP	1	31,92	9,10	28,52	22,82	6,53	0,83	12,77
6	Kemenakertrans	1	32,50	0,00	0,00	32,50	0,38	0,00	0,00
Total		16	1.076,79	192,11	17,84	884,68	229,25	2,03	0,88

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Juni tahun 2014 mencapai USD 192,11 juta atau 17,84% dari total nilai pinjaman kegiatan. Namun untuk TA 2014, penyerapan sampai Triwulan II TA 2014 hanya mencapai 0,88% dari target penyerapan dana pinjaman.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- *Development and Upgrading of State University of Jakarta (UNJ)*

Output atas proyek ini berupa pembangunan tiga gedung baru dan renovasi 15 gedung lama, pengadaan peralatan laboratorium dan *overseas staff training*. Proyek ini akan tutup pada 30 September 2014 dan saat ini tinggal menyelesaikan komponen *overseas staff training* dimana terdapat 7 dosen yang tengah menjalani program doktoral/*PhD*. Secara umum, proses ini berjalan baik, meskipun sempat mengalami dua kali perpanjangan untuk penyelesaian kegiatan fisik dan penyelesaian program doktoral yang mengalami keterlambatan. Proyek ini telah menyelesaikan seluruh outputnya, kecuali komponen *curriculum development* yang dibatalkan karena dalam proses tendernya kurang peminat. Komponen *curriculum development* tersebut pada akhirnya dibiayai melalui dana rupiah.

- *Development of Medical Education and Research Center at Two University Hospitals (3 in 1)*

Kegiatan *Development of Medical Education and Research Center at Two University Hospitals* ini merupakan kegiatan *co-finance* dengan *Saudi Fund for Development* (SFD). Kegiatan ini berupa pembangunan gedung pusat riset kedokteran di Universitas Indonesia, dan pembangunan rumah sakit pendidikan di Universitas Sebelas Maret dan Universitas Andalas. Untuk kegiatan fisik di Universitas Andalas dan Universitas Negeri Sebelas Maret, telah dimulai sejak Triwulan I Tahun 2014 yang lalu. Total nilai proyek sebesar USD 128,166 juta, terdiri atas pinjaman IDB sebesar USD 63,966 juta, pinjaman SFD sebesar USD 36 juta, dan dana pendamping GoI sebesar USD 28,2 juta. Proyek ini telah efektif pada 26 Februari 2011 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Meskipun demikian, progres penyerapan proyek per Juni 2014 baru mencapai USD 468,121 juta (0,47%).

Progres hingga saat ini, pekerjaan konstruksi di Unand dan UNS telah dimulai pada bulan Maret 2014 dan direncanakan akan selesai pada bulan September 2015 (porsi pinjaman SFD). Sedangkan untuk UI, konstruksi baru akan dimulai pada bulan Nopember 2014 dan selesai pada Mei 2016 (porsi pinjaman IDB).

Di Universitas Andalas, proses secara keseluruhan diperkirakan akan selesai tepat waktu walaupun sempat mengalami keterlambatan di proses pengeboran untuk pekerjaan *civil work*. Saat ini, di Universitas Andalas juga sedang dilakukan finalisasi pengadaan *Equipment Consultant* (EQC).

- *The Development and Quality Improvement of Padjadjaran University*

Proyek ini berupa pembangunan 18 gedung baru seluas 40.000 m² beserta infrastruktur pendukungnya, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, serta pengembangan kurikulum. Proyek ini efektif pada 24 Juli 2011 dengan total pinjaman dari IDB sebesar USD 43,97 juta dan pendanaan dari GoI sebesar USD 8,75 juta. Hingga saat ini, pekerjaan konsultasi untuk DEDC, PMSC, dan EQC telah terkontrak dan sedang melaksanakan pekerjaan masing-masing. Pekerjaan fisik

direncanakan dapat dimulai pada bulan November 2014. Proyek ini juga sedang melaksanakan pekerjaan *curriculum development* dan mulai memproses usulan pemaketan pengadaan peralatan/*equipment* ke IDB.

- ***The Development and Quality Improvement of State University of Semarang***

Proyek *The Development and Quality Improvement of the Semarang State University* (UNNES) berupa pembangunan 13 gedung baru seluas 34.600 m² beserta peralatannya, pengembangan infrastruktur pendukung, renovasi 4 gedung lama, pengembangan kurikulum, dan pendidikan doktoral ke luar negeri. Proyek UNNES bernilai USD 45,29 juta, terdiri atas pinjaman IDB sebesar USD 36,02 juta dan dana pendamping GoI sebesar USD 9,27 juta. Proyek ini telah efektif pada 28 November 2011. Hingga saat ini, pekerjaan konsultasi untuk DEDC, PMSC, dan EQC telah terkontrak. Proyek ini terdiri dari tiga *financing agreement*, yaitu IND-0152 (*Loan*) yang akan berakhir pada 31 Desember 2014, IND-0153 (*Istisna'a*) yang akan berakhir pada 18 Desember 2015, serta IND-0154 (*Installment Sale*) yang telah berakhir pada 31 Mei 2014 dan telah diusulkan untuk diperpanjang hingga 15 Maret 2016 kepada IDB. Pekerjaan fisik dijadwalkan dapat dimulai pada Desember 2014.

- ***Rehabilitation, Reconstruction, and Upgrade of State University of Padang***

Proyek *The Reconstruction and Upgrading of the State University of Padang Project* (UNP) berupa rekonstruksi dan pembangunan 7 gedung beserta infrastruktur pendukungnya, pengadaan peralatan laboratorium, serta pekerjaan konsultasi. Proyek ini efektif pada 28 November 2011 dan mendapatkan pinjaman dari IDB sebesar USD 29,5 juta dan pendanaan dari GoI sebesar USD 6,9 juta. Saat ini, proyek ini sedang dalam proses tender untuk pekerjaan fisik (*civil work*).

- ***The Support to Higher Education Project (7 in 1)***

Proyek paling baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu *The Support to Higher Education Project (7 in 1)* atau disebut juga dengan *Development and Upgrading of Seven Universities in Indonesia in Improving the Quality and Relevance of Education*. Proyek ini didanai dengan pinjaman IDB sebesar USD 174,01 dan *co-finance* dengan *Saudi Fund for Development* dengan pinjaman sebesar USD 35 juta. Proyek ini berupa pembangunan 60 gedung baru dengan jumlah area bangunan seluas 168.075 m², renovasi dari 16 gedung yang sudah ada, dan pengadaan peralatan, pengembangan kurikulum, pelatihan, *e-learning*, buku/jurnal, dan bantuan penelitian. IDB mendanai proyek yang dilakukan di enam universitas, yaitu Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan), Universitas Sam Ratulangi (Sulawesi), Universitas Negeri Gorontalo (Sulawesi), Universitas Negeri Yogyakarta (Jawa), dan Universitas Negeri Surabaya (Jawa). Satu universitas lagi, yaitu Universitas Syiah Kuala, didanai oleh SFD. Pengadaan alat di proyek ini dilakukan secara 50:50 dengan dana rupiah murni. Proyek tersebut mulai efektif pada awal Triwulan II Tahun 2014 dan akan menyelenggarakan *start up workshop* pada tanggal 9 September 2014.

- **Kementerian Agama**

- ***The Reconstruction of IAIN Ar Raniry***

Proyek *The Reconstruction of IAIN Ar Raniry* ini telah menyelesaikan seluruh pembangunan gedung kampus dan infrastruktur pendukungnya, dan saat ini tinggal menyelesaikan proses pengadaan peralatan untuk ruang kelas dan laboratorium. Proyek ini telah diperpanjang sebanyak empat kali dan akan tutup pada 30 September 2014. Saat ini, 3 paket dari 4 paket peralatan telah terkontrak dan dalam proses pemasangan.

- ***Upgrading and Development of IAIN Sunan Gunung Djati***

Proyek pembangunan UIN Sunan Gunung Djati telah menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi pada akhir Triwulan IV Tahun 2013, berupa 10 gedung baru beserta infrastruktur pendukungnya, pengadaan peralatan, *staff development*, dan pengembangan kurikulum. Saat ini, proyek ini dalam proses pemasangan peralatan dan direncanakan akan selesai saat *closing date* tanggal 31 Desember 2014.

- ***Development of IAIN Sunan Ampel***

Proyek *The Development and Quality Improvement of State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Surabaya* berupa pembangunan 7 gedung baru seluas 33.680 m², renovasi 6 bangunan lama, penyediaan infrastruktur pendukung, peralatan, pengembangan kurikulum, dan keterampilan staf. Pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman IDB sebesar USD 35 juta serta dari dana pendamping GoI sebesar USD 7 juta. Proyek ini efektif sejak 28 Nopember 2011. Hingga saat ini, proyek tersebut telah selesai mengerjakan *start up workshop*, *PMU Equipment*, dan *Detail Engineering Design (DED)* oleh *DED Consultant*. Saat ini, proyek ini sedang dalam proses tender kontraktor untuk pekerjaan fisik.

- ***Support to Development of Islamic Higher Education (4 in 1)***

Proyek *The Support to Quality Improvement of Islamic Higher Education Project (IND-0164)* merupakan proyek pembangunan dan pengembangan 4 IAIN yaitu IAIN Sumatera Utara di Medan, IAIN Raden Fatah di Palembang, IAIN Walisongo di Semarang, dan IAIN Mataram di NTB. Proyek ini berupa pembangunan 33 gedung baru dan fasilitas pendukung beserta furnitur dan peralatan laboratorium, pengembangan kurikulum dan *training* program, serta pekerjaan konsultasi dan PMU. Proyek ini telah efektif pada 18 Mei 2013 dengan nilai USD 163,28 juta yang terdiri dari pinjaman IDB sebesar USD 123,75 juta dan dana pendamping GoI sebesar USD 39,53 juta. Proyek ini dikelola dan dilaksanakan oleh PMU di Pusat di bawah Kementerian Agama. Progres hingga saat ini, proyek ini telah melakukan *start up workshop* dan kontrak dengan *PMU Expert*.

Pihak *executing agency* mengusulkan untuk melakukan perubahan paket, karena telah mengalami keterlambatan proses dan belum ada penyerapan. Percepatan pelaksanaan dilakukan melalui perubahan sebagian pengalokasian dana PHLN dari Kementerian Agama, ke DIPA masing-masing perguruan tinggi, serta perubahan pengelolaan kegiatan, dari sebelumnya dikelola oleh PMU di pusat, sebagian kegiatan (pekerjaan fisik dan pengadaan peralatan) akan didelegasikan untuk dikelola masing-masing PIU. Perubahan tersebut saat ini masih diproses di internal pemerintah untuk diajukan kepada IDB. Diharapkan mekanisme tersebut dapat menjadi solusi bagi keterbatasan

SDM pada PMU pusat untuk proyek ini. PIU dari kegiatan ini sedang dalam proses persiapan AMDAL. Proses pengajuan permintaan pembayaran (*first disbursement*), yang telah diajukan sejak akhir tahun 2013, masih terkendala di Kementerian Keuangan (KPPN) karena adanya perubahan mekanisme aplikasi dalam proses DIPA.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- ***Development of Belawan and Sibolga Fishing Port***

Proyek *The Development of Belawan and Sibolga Fishing Port* (IND 121) berupa pembangunan dua fasilitas pelabuhan ikan di Belawan dan Sibolga, beserta infrastruktur pendukungnya. Proyek ini efektif pada tanggal 15 Juli 2008 dengan nilai pinjaman dari IDB sebesar USD 31,92 juta. Progres hingga saat ini, seluruh pekerjaan konstruksi di Pelabuhan Ikan Sibolga, senilai sekitar USD 7,26 juta, telah selesai dan telah serah terima (PHO) pada bulan Juli 2013 yang lalu. Kegiatan ini akan tutup pada tanggal 30 September 2014 dan tidak dapat menyelesaikan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Belawan. Kegiatan *Development of Belawan and Sibolga Fishing Port* ini sedang dalam proses pembatalan *financing agreement* di Kementerian Keuangan.

- **Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

- ***Revitalization of Vocational Training Center (VTC)***

Proyek *Revitalization of Vocational Training Center* (VTC) berupa program ekspansi, pembelian peralatan, pengembangan keterampilan, dan pelatihan dari 11 Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia. Proyek ini didanai dengan total pinjaman IDB sebesar USD 32,5 juta. Proyek ini efektif sejak 23 Desember 2013.

Hingga saat ini, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan menggunakan dana pendamping sedang dilakukan. Dana dari IDB akan digunakan untuk pengadaan peralatan. Pelaksanaan *start-up workshop* pada tanggal 12-14 September 2014. Kontrak konsultan alat dan *management project* sedang dalam proses. Pada tahun 2015 saat peralatan datang, pembangunan BLK diharapkan sudah terselesaikan semua. Dari semua BLK yang termasuk di dalam kegiatan ini, ada 9 BLK yang memerlukan pembangunan fisik sedangkan BLK lain dapat menggunakan gedung atau ruangan lain yang tersedia untuk alat yang akan didatangkan tersebut.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- ***PNPM ICDD Phase II***

Proyek *PNPM ICDD Phase II* merupakan kegiatan pembangunan kapasitas komunitas dan masyarakat miskin di perkotaan di 14 provinsi, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Proyek ini terdiri dari 4 *financing agreement* dengan nomor IND-0147, IND-0148, IND-0149, dan IND-0150. Hingga saat ini, *financing agreement* yang masih *ongoing* adalah IND-0147 yang telah diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2014 dan IND-0148 yang akan berakhir pada 24 September 2014. Sedangkan *financing agreement* dengan nomor IND-0149 dan IND-0150 telah berakhir pada 31 Desember 2013.

- ***PNPM ICDD Phase III***
 Proyek *PNPM ICDD Phase III* merupakan kegiatan yang menjadi kelanjutan dari *PNPM ICDD Phase II* dengan tujuan dan lokasi yang sama, kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena provinsi tersebut telah mendapatkan dana dari sumber lain untuk melanjutkan kegiatan ini. Dua proyek tersebut merupakan satu kesatuan program PNPM yang berkelanjutan. Kegiatan *PNPM ICDD Phase III* memiliki tiga nomor *financing agreement*, yaitu IND-0169, IND-0170, dan IND-0171. Ketiga nomor *financing agreement* tersebut mulai efektif pada 15 Desember 2013. Status DIPA TA 2014 sudah buka bintang bulan Juni 2014.
- ***Regional Road Development Project (RRDP)***
 Proyek RRDP merupakan proyek *co-financing* antara ADB dan IDB. Kegiatan ini berupa pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 410 km dan renovasi 169 jembatan di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, serta Jawa Tengah. Pinjaman IDB mendanai kegiatan di wilayah Jawa Tengah, yang terdiri dari 3 ruas jalan dengan total panjang kurang lebih 86,3 KM yang terdiri dari ruas jalan Tambak Mulyo-Wawar, Giri Woyo-Duwet, dan Wawar-Cogot. Selain itu, proyek ini juga mencakup pengembangan kebijakan di bidang jalan, berupa *Road Safety Program*, studi pengembangan, dan *capacity development* bagi *stakeholder* terkait di bidang transportasi jalan raya. Saat ini, proses tender dari 3 paket kontrak yang ada telah berada pada tahap evaluasi sejak 15 Juli 2014 dan dijadwalkan pekerjaan fisik akan dapat dimulai pada Oktober 2014.
- **Kementerian Perhubungan**
 - ***Development of Belawan Port Phase I***
 Proyek *The Development of Belawan Port Phase I (IND 133)* didanai dari pinjaman IDB sebesar USD 87,55 juta dan pendanaan GoI sebesar USD 51,76 juta. Proyek ini telah efektif pada 1 Mei 2010, namun baru mulai melakukan penarikan pertama pada tahun 2012. Proyek ini akan berakhir pada 31 Desember 2016.

 Saat ini, kegiatan ini dalam proses pengadaan Paket I (konstruksi) dengan total nilai sebesar USD 74 juta yang terdiri dari *dredging works*, *soil improvement*, reklamasi, *pavements*, dan *utilities*. Kontrak diperkirakan akan dapat dilaksanakan pada akhir Oktober dengan perkiraan jangka waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan persetujuan IDB adalah 1,5 bulan. Jika kontrak bisa dilaksanakan pada akhir Oktober, penyerapan untuk tahun 2014 dapat mencapai 150 miliar.

1.2 ***Progress Variant Proyek ≤ -30***

Secara khusus, berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan akhir Triwulan II TA 2014, dari 16 kegiatan (dengan 25 *Loan Agreement*) yang ada, 9 kegiatan (dengan 15 *Loan Agreement*) mengalami keterlambatan proses (*serious delay*) yang diindikasikan oleh *progress variant* (PV) yang nilainya kurang dari sama dengan -30 seperti yang dapat dilihat pada tabel Perbandingan Nilai PV Proyek Pinjaman IDB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV ≤ -30) pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2014.

Tabel 2.7 Perbandingan Nilai PV Proyek Pinjaman IDB dengan Kinerja Penyerapan Rendah ($PV \leq -30$) pada Triwulan I dan Triwulan II TA 2014

No	Financing agreement	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TW I 2014	TW II 2014
1	IND-0113 (Installment Sale)	<i>The Reconstruction of IAIN Ar Raniry</i>	13/12/2006	30/09/2014	-92,69	-95,89
2	IND-0121 (Istisna'a)	<i>Development of Belawan and Sibolga Fishing Port</i>	15/07/2008	30/11/2014	-61,87	-64,91
3	IND-0127 (Installment Sale)	<i>Upgrading and Development of IAIN Sunan Gunung Djati</i>	06/07/2008	30/09/2014	-89,92	-93,92
4	IND-0133 (Istisna'a)	<i>Development of Belawan Port Phase I</i>	01/05/2010	14/06/2014	-94,36	-69,86
5	IND-0137 (Istisna'a)	<i>Development of Medical Education and Research Center at Two University Hospitals</i>	26/02/2011	31/12/2014	-78,86	-85,35
	IND-0138 (Installment Sale)		26/02/2011	31/12/2014	-80,41	-86,89
6	IND-0140 (Istisna'a)	<i>Quality Improvement of Padjadjaran University</i>	24/07/2011	24/10/2015	-65,52	-67,06
	IND-0141 (Installment Sale)		24/07/2011	24/10/2015	-63,17	-69,03
7	IND-0152 (Loan)	<i>Development and Quality Improvement of State University of Semarang</i>	28/11/2011	31/12/2014	-46,85	-54,91
	IND-0153 (Istisna'a)		28/11/2011	31/12/2014	-74,69	-82,70
	IND-0154 (Installment Sale)		28/11/2011	31/12/2014	-75,64	-83,70
8	IND-0155	<i>Rehabilitation, Reconstruction, and Upgrade of State University of Padang</i>	28/11/2011	28/11/2016	-45,42	-50,28
	IND-0156 (Loan)		28/11/2011	28/11/2016	-46,74	-51,72
9	IND-0157 (Istisna'a)	<i>Development of IAIN Sunan Ampel</i>	28/11/2011	28/11/2016	-56,73	-62,60
	IND-0158		28/11/2011	28/11/2016	-58,45	-50,07
	IND-0170		15/12/2013	15/12/2014	-61,87	-64,91
	IND-0171		15/12/2013	15/12/2014	-89,92	-93,92

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam proyek *on-going* tidak hanya disebabkan oleh faktor internal (pada Kementerian/*Executing Agencies* maupun pihak internal pemerintah), namun juga disebabkan oleh keterlambatan dalam proses di IDB. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut adalah:

- Ketidakkonsistenan PMU (panitia pengadaan) dalam menerapkan dan/atau menggunakan *IDB Procurement Guidelines* dalam proses pengadaan, seperti pada proyek pembangunan UNPAD dan UNNES yang memasukkan persyaratan tambahan di luar *IDB Guidelines* kepada peserta lelang internasional, seperti persyaratan sertifikasi tambahan dan registrasi di KBRI.
- Ketidak konsistenan IDB dalam memberikan approval (NOL) atas tahapan proses pengadaan; seperti pada tender kontraktor untuk pekerjaan fisik pada proyek UNPAD dan UNNES dimana IDB telah memberikan NOL pada *tender document* tetapi tidak menyetujui hasil PQ yang telah sesuai dengan *tender document*. Contoh lainnya, pada proyek UNP, dimana IDB menambahkan 7 peserta lainnya untuk diikuti dalam tender, padahal PMU hanya meluluskan 5 peserta.
- Lamanya waktu (tidak ada standard waktu) bagi IDB untuk memberikan atau menerbitkan (*issuance*) approval (NOL), seperti pada proyek *the Development of IAIN Sunan Ampel* yang membutuhkan waktu lebih dari 9 bulan untuk proses tender pekerjaan fisik, dan *the Development and Quality Improvement of State University of Semarang Project* (UNNES) yang membutuhkan waktu 17 bulan.

Secara umum, beberapa hal dapat dilakukan sebagai tindak lanjut untuk peningkatan pelaksanaan ke depan antara lain:

- Pemerintah (Bappenas) akan rutin menyelenggarakan *workshop procurement guidelines* untuk para PMU, bekerjasama dengan IDB HQ Jeddah. Workshop ini telah mulai diselenggarakan pada tahun 2013 dengan mengundang *procurement specialist* dari IDB Jeddah.
- Kantor IDB Jakarta perlu segera beroperasi dan aktif terlibat dalam monitoring proyek *ongoing*, dan diharapkan dapat menjembatani komunikasi dan koordinasi dengan HQ.
- IDB diharapkan dapat memberikan kesepakatan tertulis terkait komitmen *timeframe* jangka waktu pemrosesan NOL untuk tiap tahapan pengadaan barang dan jasa.

Penjelasan mengenai permasalahan dari kesembilan proyek yang memiliki PV kurang dari -30 tersebut beserta tindak lanjut yang telah dilakukan dan masih diperlukan:

• **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- ***Development of Medical Education & Research Center at Two University Hospitals (3 in 1)***
Keterlambatan atas proyek ini terjadi pada awal pelaksanaan proyek, dimana proses pengadaan PMC (*Project Management Consultant*) menghabiskan waktu 8 bulan lebih lama dari rencana semula karena beberapa kali proses klarifikasi antara PMU dan IDB sebelum NOL keluar. Selain itu, keterlambatan juga dikarenakan proses izin demolisi bangunan cagar budaya di Universitas Indonesia yang lama. Namun demikian, saat ini izin tersebut telah terbit dan telah mulai proses *tender* untuk pekerjaan fisik yang dijadwalkan akan selesai pada bulan Oktober 2014. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *executing agency* mengusulkan perpanjangan *closing date Financing Agreement* IND 137-138 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi 31 Desember 2016.

Bappenas telah memproses usulan perpanjangan ini kepada Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya diproses lebih lanjut kepada IDB. Permasalahan dalam proyek ini telah teratasi, namun proses percepatan pengadaan kontraktor di UI perlu dilakukan sehingga proyek dapat terselesaikan sebagaimana jadwal yang baru.

- ***Quality Improvement of Padjadjaran University***

Proyek ini mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan kontraktor pekerjaan fisik. IDB (pihak *Procurement Unit*) meminta dilakukan PQ ulang karena adanya indikasi diskriminasi (tidak adanya peserta internasional) yang disebabkan oleh persyaratan administratif yang harus dipenuhi.

Namun demikian karena *tender document* sudah disetujui IDB, pada acara *Bilateral Meeting-IDB Annual Meeting* pada 24 Juni 2014, Bappenas meminta agar pihak IDB dapat mengupayakan penyelesaian tanpa PQ ulang. Dalam pertemuan tersebut, pihak IDB (*Human Development and Education*) setuju dengan usulan tersebut dan akan meminta persetujuan pengecualian (*waiver*) dari *Vice President Operation (VPO)* IDB. Kemudian, IDB menyetujui proses yang telah dilakukan oleh PMU. Saat ini, permasalahan ini telah selesai dan sudah dimulai proses pemasukan penawaran oleh peserta lelang.

- ***Development and Quality Improvement of State University of Semarang***

Proyek ini sempat terkendala NOL dokumen PQ untuk kontraktor pekerjaan fisik karena adanya klausul yang dianggap diskriminatif yang mensyaratkan peserta internasional untuk *joint* dengan perusahaan lokal dan mengikuti peraturan pengadaan pemerintah.

Pihak IDB meminta PMU untuk mengulang proses *tender* dan konsisten menggunakan *IDB Procurement Guidelines* saja.

Telah dilakukan *review* ulang oleh PMU dan saat ini telah di-*approve* oleh IDB. Saat ini, permasalahan telah selesai dan sudah dimulai proses pemasukan penawaran oleh peserta lelang.

- ***Rehabilitation, Reconstruction, and Upgrade of State University of Padang***

Proyek ini juga sempat terkendala NOL dokumen PQ untuk kontraktor pekerjaan fisik, terkait dengan *issue* komplain oleh salah satu peserta *tender*. Kemudian, dari 5 peserta yang lulus hasil PQ oleh panitia, IDB menyetujui dan menambahkan 7 peserta lainnya untuk diikuti dalam *tender*. Pihak PMU sedang memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada IDB atas permasalahan tersebut. Proses ini perlu dipantau sehingga proses pemasukan penawaran oleh peserta lelang dapat segera dilakukan.

• **Kementerian Agama**

- ***The Reconstruction of IAIN Ar Raniry,***

Proyek ini sedang dalam tahap penyelesaian pengadaan peralatan, dan akan tutup pada 30 September 2014. Mengingat hingga saat ini hanya tiga paket dari empat paket peralatan yang telah terkontrak, dan masih ada satu paket peralatan yang belum selesai proses *review*-nya di IDB, proyek ini tidak akan dapat selesai sepenuhnya pada saat *closing date*, yaitu tanggal 30 September 2014. Proyek ini tidak akan diperpanjang dan diharapkan dapat menyelesaikan seluruh output paket peralatan melalui dana APBN.

Saat ini, 3 dari 4 paket peralatan telah terkontrak dan mulai dapat dilakukan pengerjaannya, serta masih ada satu paket yang masih dalam *review* IDB. Pihak pelaksana kegiatan perlu segera menyelesaikan pengadaan peralatan tersebut dan melakukan upaya-upaya dan partisipasi apabila kegiatan tidak dapat diselesaikan pada akhir September 2014.

- ***Upgrading and Development of IAIN Sunan Gunung Djati***

Proyek ini mengalami *serious delay* dengan PV -93,92 karena sempat mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Namun saat ini, seluruh pekerjaan konstruksi tersebut telah selesai. Proyek ini akan tutup pada 31 Desember 2014, dan saat ini dalam proses pemasangan peralatan dan diperkirakan sudah selesai saat *closing date* tanggal 31 Desember 2014.

- ***Development of IAIN Sunan Ampel***

Proyek ini terkendala NOL untuk PQ pengadaan kontraktor, di mana terdapat komplain dari salah satu peserta sehingga IDB perlu melakukan *review* atas komplain tersebut dan meminta pihak IAIN Sunan Ampel (Panitia Pengadaan) untuk *me-review* dan memasukkan peserta PQ tersebut dalam proses *tender*. *Review* dan penyesuaian atas permintaan tersebut telah dilaksanakan. Atas dasar hasil *review* yang baru dari panitia tersebut dan pencabutan komplain, IDB telah menerbitkan NOL untuk proses selanjutnya.

Dengan demikian, permasalahan dalam proyek ini telah teratasi dan saat ini sudah dalam proses pemasukan penawaran dan diharapkan, pekerjaan fisik dapat dimulai pada November 2014.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- *Development of Belawan and Sibolga Fishing Port*

Kegiatan *Development of Belawan and Sibolga Fishing Port* ini, yang pada Triwulan I mengalami permasalahan pada proses penetapan pemenang untuk pekerjaan fisik di Pelabuhan Perikanan Belawan, akhirnya telah diputuskan bahwa proses *tender* tersebut tidak dapat diteruskan. Proyek ini akan tutup sesuai *closing date* pada 30 November 2014 dan pengerjaan pembangunan di Belawan akan dibebankan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan *executing agency* atas proyek ini.

- **Kementerian Perhubungan**

- *Development of Belawan Port Phase I*

Proyek ini mengalami keterlambatan akibat usulan *re-scoping* pekerjaan untuk Paket I, II, dan III. Permasalahan terkait *re-scoping* ini telah selesai pada Triwulan I Tahun 2014 yang lalu di mana IDB telah memberikan persetujuannya.

Saat ini, proses lelang telah dilaksanakan, dimana telah dilakukan *aanwijzing* pada tanggal 23 Juni 2014 yang lalu. Selanjutnya, pemasukan dan pembukaan dokumen dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2014. Proses tender ini perlu terus dipantau dan dilakukan percepatan sehingga proyek ini dapat menyelesaikan output pekerjaan sebelum *closing date*.

Box 2: Kunjungan Lapangan

Loan IDB IND-168 : The Support to Higher Education Project (7 in 1)

Executing Agency: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan kunjungan lapangan:

Identifikasi persiapan proyek di UNY sebagai bagian dari kegiatan *7 in 1* yang didanai secara *co-finance* dari pinjaman IDB dan SFD (*Saudi Fund for Development*).

Hasil kunjungan Lapangan:

Kunjungan lapangan kegiatan *The Support to Higher Education Project (7 in 1)* ini dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), salah satu universitas PIU (*Project Implementing Unit*) dari kegiatan ini.

- Di UNY, kegiatan ini direncanakan akan membangun 14 gedung baru dengan 9 gedung di antaranya berupa laboratorium. Namun demikian berdasarkan hasil gambar Pra-DED yang diselenggarakan oleh Tim UNY sendiri, ada perubahan luas gedung yang menjadi berkurang sekitar 300 m² dari hasil *appraisal*. Untuk gedung baru, pihak UNY akan tetap mempertahankan ciri khas gedung UNY dengan model identik gedung yang lama.
- Saat ini, masing-masing PIU sedang melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana pendamping rupiah. Komponen pinjaman dari IDB baru dapat dilaksanakan setelah *startup workshop* dilaksanakan. PIU dari UNY menyampaikan bahwa kegiatan *7 in 1* ini baru saja menyelesaikan ToR untuk pelaksanaan *startup workshop*. Pelaksanaan *startup workshop*, yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2014, diundur sampai tanggal 1 September 2014.
- Pembangunan 1 gedung baru yang didanai GOI sudah melalui tahap lelang dan akan dikerjakan tahun 2014 ini.
- Program akademik berupa riset sudah mulai dilaksanakan sejak Triwulan I TA 2014 dengan pembiayaan dari GOI.
- Kegiatan akademik berupa *curriculum development* telah mulai dilaksanakan dengan mengadakan *tracer studies*, evaluasi kurikulum yang sedang berjalan, dan mengadakan studi banding di UPI, UNJ, UNESA, ITS, dan UNNES.
- Dua orang peserta (dari 6 orang) program S3 telah berangkat pada tahun 2014 ini.
- Kegiatan *e-learning* telah dilaksanakan dengan membangun *e-libray* di UNY.
- Pengadaan buku dan jurnal dari dana GOI dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun terakhir pelaksanaan kegiatan.



Gambar 1 Desain Gedung Baru UNY



Gambar 2 Kantor PIU Proyek IDB di UNY

Rekomendasi Kunjungan Lapangan:

- *Progress* pelaksanaan kegiatan *7 in 1* di UNY sudah baik dan lancar. Awal pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan dana GOI sebelum dana pinjaman dapat digunakan dapat menjadi alternatif yang baik dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan tepat waktu. PIU di enam universitas lain diharapkan dapat mengikuti hal positif ini mengingat pelaksanaan kegiatan *7 in 1* ini merupakan satu kesatuan.

Multilateral Lain

Pada triwulan II tahun 2014 total nilai pinjaman dari lembaga multilateral lain adalah USD 198,21 juta yang terdiri dari 4 proyek pinjaman dari IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) dan 1 proyek pinjaman dari *Saudi Fund*. Tidak ada proyek yang baru efektif maupun tutup dari Lembaga Multilateral lain pada triwulan ini.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Realisasi penyerapan kumulatif pada proyek-proyek pinjaman dari lembaga multilateral lain triwulan ini mencapai 41,19% dari total nilai pinjaman. Sementara itu penyerapan tahun 2014 hingga Triwulan II baru mencapai 18,62% dari target penyerapan tahun ini. Penyerapan pinjaman dari lembaga multilateral lain menurut Kementerian/Lembaga disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain Menurut Instansi Penanggung Jawab
Triwulan II TA 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
IFAD		4	162,21	81,64	50,22	80,57	17,98	3,33	18,62
1	Kementan	2	67,07	26,90	40,11	40,17	10,48	2,89	13,55
2	Kemendagri	1	63,20	52,09	82,41	11,11	1,82	0,16 ¹⁾	9,07
3	Kemen KP	1	31,94	2,65	8,16	29,29	5,68	0,28	5,05
SAUDI FUND		1	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
4	Kemendikbud	1	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Total		5	198,21	81,64	41,19	116,57	17,98	3,33	18,62

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Keterangan:

¹⁾ Termasuk realisasi triwulan I sebesar USD 0,068 juta yang belum dilaporkan sebelumnya.

²⁾ Pembahasan untuk proyek Saudi Fund digabungkan dengan pembahasan pada bagian IDB karena merupakan proyek co-financing dengan IDB.

- **Kementerian Pertanian**

- **Rural Empowerment and Agricultural Development (READ)**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 penyerapan kumulatif untuk proyek READ telah mencapai 83,92% dari total nilai proyek sehingga nilai *progress variant* -7,85. Sementara itu, penyerapan tahun 2014 baru mencapai 34,86% dari target (DIPA) yang ditetapkan.

Proyek READ akan berakhir pada 31 Desember 2014, secara umum semua target output maupun *outcomes* proyek dapat dicapai dengan baik, informasi rinci mengenai capaian tersebut akan dirangkum dalam laporan akhir proyek. Saat ini *exit strategy* untuk proyek READ telah disusun dan telah ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2014. Salah satu bagian penting dalam *exit strategy* tersebut adalah mengenai replikasi proyek yang direncanakan akan dilaksanakan di 2 lokasi (Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat) sebagai pilot dengan menggunakan dana pemerintah. Jangka waktu pelaksanaan pilot tersebut direncanakan selama 2 tahun.

- ***Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)***
Penyerapan kumulatif proyek SOLID hingga Triwulan II 2014 masih cukup rendah yaitu sebesar 19,16% dari total nilai proyek sedangkan persentase waktu yang sudah terpakai telah mencapai 36,99% sehingga nilai *progress variant* menjadi -17,83. Penyerapan dana tahun ini sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 26,77% dari target (DIPA).

Pada Triwulan II Tahun 2014 belum ada informasi terbaru mengenai capaian indikator *logframe* proyek SOLID, diharapkan pada triwulan selanjutnya penanggung jawab proyek dapat menyampaikan capaian terakhir untuk indikator *logframe* proyek. Pada triwulan ini telah dilaksanakan *mid-term review* yang menyepakati mengenai pemahaman tentang desain proyek, penguatan manajemen dan *re-focusing* target serta sasaran proyek. Salah satu, penguatan yang akan dilakukan adalah pengurangan target lokasi proyek dari 300 desa menjadi 224 desa untuk meningkatkan efektifitas waktu dan biaya proyek. Semua penguatan yang disepakati dalam *mid-term review* akan mulai dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga akan berpengaruh pada alokasi anggaran pada tahun tersebut.

- **Kementerian Dalam Negeri**

- ***National Programme for Community Empowerment in Rural Area (PNPM Rural)***
Penyerapan kumulatif proyek PNPM Rural sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 adalah sebesar 82,43% dari total nilai proyek sehingga *progress variant* bernilai baik yaitu 7,30. Namun, kinerja penyerapan pada tahun ini sampai dengan Triwulan II masih cukup rendah hanya sebesar 9,07% dari target tahun ini, diharapkan kinerja penyerapan proyek ini dapat meningkat pada triwulan selanjutnya.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- ***Coastal Community Development Project (IFAD)***
Penyerapan kumulatif proyek CCDP sampai dengan Triwulan II TA 2014 baru mencapai 8,16% dari total nilai proyek dengan nilai *progress variant* yang telah mencapai -19,5. Kinerja penyerapan Tahun 2014 merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan proyek pinjaman IFAD lainnya karena sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 baru terserap sebesar 5,05% dari target tahun ini.

Informasi terbaru mengenai capaian indikator keberhasilan yang terdapat dalam *logframe* proyek belum tersedia pada triwulan ini. Progres pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada beberapa komponen proyek seperti i) *vehicles, materials and equipment*; ii) *training and workshop*; iii) *studies and survey*; dan iv) *consultancy services*. Namun pada komponen *community enterprise and infrastructure fund* serta *district fund for small scale fisheries* belum menunjukkan kemajuan.

KREDITOR BILATERAL

Pada Triwulan II TA 2014 jumlah proyek pinjaman dari Kreditor Bilateral adalah sebanyak 69 proyek, jumlah ini meningkat sebanyak 7 proyek dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu sejumlah 62 proyek. Pada Tahun Anggaran 2014 dilakukan pendekatan perhitungan proyek tidak berdasarkan jumlah *Loan Agreement* sehingga untuk beberapa *Loan Agreement* yang merupakan 1 proyek dihitung menjadi 1 proyek saja. Penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai 34,63% (ekuivalen USD 2.658,92 juta) dari total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 7.677,38 juta, sedangkan realisasi pinjaman pada triwulan ini mencapai 18,62% dari target atau senilai ekuivalen USD 201,23 juta. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 44 proyek pinjaman dari JICA, 1 proyek pinjaman dari Australia, 3 proyek pinjaman dari Jerman, 7 proyek pinjaman Korea, 4 proyek pinjaman Perancis, 3 proyek pinjaman AFD, 3 proyek pinjaman RR Tiongkok dan 2 proyek pinjaman dari Spanyol, seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	JICA	44	5.941,77	2.081,72	35,04	3.860,05	737,39	103,70	14,06
2	Australia	1	282,35	233,76	82,79	48,58	18,77	5,89	31,39
3	Jerman	3	85,67	32,86	38,36	52,81	26,66	0,20	0,76
4	Korea	7	373,43	57,30	15,35	316,12	39,27	0,83	2,12
5	Perancis	4	278,79	26,24	9,41	252,55	36,08	6,11	16,96
6	AFD	3	129,50	39,00	30,12	90,50	34,50	0,00	0,00
7	RR Tiongkok	5	531,89	156,89	29,50	375,00	156,67	74,51	47,56
8	Spanyol	2	53,98	31,14	57,67	22,84	31,63	9,98	31,51
Total		69	7.677,38	2.658,92	34,63	5.018,48	1.080,96	201,23	18,62

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Menurut instansi penanggung jawab, sebanyak 53 proyek pinjaman dari Kreditor Bilateral dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, sebanyak 14 proyek diteruspinjarkan (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) dan sebanyak 2 proyek yang diterushibahkan. Nilai total pinjaman yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebesar ekuivalen USD 5.185,25 juta dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai ekuivalen USD 2.125,58 juta (40,99%), sedangkan nilai pinjaman yang diteruspinjarkan mencapai ekuivalen USD 1.998,40 juta dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini sebesar ekuivalen USD 417,67 juta (20,9%) dan nilai pinjaman yang diterushibahkan mencapai ekuivalen USD 493,75 juta dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini sebesar ekuivalen USD 115,67 juta (23,43%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel 2.10 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		53	5.185,25	2.125,58	40,99	3.059,67	731,70	170,03	23,24
1	Kemendikbud	8	1.147,33	155,59	13,56	991,74	242,88	15,24	6,27
2	Kemendikbud	4	303,31	102,83	33,90	200,48	74,03	6,44	8,70

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
3	Kemenkes	3	80,27	69,61	86,72	10,66	1,14	0,00	0,00
4	Kemen KP	1	30,00	8,56	28,53	21,44	11,68	0,00	0,00
5	Kemen PU	27	3.001,49	1.618,91	53,94	1.382,58	329,71	134,15	40,69
6	Bappenas	2	165,76	65,80	39,70	99,96	8,04	1,41	17,57
7	Kemenkominfo	2	200,67	11,66	5,81	189,01	3,71	0,00	0,00
8	Kepolisian RI	2	79,26	0,49	0,62	78,76	14,02	0,49	3,52
9	Badan Otorita Batam	1	52,84	0,00	0,00	52,84	1,59	0,00	0,00
10	BMKG	1	41,35	26,24	63,47	15,11	26,24	6,11	23,30
11	LIPI	1	20,06	12,53	62,45	7,53	6,52	0,00	0,00
12	BIG	1	62,91	53,36	84,81	9,55	12,13	6,18	50,94
Diteruspinjamankan (SLA)		14	1.998,40	417,67	20,90	1.580,74	167,14	23,95	14,33
13	PT. PLN	13	1.732,21	414,10	23,91	1.318,11	153,34	23,56	15,37
14	PT. Pertamina	1	266,19	3,56	1,34	262,62	13,79	0,38	2,79
Diterushibahkan		2	493,75	115,67	23,43	378,08	182,13	7,25	3,98
15	Pemda DKI	2	493,75	115,67	23,43	378,08	182,13	7,25	3,98
TOTAL		69	7.677,38	2.658,92	34,63	5.018,48	1.080,96	201,23	18,62

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek pinjaman dari lembaga bilateral berdasarkan lembaga pemberi pinjaman. Pembahasan terdiri dari gambaran umum pinjaman, kinerja pelaksanaan permasalahan dan tindak lanjut serta hasil kunjungan lapangan.

JICA

Selama Triwulan II TA 2014, jumlah pinjaman JICA yang efektif dan dipantau pelaksanaannya berjumlah 44 proyek dengan nilai pinjaman JPY 601.931,18 juta. Jumlah tersebut meningkat dibanding Triwulan sebelumnya karena terdapat 7 proyek baru pada Triwulan II 2014. Penarikan pinjaman secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan II TA 2014 sebesar JPY 210.888,66 juta atau 35,04% dari total pinjaman, sehingga dana pinjaman yang belum ditarik senilai JPY 391.042,52 juta atau 64,96% dari total pinjaman.

Dari 44 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA, sebanyak 31 pinjaman proyek dilaksanakan langsung oleh kementerian/lembaga, 2 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerushibahan (*on-granting*) dan 11 pinjaman proyek dilaksanakan oleh BUMN melalui penerusanpinjaman atau *Subsidiary Loan Agreement* (SLA).

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Jumlah penarikan pinjaman pada TA 2014 sebesar JPY 10.505,28 juta atau 14,06% dari target penyerapan TA 2014. Penarikan Triwulan II 2014 meningkat hanya 8,41% dibandingkan Triwulan I 2014. Rendahnya penyerapan pinjaman disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- Terdapat 7 proyek yang baru efektif pada TA 2014 dan dalam tahap awal proses pengadaan. Ketujuh proyek tersebut tidak melakukan penarikan pinjaman hingga Triwulan II 2014, yaitu:
 - IP-564 *Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development* (RISE II)

- IP-565 Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta E/S
 - IP-566 Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II
 - IP-567 Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)
 - IP-562 Railway Double Tracking on Java South Line Project (IV) (Kroya - Kutoarjo Phase II)
 - IP-563 Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I
 - IP-568 Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV
- Belum adanya penarikan pinjaman karena belum selesainya proses pelengkapan administrasi pembayaran untuk output yang telah dihasilkan yang terdapat pada proyek:
 - IP-542 ICT Utilization for Education Quality Enhance DIY
 - IP-524 Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi/Progo River Basin & Mt. Bawakaraeng
 - Tidak adanya progress aktivitas fisik proyek dan penyerapan pinjaman karena masalah manajemen proyek, proyek dalam tahap penyelesaian pengadaan barang/jasa, adanya serta masalah teknis yaitu pada:
 - IP-508 Railway Electrification and DD Tracking Project,
 - IP-536 E/S Jakarta Mass Rapid Transit System
 - IP-548 Railway Doubletrack on Java South Line Project III
 - IP-556 Java-Sumatera Interconnection 500 kV line (HVDC) Stage II,
 - IP-559 Upper Citarum Basin Flood Management
 - IP-561 Indramayu Coal Fired Power Plant (E/S)

Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman proyek yang dibiayai JICA status pada Triwulan II TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Pinjaman Proyek yang Dibiayai JICA sampai dengan Triwulan II TA 2014

(Dalam Juta JPY)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai pinjaman	Penarikan kumulatif		Pinjaman belum ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga									
1	KemenPU	19	213.658,00	122.604,02	57,38	91.053,98	16.867,70	4.722,87	27,99
2	Kemendikbud	3	28.100,18	10.352,11	36,84	17.748,07	7.052,97	631,91	8,96
3	Kemendikbud	5	105.102,00	14.056,50	13,37	91.045,50	21.413,45	1.543,61	7,21
4	Kemkominfo	1	2.911,00	1.181,24	40,58	1.729,76	374,81	0,00	0,00
5	LPNK	3	23.165,00	12.070,82	52,11	11.094,18	2.042,63	768,86	37,64
Diterushibahkan (On-Granting)									
6	Pemda DKI Jakarta	2	50.019,00	11.717,91	23,43	38.301,09	18.450,28	734,11	3,98
Diteruspinjamkan (SLA)									
7	BUMN	11	178.976,00	38.906,07	21,74	140.069,93	8.496,16	2.103,93	24,76
Total		44	601.931,18	210.888,66	35,04	391.042,52	74.701,04	10.505,28	14,06

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Keterangan: - LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) terdiri dari Bappenas dan BIG
 - BUMN terdiri dari PT. PLN dan PT. Pertamina

Penarikan pinjaman pada Triwulan II 2014 lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2013.

Tabel 2.12 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Jumlah Proyek	Jumlah Penarikan Triwulan I	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	37	14.844,88	14,80
Triwulan II/2014	44	10.505,28	14,06

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Pada Triwulan II TA 2014 terdapat 31 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan kinerja pelaksanaan sebagai berikut:

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan 19 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA. Pinjaman meliputi 11 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen. Sumber Daya Air; 3 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen. Bina Marga; dan 5 pinjaman proyek dikelola Ditjen. Cipta Karya.

Pada Triwulan II 2014, penarikan pinjaman di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar JPY 4.722,87 juta. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan penarikan Triwulan II 2014. Proyek IP-534 *Integrated Water Resources & Flood Management* melakukan penarikan pinjaman terbesar di Kementerian Pekerjaan Umum yaitu sebesar JPY 822,75 juta. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan II 2013 dengan Triwulan II 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemen PU)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	105.262,10	8.782,12	34,58
Triwulan II/2014	122.604,02	4.722,87	27,99

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Pada Triwulan II 2014, terdapat 4 proyek baru yang dipantau pelaksanaannya yaitu IP-564 *Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II)*, IP-565 *Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta E/S*, IP-566 *Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area-Phase II*, dan IP-567 *Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)*. Proyek IP-564 dan IP-565 masih dalam proses persiapan pra-kualifikasi. Proyek IP-567 belum dapat memulai lelang karena terdapat perbedaan penggunaan *e-proc* antara Kementerian PU (*full e-proc*) dan JICA (*semi e-proc*).

Proyek IP-524 *Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi/Progo River Basin and Mt. Bawakaraeng* merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air. Proyek ini berakhir pada tanggal 28 Juli 2014. Pekerjaan fisik proyek telah selesai, tetapi masih terdapat tagihan yang belum dibayarkan.

Pencapaian fisik atau output 19 (sembilan belas) pinjaman proyek pada Triwulan II 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Sebanyak 3 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 28.100,18 juta. Pinjaman tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development*, IP-549 *Development of World Class University At University of Indonesia*, dan IP-553 *Development of Bandung Institute of Technology*.

Penyerapan pinjaman JICA Triwulan II 2014 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar JPY 631,91 juta. Jumlah ini hampir 2 kali lipat jumlah penyerapan Triwulan II 2013. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan II 2013 dengan Triwulan II 2014 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemendikbud)
(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	7.718,47	396,74	5,23
Triwulan II/2014	10.352,11	631,91	8,96

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Pada Triwulan II 2014, proyek IP-541 telah menyelesaikan pekerjaan fisik Paket 1 pembangunan gedung dan pembelian peralatan untuk Gedung Arsitektur dan Sipil tetapi terdapat *external work* yang belum selesai. Proyek juga telah menyelesaikan Paket Beasiswa Luar Negeri dan sedang mengerjakan Paket Beasiswa Dalam Negeri (8 orang). Terdapat masalah dalam pengerjaan Paket Beasiswa Dalam Negeri karena masa studi peserta telah melebihi 8 semester (melebihi kesepakatan dalam MOD). Pelaksana proyek perlu mengirim surat kepada JICA untuk mendapatkan masukan terkait temuan BPKP mengenai pembayaran beasiswa (*fellowship*) yang melampaui 6 semester (sampai dengan 8 semester). Selain itu, proyek telah mengajukan revisi DIPA untuk menyelesaikan program *short term course*.

- **Kementerian Perhubungan**

Terdapat 5 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 105.102,00 juta dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terdiri atas 1 proyek yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Laut dan 4 proyek yang dikelola oleh Ditjen Perkeretaapian. Terdapat 2 proyek baru yang dipantau pelaksanaannya di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan yaitu IP-562 *Railway Double Tracking on Java South Line Project (IV) (Kroya - Kutoarjo Phase II)* dan IP-563 *Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I*.

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar JPY 14.056,50 juta atau 13,37% dari total pinjaman. Persentase penyerapan yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada Triwulan II 2014 lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2013. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan II 2013 dengan Triwulan II 2014 di Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemenhub)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	9.946,36	1.277,16	3,25
Triwulan II/2014	14.056,50	1.543,61	7,21

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Proyek IP-508 *Railway Electricity & DD Tracking Project* mengerjakan 4 paket kontrak pada Triwulan II 2014. Pelaksana proyek telah melaksanakan lelang untuk paket B2(1) tetapi proses lelang dinyatakan gagal oleh panitia pengadaan karena hanya terdapat 1 peserta yang mengajukan dokumen penawaran. Pelaksanaan fisik konstruksi dan supervisi untuk paket B1 telah berjalan.

Proyek IP-548 *Double Tracking on Java South Line Project* masih menunggu *concurrence* dari JICA untuk jasa supervisi. Negosiasi kontrak untuk paket *civil work and track work* belum selesai sampai dengan akhir Triwulan II 2014.

Pencapaian fisik atau output 5 (lima) pinjaman proyek pada TA 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Terdapat 1 (satu) pinjaman proyek dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu IP-542 *ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province*. Dari 6 indikator kinerja output, sebanyak 4 indikator kinerja output sudah selesai pada tahun 2012 dan 2 indikator output masih dalam proses penyelesaian yaitu Paket 3 pengadaan peralatan untuk 150 sekolah dan jasa konsultasi. Pekerjaan Paket-3 sudah selesai dikerjakan, tetapi pihak kontraktor belum mengajukan *invoice* karena belum adanya kesepakatan mengenai denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Pada TA 2014, proyek IP-542 belum melakukan penarikan pinjaman:

Tabel 2.16 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemenkominfo)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	1.083,22	0,00	0,00
Triwulan II/2014	1.181,24	0,00	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

- **Badan Informasi Geospasial**

Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan 1 (satu) pinjaman proyek yaitu IP-544 *National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project*. Proyek menargetkan akan menyelesaikan semua paket pada Tahun Anggaran 2014. Pada Triwulan II 2014 proyek IP-544 telah melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 625,85 juta.

Tabel 2.17 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (BIG)

(juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	4.239,34	178,67	9,21
Triwulan II/2014	5.405,19	625,85	50,94

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Bappenas melaksanakan 2 (dua) pinjaman proyek yaitu IP-535 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP)–III* dan IP-568 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP)–IV*. Proyek IP-568 merupakan kelanjutan dari proyek IP-535.

Pada Triwulan II 2014, kedua proyek tidak melakukan penarikan pinjaman sehingga jumlah pinjaman yang telah ditarik pada TA 2014 sama dengan Triwulan I yaitu sebesar JPY 143,01 juta. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan II 2013 dengan Triwulan II 2014 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Bappenas)
(juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	6.102,73	155,90	16,65
Triwulan II/2014	6.665,63	143,01	17,57

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Kinerja Pinjaman Proyek yang Diterushibahkan (*On-Granting*)

- **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Pada Triwulan II 2014, terdapat 2 (dua) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu IP-536 *E/S Jakarta Mass Rapid Transit System* dan IP-554 *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project*. Pada Triwulan II 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 734,11 juta.

Tabel 2.19 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Pemda DKI)
(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	-	-	-
Triwulan II/2014	10.983,80	734,11	3,98

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Proyek IP-536 *E/S Jakarta Mass Rapid Transit System* sedang mengerjakan paket MCS dan ditargetkan akan selesai pada bulan Oktober 2014. Proyek ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Kinerja Pinjaman Proyek yang Diteruspinjamkan (SLA)

Pada Triwulan II 2014 terdapat 12 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh BUMN melalui penerusanpinjaman (SLA) dengan nilai pinjaman JPY 237.655,00 juta. Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan oleh PT. PLN sebanyak 11 pinjaman proyek dan PT. Pertamina sebanyak 1 (satu) pinjaman proyek.

- **PT. PLN**

Terdapat 10 (sepuluh) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan total pinjaman sebesar JPY 152,01 miliar. Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar JPY 38.544,98 juta. Pada Triwulan II, PT. PLN telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar 2.064,98 juta atau 29,09% dari target penarikan pinjaman TA 2014. Persentase penyerapan Triwulan II 2014 lebih besar dibandingkan penyerapan Triwulan II 2013.

Tabel 2.20 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (PT. PLN)

(Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	88.705,28	3.959,96	18,17
Triwulan II/2014	38.544,98	2.064,98	29,09

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Proyek IP-525 *Ulubelu Geothermal Power Plant* telah menyelesaikan pekerjaan fisiknya pada Triwulan II 2014. Proyek berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Proyek akan dilanjutkan dengan menggunakan anggaran PT. PLN.

Proyek IP-537 *PLN Operation Improvement System* telah mengirimkan surat kepada JICA pada tanggal 19 Juni 2014 yang menyatakan bahwa PT. PLN menghentikan pinjaman dan akan melanjutkan proyek dengan dana PT.PLN.

Pelaksana proyek proyek IP-538 *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction* telah menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk Lot IV *transmission line* dan dalam proses pembayaran dengan menggunakan DIPA 2014. PT. PLN mengalami masalah terkait ijin penambahan lahan di 3 Kabupaten (Aceh Tengah, Bener Merah, dan Bireuen) yang dilalui jalur transmisi. Salah satu penyebab keterlambatan tersebut adalah protes dari masyarakat. PT. PLN akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk menangani komplain dari masyarakat.

Pencapaian fisik atau output 11 (sebelas) pinjaman proyek pada TA 2014 yang dilaksanakan oleh PT. PLN dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

- **PT. Pertamina**

PT. Pertamina melaksanakan 1 pinjaman proyek yaitu IP-557 *Lumut Balai Geothermal Power Plant*. Pada Triwulan II, proyek sedang dalam tahapan proses lelang Evaluasi Teknik atas Dokumen Penawaran. Persetujuan dari JICA terkait hal tersebut mengalami kemunduran hingga tanggal 24 Juni 2014. Pada Triwulan II 2014, PT. Pertamina telah melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 38,95 juta atau 2,79% dari target penarikan pinjaman TA 2014.

Tabel 2.21 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan II Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (PT. Pertamina)

(Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan II/2013	275,87	75,86	2,81
Triwulan II/2014	361,09	38,95	2,79

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

1.2 Progress Variant Proyek ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II 2014 diketahui terdapat 13 proyek pinjaman JICA yang berada pada kategori *at risk* ($PV \leq -30$). Proyek pinjaman JICA yang masuk kategori *at risk* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Progress Variant Proyek Pinjaman JICA

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013		TA 2014	
					TW III	TW IV	TW I	TW II
1	IP-508	Railway Electrification and D.D. Tracking Project I	13/12/2001	11/019/2016	-69,58	-68,35	-70,02	-71,71
2	IP-548	Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III	25/07/2008	25/07/2016	-61,35	-64,50	-67,58	-70,69
3	IP-532	Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III	15/05/2007	15/05/2017	-56,41	-59,04	-61,77	-64,47
4	IP-537	PLN Operation Improvement System for Support	15/05/2008	26/01/2018	-46,97	-49,76	-52,50	-54,47
5	IP-539	North-West Sumatera Inter-Connector Transmission	26/01/2009	26/01/2019	-49,41	-49,88	-48,84	-51,20
6	IP-531	Tanjung Priok Acces Road Construction Proj.II	01/04/2006	30/06/2013	-48,50	-45,53	-47,13	-47,87
7	IP-542	ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement	29/03/2007	29/05/2015	-42,47	-42,19	-45,21	-48,26
8	IP-552	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose	28/07/2009	28/07/2015	-41,81	-38,90	-41,39	-36,98
9	IP-553	Development of Bandung Institute of Technology	28/07/2009	30/09/2018	-39,92	-42,05	-38,56	-41,01
10	IP-558	Regional Solid Waste Management for Maminasata	01/09/2010	01/09/2018	-33,11	-36,06	-39,14	-42,03
11	IP-529	Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. I	28/07/2005	28/01/2015	-39,98	-36,41	-36,95	-39,41
12	IP-551	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	28/07/2009	28/07/2017	-39,37	-34,93	-34,40	-33,08
13	IP-545	Aceh Reconstruction Project	29/03/2007	26/07/2017	-29,22	-28,55	-29,49	-31,90

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Proyek IP-552 tercatat termasuk at risk dengan PV: -36,98. Hal ini disebabkan pelaksana proyek tidak akan memanfaatkan seluruh dana pinjaman sebagai konsekuensi perubahan desain dan penggunaan material.

1.3 Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

Terdapat 4 proyek pinjaman JICA yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan dana pinjaman proyek JICA yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.23 Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik

(Juta JPY)

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Pinjaman Belum Ditarik		Keterangan
					Nilai	%	
1	IP-525	Ulubelu Geothermal Power Plant	28/12/2005	30/06/2014	4.207,85	20,74	Proyek tidak akan diperpanjang dan akan dilanjutkan dengan anggaran PT. PLN.
2	IP-524	Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi	28/07/2005	28/07/2014	21,98	3,62	Pekerjaan fisik sudah selesai. Proyek akan diperpanjang untuk menyelesaikan pembayaran.
3	IP-543	Regional Infrastructure for Social & Economic Dev	29/07/2007	29/07/2014	3.062,26	13,02	-
4	IP-536	E/S Jaskarta Mass Rapid Transit System	22/03/2007	31/12/2014	604,98	32,37	Pekerjaan ditargetkan akan selesai pada bulan Oktober 2014.

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pada Triwulan II 2014, masalah yang cukup menonjol dan menghambat pelaksanaan proyek adalah masalah DIPA, pengadaan lahan, pengadaan barang dan jasa.

Masalah terkait DIPA yang muncul adalah jumlah alokasi anggaran di DIPA tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan rencana kerja pelaksana teknis proyek. Proyek yang mengalami masalah ini telah mengajukan revisi DIPA 2014 dan sedang menunggu proses revisi tersebut.

Masalah **administrasi/pengesahan DIPA** menjadi masalah yang cukup serius di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, dan PT. PLN.

Proyek IP-534 *Integrated Water Resources & Flood Management* merupakan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum yang mengalami kekurangan anggaran pada DIPA 2014. Pelaksana proyek membutuhkan anggaran tambahan yang semula diperkirakan Rp 7,2 milyar menjadi Rp 14 milyar. Pelaksana proyek telah mengajukan revisi DIPA 2014.

Masalah pengesahan DIPA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terjadi pada proyek IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development Project*. Pelaksana proyek membutuhkan tambahan anggaran untuk menyelesaikan program *short term course*. Revisi DIPA 2014 telah diajukan ke DIKTI dan BPKLN.

Permasalahan DIPA di Kementerian Perhubungan terjadi pada proyek IP-521 *The Urgent Rehab. Project of TJ. Priok Port* dan IP-563 *Jabodetabek Railways Capacity Enhancement - Phase I*. Kedua proyek mengalami kekurangan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan fisik di TA 2014.

Masalah **pengadaan barang dan jasa** terjadi pada proyek IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development Project*. Proyek belum mencapai keputusan mengenai pelaksanaan pemaketan pengadaan barang dan jasa untuk komponen paket 2 *construction, equipment, dan furniture*. Pelaksana proyek masih meminta arahan dari LKPP untuk menyelesaikan masalah ini.

Masalah **pengadaan lahan** terjadi pada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan PT. PLN. Pada Triwulan II 2014, masalah pengadaan lahan di Kementerian Pekerjaan Umum terjadi pada proyek IP-522 *Lower Solo River Improvement Project II*, IP-523 *Komering Irrigation Project Stage Phase II*, IP-551 *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities*, dan IP-558 *Regional Solid Waste Management for Mamminasata*. Masalah terjadi karena terdapat lahan yang belum dibebaskan yang disebabkan oleh belum tersedianya anggaran untuk pembebasan lahan, kesepakatan dengan pemerintah daerah, dan masalah sosial dengan masyarakat.

Pengadaan lahan di PT. PLN sudah mengalami kemajuan dan sedang dalam proses pengurusan perijinan seperti pada proyek IP-539 *North-West Sumatera Inter-Connector Transmission Line*. Akan tetapi, terdapat proyek di PT. PLN yang belum mengalami kemajuan sejak TA 2013 dan membutuhkan perhatian serta kerja sama dengan pemerintah daerah. Proyek tersebut antara lain IP-538 *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction*, IP-532 *Construction of Asahan 3 HEPP*, IP-560 *Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)*, dan IP-

561 *Indramayu Coal Fire Power Plant*. Masalah terjadi pada proses pengadaan lahan yang terkait dengan masalah perijinan dan negosiasi kepada warga maupun Pemerintah Daerah.

Australia

Pinjaman dari Pemerintah Australia yang efektif dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II TA 2014 adalah proyek EINRIP (*Eastern Indonesia National Road Improvement Project*) dengan nilai pinjaman sebesar AUD 300,00 juta (ekuivalen USD 282,35 juta). Proyek EINRIP bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan 20 paket kegiatan tersebar di 9 Provinsi, lembaga pelaksana adalah Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Proyek EINRIP dalam TA 2014 target penyerapan sebesar AUD 19,94 juta (ekuivalen USD 18,77 juta) dan realisasi penyerapan pada Triwulan II TA 2014 sebesar AUD 6,26 juta (ekuivalen 5,89 USD juta). Penyerapan kumulatif pinjaman Australia hingga bulan Juni tahun 2014 mencapai AUD 248,38 juta (82,79%), sehingga sisa dana pinjaman yang belum ditarik sebesar AUD 51,62 juta.

Pelaksanaan pekerjaan EINRIP hingga saat ini telah menyelesaikan 2 dari 3 target indikator kinerja output, antara lain penyiapan proyek EINRIP (identifikasi, FS, *Screening*, *Design*, *Document*) dan pengadaan rangka baja AWP 1. Progres pelaksanaan indikator kinerja output lainnya, yaitu “pelaksanaan konstruksi EINRIP” masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan dengan target selesai pekerjaan kegiatan berbeda-beda.

1.2 Progress Variant Proyek ≤ -30

Sampai dengan Triwulan II TA 2014, proyek EINRIP memiliki PV sebesar -9,83 yang berarti realisasi penyerapan pinjaman yang bersangkutan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan sehingga perlu percepatan pelaksanaan.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Secara umum, terdapat isu yang masih belum terselesaikan sejak kegiatan pemantauan proyek EINRIP triwulan sebelumnya, diantaranya:

- Beberapa paket mengalami masalah pemindahan tiang listrik dan pipa air bersih sehingga sedang diproses dengan instansi terkait.
- Pemerintah Australia mewajibkan untuk membuat sertifikasi tanah bagi seluruh lahan yang dilalui dan terkena proyek pembangunan jalan, sebagaimana tertulis juga dalam perjanjian kerjasama Proyek EINRIP. Saat ini hampir seluruh sertifikasi lahan masih dikoordinasikan dengan Pemkab dan BPN.

Dari 20 paket kegiatan yang ditargetkan selesai sampai tahun 2014, baru 14 paket yang telah diselesaikan dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2014. Dari 6 paket tersebut, 3 paket yaitu ENT-01, ESS-05 dan ESS-06 diperkirakan tidak selesai hingga akhir Desember 2014, sehingga

kemungkinan diperlukan perpanjangan masa laku loan closing date untuk diperpanjang yang ketiga kali sampai 30 September 2015. Saat ini sedang diproses pengusulan perpanjangan tersebut.

Jerman

Pada Triwulan II Tahun 2014 terdapat 3 pinjaman proyek dari Pemerintah Jerman yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya yaitu: i) *Sustainable Economic Development through Tech and Vocational Education and Training (SED-TVET)*, ii) *Track Maintenance Improvement Programme*, dan iii) *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital*. Total nilai pinjaman ketiga proyek tersebut adalah sebesar EUR 62,78 juta dengan penyerapan kumulatif hingga Juni 2014 sebesar EUR 24,08 juta (38,35%) sehingga masih terdapat sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 38,70 juta.

Penanggung jawab (*executing agency*) SED-TVET adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan *Implementing Agency* adalah: i) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ii) Kementerian Perindustrian dan iii) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proyek tersebut memiliki durasi pelaksanaan selama 4 (empat) tahun yang dimulai sejak tanggal 15 Desember 2011 hingga 15 Desember 2015.

Instansi pelaksana proyek *Track Maintenance Improvement Programme* adalah Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Proyek ini telah mengalami 1 kali perpanjangan pelaksanaan dan masa laku pinjaman berakhir direncanakan akan berakhir pada 30 Juni 2016.

Instansi pelaksana proyek *The Improvement of the M. Hoesin Hospital* adalah Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Proyek ini telah mengalami 3 kali perpanjangan pelaksanaan dan masa laku pinjaman direncanakan akan berakhir pada 31 Desember 2014.

Tabel 2.24 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab
(Dalam Juta)

Instansi Pelaksana	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari–Maret)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Kemendikbud Kemenperindustrian Kemenakertrans	1	19,00	25,93	0,47	0,64	18,53	25,29	0,15	0,20	4,61
Kemenhub	1	32,50	44,35	12,34	16,84	20,16	27,51	0,00	0,00	0,00
Kemenkes	1	11,28	15,39	11,27	15,38	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Total	3	62,78	85,67	24,08	32,86	38,70	52,81	0,15	0,20	0,76

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Juni 2014 (1 EUR = 1,364525 USD)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Target penarikan pinjaman Jerman pada TA 2014 sebesar EUR 19,53 juta, dan realisasi penarikan pada periode Januari-Juni tahun 2014 adalah sebesar EUR 0,15 juta atau 0,76% dari target penarikan pinjaman TA 2014.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- *Sustainable Economic Development through Tech & Vocational Education and Training*

Nilai pinjaman proyek SED-TVET adalah sebesar EUR 19,00 juta dan hibah sebesar EUR 2 juta dengan realisasi penyerapan pinjaman Januari-Juni 2014 sebesar EUR 0,15 juta atau 4,61% dari target penarikan pinjaman TA 2014 sebesar EUR 3,23 juta.

Proyek ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas institusi, peningkatan penyediaan dan kemampuan tenaga kerja, dan serta peningkatan kualitas lulusan. Alokasi anggaran untuk masing-masing Instansi Pelaksana adalah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar EUR 7 juta (33%), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar EUR 5 juta (24%), Kementerian Perindustrian sebesar EUR 5 juta (24%), untuk Pekerjaan Konsultan sebesar EUR 2 juta (9,5%), kemudian sisanya adalah EUR 2 juta (9,5%) yang berasal dari hibah untuk pelatihan lanjutan guru.

Hingga saat ini, realisasi fisik untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi peralatan mencapai 25% dari target penarikan pinjaman TA 2014, proyek tersebut disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2014.

- **Kementerian Perhubungan**

- *Track Maintenance Improvement Programme*

Nilai pinjaman proyek *Track Maintenance Improvement Programme* adalah sebesar EUR 32,50 juta dengan penyerapan kumulatif hingga bulan Juni 2014 adalah sebesar EUR 12,34 juta (37,98%). Namun untuk Tahun Anggaran 2014 (periode Januari-Juni) penyerapan proyek ini masih 0% atau belum ada penyerapan dari target penarikan pinjaman TA 2014 sebesar EUR 15,89 juta.

Tujuan proyek adalah meningkatkan pemeliharaan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa. Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek *Track Maintenance Improvement Programme* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2014.

- **Kementerian Kesehatan**

- *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital*

Nilai pinjaman proyek *The Improvement of the Moehamad Hoesin Hospital* adalah sebesar EUR 11,28 juta dengan penyerapan kumulatif pinjaman mencapai EUR 11,27 juta atau 99,86% dan sisanya sebesar EUR 0,02 juta yang akan ditarik seluruhnya sampai proyek berakhir. Saat ini dalam penyelesaian kontrak konsultan supervisi untuk *maintenance* peralatan yang telang diinstal dengan masa garansi sampai dengan tahun 2014.

Proyek ini merupakan pengadaan peralatan kesehatan, *rezoning*, dan pelatihan bagi pegawai dan perawat rumah sakit Moh. Hoesin Palembang. Porsi pinjaman luar negeri sebesar EUR 11,28 juta dan porsi hibah sebesar EUR 1,5 juta. Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II 2014.

1.2 Progress Variant Proyek ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II TA 2014 diketahui bahwa terdapat proyek yang didanai dari pinjaman Pemerintah Jerman dengan kategori *at risk*, yakni proyek SED-TVET dengan progres varian menunjukkan angka -61,04, dan proyek *Track Maintenance Improvement Programme* dengan *progress variant* menunjukkan angka -31,33 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25 Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (Status Pada Triwulan I dan Triwulan II 2014)

Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2014	
				TW I	TW II
2007 66 071	<i>Sustainable Economic Dev't through Tech & Voc</i>	15/12/2011	15/12/2015	-55,60	-61,04
2005 66 612	<i>Track Maintenance Improvement Programme</i>	22/12/2009	30/06/2016	-27,51	-31,33

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Masalah yang cukup menonjol dalam pelaksanaan pinjaman proyek Jerman selama Triwulan II TA 2014 adalah masalah pencantuman DIPA, perpanjangan masa laku pinjaman, dan pengadaan barang dan jasa.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- *Sustainable Economic Development through Tech & Vocational Education and Training*

Pada proyek SED-TVET terdapat keterlambatan serius karena pada awal pelaksanaan proyek terdapat permasalahan pembahasan harmonisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan sehingga alokasi waktu yang tersedia sebagian telah terpakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk tahun 2014, dilakukan revisi DIPA karena ada kekurangan alokasi DIPA TA 2014 di masing-masing institusi pelaksana. Alokasi dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran uang muka pengadaan peralatan yang tender dan kontraknya akan dilaksanakan pada tahun ini. Saat ini revisi DIPA sudah diajukan masing-masing institusi pelaksana dan sedang berproses di Kementerian Keuangan.

- **Kementerian Perhubungan**

- *Track Maintenance Improvement Programme*

Closing date proyek *Track Maintenance Improvement Programme* telah diperpanjang yang semula berakhir pada 30 Juni 2014 diperpanjang menjadi 30 Juni 2016. Disamping itu ada realokasi dana sebesar EUR 700 ribu dari katagori *Contingency* ke *Consulting Services and Training*. Kementerian Keuangan telah meminta perhitungan kebutuhan anggaran proyek tersebut agar sisa dana pinjaman yang tidak akan terpakai dapat *cancel* untuk menghindari beban *commitment fee*. Permasalahan pada proyek ini adalah keterlambatan pekerjaan yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2013 yang masih berimbas hingga saat ini, yaitu adanya kegiatan perubahan standarisasi teknik jalan deret sehingga dibutuhkan tambahan jumlah konsultan, adanya perubahan lokasi *workshop* dari Solo ke Ngrombo, dan adanya lelang ulang untuk pekerjaan jasa konsultansi.

- **Kementerian Kesehatan**

- *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital*

Permasalahan pada proyek *The Improvement of Moh. Hoesin Hospital Palembang* adalah dibebankannya bea masuk oleh Bea dan Cukai untuk pengiriman barang tambahan (*sparepart*) karena pembebasan bea masuk untuk proyek-proyek yang didanai PHLN hanya dapat berlaku untuk barang-barang utama dan tidak dapat dilakukan pembebasan bea masuk untuk pengadaan *spare part* terkait pemeliharaan. Terkait masalah tersebut, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan dan diputuskan bea masuk barang tersebut akan dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan.

Korea

Pada Triwulan II TA 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari EDCF Korea sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan total pinjaman sebesar KRW 377.495,65 juta. Penarikan pinjaman secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan II TA 2014 sebesar KRW 57.926,99 juta atau 15,35% dari jumlah yang pinjaman.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Pada Triwulan II 2014, 2 dari 7 proyek yang dibiayai pemerintah Korea telah melakukan penarikan pinjaman yaitu sebesar KRW 840,88 juta atau 2,12% dari target penyerapan TA 2014. Kedua proyek tersebut adalah INA-19 *Construction of Karian Multipurpose Dam Project* dan INA-18 *Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police Project*.

Tabel 2.26 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta KRW)

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Proyek	Nilai pinjaman	Penarikan kumulatif		Pinjaman belum ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	2	178.378,95	2.606,48	1,46	175.772,47	23.346,82	341,48	1,46
2	Kemenkes	2	65.580,40	54.821,11	83,59	10.759,29	573,79	0,00	0,00
3	POLRI	2	80.121,78	499,40	0,62	79.622,38	14.175,18	499,40	3,52
4	Badan Otorita Batam	1	53.414,52	0,00	0,00	53.414,52	1.603,19	0,00	0,00
Total		7	377.495,65	57.926,99	15,35	319.568,66	39.698,97	840,88	2,12

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Proyek pinjaman Korea yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum meliputi 1 proyek dikelola Ditjen Sumber Daya Air dan 1 proyek dikelola oleh Ditjen Bina Marga.

- *INA-19 Construction of Karian Multipurpose Dam Project*

Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilakukan yaitu KRW 1.823,48 juta atau 1,64% dari total pinjaman. Pada TA 2014, proyek telah melakukan penarikan sebesar KRW 341,48 juta. Pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan akibat proses lelang ulang untuk paket *civil work*. Selain itu, terdapat paket kontrak yaitu paket *hydromechanical* yang akan digabung dengan paket *civil work*. Pelaksana proyek perlu berkonsultasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengajukan

permohonan persetujuan kepada EDCF. Karena target penyerapan TA 2014 tinggi, permasalahan dalam proses pengadaan ini berpotensi menyebabkan rendahnya penyerapan TA 2014.

- **EDCF INA-17 Padang By-Pass Capacity Expansion Project**
Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilakukan yaitu KRW 783,00 juta atau 1,17% dari total pinjaman. Proyek belum melakukan penyerapan pinjaman pada TA 2014.
- **Kementerian Kesehatan**
Terdapat 2 pinjaman proyek yang bersumber dari EDCF yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dengan total nilai proyek sebesar KRW 65.580,4 juta. Hingga Triwulan II 2014, proyek INA-10 *Strengthening of Teaching Hospital* dan INA-14 *Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan* belum melakukan penarikan pinjaman TA 2014.
 - **INA-10 Strengthening of Teaching Hospital**
Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar KRW 22.660,56 juta atau 95,34% dari total pinjaman. Proyek masih mengalami masalah pada pengadaan alat EO gas.
 - **INA-14 Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan**
Penyerapan kumulatif dana yang telah dilakukan sebesar KRW 32.160,55 juta atau 76,92% dari total pinjaman. Pelaksanaan fisik proyek telah selesai 100%. Pelaksana proyek mengalami masalah pembayaran untuk tahun 2013 yang tertunda karena menunggu revisi DIPA TA 2014. Masa berlaku pinjaman telah berakhir pada tanggal 27 Juli 2014. Pelaksana proyek akan mengajukan perpanjangan *Loan Agreement* untuk pembayaran masa pemeliharaan hingga 31 Desember 2014.
- **POLRI/Kepolisian Negara RI**
Terdapat 2 proyek pinjaman EDCF Korea yang dilaksanakan oleh POLRI yaitu INA-18 *Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police Project* dan INA-21 *Fast Patrol Boats for Indonesian National Police Project* dengan total pinjaman sebesar KRW 80.121,78 juta. Pada Triwulan II 2014, proyek INA-18 telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar KRW 499,4 juta.
- **Badan Otorita Batam**
Proyek INA-20 *Development of Sewerage System in Batam Island* belum melakukan penarikan pinjaman hingga Triwulan II 2014. Pada Triwulan II 2014, pelaksana proyek telah menyelesaikan dokumen AMDAL. Meskipun demikian proyek belum dapat dimulai karena belum ada persetujuan dari Walikota. Bappeda Kota Batam mengusulkan untuk menggunakan surat keterangan yang menyatakan bahwa proyek ini sudah siap agar pekerjaan proyek dapat segera dimulai.

1.2 Progress Variant Proyek ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II TA 2014 terdapat 3 (tiga) proyek pinjaman EDCF Korea yang berada pada kategori *at risk* ($PV \leq -30$) bahkan memiliki $PV \leq -50$. Kedua proyek tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.27 Progress Variant Proyek Pinjaman Korea

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013		TA 2014	
					TW III	TW IV	TW I	TW II
1	INA-17	<i>Padang By Pass Capacity Expansion Project</i>	14/04/2011	14/10/2015	-53,72	-59,17	-64,65	-70,18
2	INA-19	<i>Construction of Karian Multipurpose Dam Project</i>	14/02/2012	14/02/2018	-26,13	-29,96	-34,07	-37,91
3	INA-18	<i>Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police Project</i>	14/02/2012	14/11/2015	-	-	-56,68	-62,16

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

1.3 Pinjaman Proyek Korea yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

Terdapat 2 (dua) proyek pinjaman EDCF Korea yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014 yaitu proyek INA-10 dan INA-14. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan anggaran proyek pinjaman EDCF Korea yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28 Daftar Pinjaman Proyek Korea yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

(Dalam Juta KRW)

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	INA-10	<i>Strengthening of Teaching Hospital</i>	06/08/2007	31/12/2014	22.660,56	95,34	1.107,84	4,66
2	INA-14	<i>Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan</i>	27/05/2009	27/06/2014	32.160,55	76,92	9.651,45	23,08

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Rendahnya tingkat penyerapan pada Triwulan II 2014 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pada proyek INA-19 *Construction of Karian Multipurpose Dam Project* dan INA-10 *Strengthening of Teaching Hospital*.
- Administrasi pembayaran pada proyek INA-14 *Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan*. Pelaksanaan pekerjaan fisik proyek telah selesai namun proyek masih menunggu revisi DIPA 2014 untuk melakukan pembayaran.
- Proyek dalam tahap penyelesaian proses pengadaan yaitu pada proyek INA-21 *Fast Patrol Boats for Indonesian National Police Project* dan INA-20 *Development of Sewerage System in Batam Island* (jasa konsultansi) serta proyek EDCF INA-17 *Padang By-Pass Capacity Expansion Project* (jasa konstruksi).

Perancis dan AFD

Pada Triwulan II TA 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Perancis dan AFD yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya. Jumlah total masing-masing sumber pendanaan pinjaman proyek tersebut adalah sebesar EUR 204,3 juta dari Pemerintah Perancis, dan sebesar USD 129,5 juta dari AFD.

Target penarikan pinjaman Perancis pada Tahun Anggaran 2014 sebesar EUR 26,44 juta, dengan realisasi pinjaman Perancis pada periode Januari-Juni tahun 2014 sebesar EUR 4,48 juta atau 16,96%.

Target penarikan pinjaman AFD Tahun Anggaran 2014 sebesar USD 34,5 juta, dan realisasi pinjaman AFD pada periode Januari-Juni tahun 2014 sebesar USD 0 juta atau 0%.

Tabel 2.29 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari-Juni)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
BMKG	1	30,30	41,35	19,23	26,24	11,07	15,11	4,48	6,11	23,33
Kem. Perhubungan	2	126,00	171,94	0,00	0,00	126,00	171,94	0,00	0,00	0,00
Kem. Kominfo	1	48,00	65,50	0,00	0,00	48,00	65,50	0,00	0,00	0,00
Total	4	204,30	278,79	19,23	26,24	185,07	252,55	4,48	6,11	16,96

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Juni 2014 (1 EUR = 1,364525 USD)

Tabel 2.30 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	Penarikan TA 2014 (Januari-Juni)	
		USD	USD	USD	USD	%
Kem. Kelautan & Perikanan	1	30,00	8,56	21,44	0,00	0,00
PT. PLN	2	99,50	30,44	69,07	0,00	0,00
Total	3	129,50	39,00	90,50	0,00	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Penyerapan kumulatif 4 (empat) proyek pinjaman Perancis (termasuk 1 proyek *co-financing* dengan AFD) adalah sebesar EUR 19,23 juta (9,41%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 185,07 juta (90,59%). Dalam periode Januari-Juni 2014 terdapat penarikan sebesar EUR 4,48 juta (16,96% dari target yang telah ditetapkan).

Penyerapan kumulatif 3 proyek pinjaman AFD sebesar USD 39 juta (30,12%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 90,5 juta (69,88%). Hingga periode Januari-Juni 2014 masih belum ada penarikan pinjaman (0% dari target yang telah ditetapkan).

- **Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika**

- *Strengthening of BMKG Climate and Weather Services*

Proyek ini bertujuan untuk penguatan infrastruktur dan sistem informasi Meteorologi BMKG dalam rangka mengembangkan peringatan iklim dan cuaca secara ekstensif dan layanan kepada masyarakat untuk sektor ekonomi, sektor transportasi dan sektor pertanian serta sektor lainnya yang terkait.

Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 30,30 juta. Rencana pencapaian *output* TA 2014 proyek *Strengthening of BMKG Climate and Weather Services* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2014. Realisasi target pencapaian fisik tahun 2014 untuk pembelian peralatan, pembangunan sistem, dan pelatihan personil mencapai 53,06% dari keseluruhan pekerjaan proyek. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 63,45% dari total pinjaman.

- **Kementerian Perhubungan**

- ***Bandung Urban Railway Transport Development***

Proyek ini bertujuan untuk Peningkatan jalur kereta api dan penyusunan kembali tata letak stasiun kereta api, menambah stasiun menengah untuk peningkatan kualitas sinyal dan sistem telekomunikasi, Elektrifikasi jalur rel kereta Padalarang-Cicalengka, Peningkatan sistem persinyalan dan pembangunan depot dan workshop untuk pemeliharaan fasilitas.

Proyek ini dibiayai oleh 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu Pemerintah Perancis (Natixis) dan AFD dengan nilai pinjaman masing-masing adalah EUR 80 juta berasal dari Natixis dan EUR 46 juta yang berasal dari AFD. Pelaksanaan pekerjaan untuk porsi pendanaan AFD di fokuskan pada kegiatan Jasa Konsultansi dan Konstruksi *Elevated Structure*, dan porsi pendanaan Natixis di fokuskan pada kegiatan Konstruksi dan Elektrifikasi. Pelaksanaan pekerjaan akan dimulai dari pekerjaan yang berasal dari pendanaan AFD, kemudian pelaksanaan pekerjaan direncanakan paralel antara pekerjaan yang berasal dari pendanaan AFD dan pendanaan Natixis. Pelaksanaan pekerjaan yang didanai oleh AFD saat ini sudah dilaksanakan prakualifikasi lelang konsultan, telah disampaikan dokumen prakualifikasi lelang pada tanggal 28 April 2014. Pada Triwulan II TA 2014 belum ada realisasi pencapaian output baik konsultansi maupun konstruksi, diperkirakan pekerjaan konsultansi yang dibiayai dari porsi pinjaman AFD baru dimulai pada bulan November 2014. Pihak Satker sedang melakukan proses seleksi untuk jasa konsultansi dengan ruang lingkup yaitu penyusunan *detailed design, tender assistance* dan supervisi untuk konstruksi *viaduct* 4,1 km, di mana saat ini sedang dalam tahap persetujuan *short list* di Ditjen Perkeretaapian.

Sedangkan untuk pekerjaan yang didanai oleh Natixis, saat ini pihak Satker sedang melakukan persiapan untuk proses seleksi konsultan dengan ruang lingkup yaitu manajemen *interface, technical studies, tender assistance* dan supervisi untuk pekerjaan jalur ganda, sintel dan elektrifikasi Padalarang-Gedebage. Sedang dalam tahap finalisasi TOR.

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika**

- ***The Improvement on Television Transmitting Station***

Proyek ini bertujuan untuk Melakukan perbaikan dan peningkatan stasiun transmisi TV secara turnkey, mencakup: survey, pengadaan, *dismantle* barang lama, instalasi, testing, *commissioning*, pelatihan, bantuan teknis dan pemeliharaan dari perangkat transmisi, fasilitas pendukung, dan infrastruktur di 60 lokasi. Pelaksanaan pekerjaan saat ini sudah dilaksanakan prakualifikasi lelang. Hingga Triwulan II TA 2014 belum ada realisasi pencapaian output baik konsultansi maupun konstruksi.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- ***Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)***

Proyek ini bertujuan untuk mendukung program-program kelautan dan perikanan di dalam mengembangkan stasiun penerima data yang dipergunakan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan internasional di masa depan. Nilai pinjaman untuk proyek ini adalah sebesar USD 30 juta.

Pengelolaan sumber daya kelautan oseanografi perlu didukung oleh 3 komponen penting; pengamatan berbasis ruang, pengamatan in-situ, dan biokimia laut dan permodelan fisik. Ketiga unsur tersebut diperlukan untuk memahami dinamika laut dan menggunakannya untuk meramalkan fenomena alam. Rencana pencapaian output proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2014. Realisasi target pencapaian fisik tahun 2014 untuk pembangunan infrastruktur, sistem, dan manajemen proyek mencapai 13,44% dari keseluruhan pekerjaan proyek. Sedangkan penyerapan kumulatif anggaran mencapai 28,55% dari total pinjaman.

- **PT. PLN**

- ***Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement***

Kegiatan *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement* sangat dibutuhkan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik yang cukup tinggi dan terbatasnya investasi perluasan jaringan distribusi dan suplai PT. PLN. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem distribusi PT. PLN melalui peningkatan efisiensi dan kualitas. Proyek ini merupakan proyek *co-financing* antara AFD dan ADB, jumlah pinjaman luar negeri dari pendanaan yang berasal dari AFD sebesar USD 50 juta. Pada Triwulan II 2014 belum ada realisasi target pencapaian fisik untuk pengadaan peralatan, instalasi dan konsultasi. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 35,57% dari total pinjaman.

- ***Strengthening West Kalimantan Power Grid***

Proyek ini bertujuan untuk efisiensi biaya operasi bisnis dan distribusi PLN di Kalimantan Barat. Pelaksanaan proyek ini mencakup 3 (tiga) aspek pekerjaan: pembangunan 275 kV jaringan transmisi; meningkatkan jaringan transmisi 150KV di Kalimantan Barat; dan membangun model jaringan baru untuk meningkatkan akses listrik untuk rumah tangga. Proyek ini merupakan proyek *co-financing* antara AFD dan ADB, jumlah pinjaman luar negeri sebesar USD 49,5 juta. Pada Triwulan II TA 2014 belum ada realisasi pencapaian output baik untuk pelaksanaan jasa konsultasi maupun konstruksi.

1.2 Progress Variant Proyek ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II TA 2014 diketahui bahwa proyek *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* memiliki *progress variant* sebesar -54,93.

1.3 Pinjaman Proyek AFD yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

Terdapat 1 proyek pinjaman AFD yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014 yaitu proyek *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement*. Proyek ini berakhir pada

tanggal 31 Oktober 2014, namun direncanakan akan diperpanjang hingga akhir 2015. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan anggaran proyek pinjaman AFD yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31 Daftar Pinjaman Proyek AFD Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

(Ekuivalen Juta USD)

Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	
				Jumlah	%	Jumlah	%
CID 1019 01 F	<i>Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement</i>	15/04/2011	31/10/2014	17,79	35,57	32,22	64,43

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Masalah yang cukup menonjol dalam pelaksanaan pinjaman proyek Perancis dan AFD selama Triwulan II 2014 adalah terkait masalah teknis pelaksanaan proyek dan pencantuman DIPA. Permasalahan teknis pada proyek *Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity* adalah belum dapat terbitnya SP3 karena belum berhasilnya DJPU, Kemenkeu meng-upload data SP4HLN kedalam aplikasi SPAN. Menindaklanjuti hal tersebut BMKG telah berkoordinasi secara optimal dengan Dit EAS, DJPU, Kemenkeu.

Pada proyek *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement* terdapat permasalahan terkait mekanisme penarikan pinjaman dimana pinjaman yang berasal dari AFD memiliki batas waktu yang tidak sama (lebih pendek) dari pada pinjaman yang berasal dari ADB. Untuk mengatasi hal tersebut PT. PLN telah mengajukan *explanatory notes* yang mengusulkan i) perpanjangan masa laku pinjaman baik yang bersumber dari ADB, maupun AFD, ii) membatalkan sebagian pinjaman USD 4,46 juta porsi AFD dan iii) realokasi kategori pinjaman. Setelah melakukan koordinasi dan diskusi dengan institusi terkait, Bappenas telah memberikan persetujuan untuk usulan perpanjangan *Loan Agreement* AFD sampai dengan 30 Juni 2015 dan *Loan Agreement* ADB sampai dengan 30 November 2015. Disamping itu Bappenas menyetujui usulan pembatalan sebagian pinjaman dari AFD sebesar USD 4,46 juta dan realokasi pinjaman. Khusus mengenai mekanisme *front loading* (penarikan porsi AFD terlebih dahulu dapat dilakukan selama dokumen pendukung (seperti amandemen kontrak, *credit agreement* dan *work annual plan*) untuk proses tersebut telah dipenuhi oleh PT. PLN. Saat ini PT. PLN sedang berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pada proyek *Strengthening West Kalimantan Power Grid* terdapat permasalahan pembebasan lahan untuk 6 (enam) *tower* transmisi di beberapa lokasi yang termasuk dalam kawasan hutan produksi. Akan dilakukan revisi DIPA SLA untuk mengakomodir kebutuhan pengadaan peralatan yang semula direncanakan pada bulan Desember 2014, dimajukan menjadi bulan Agustus 2014.

Pada proyek *Infrastructure Development Space Oceanography* (INDESO) terdapat kekurangan DIPA 2014, terkait hal tersebut Kementerian KKP mengajukan untuk melakukan revisi DIPA 2014.

RR Tiongkok

Pada Triwulan II tahun 2014, terdapat 5 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah RR Tiongkok yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan jumlah total nilai pinjaman sebesar USD 531,89 juta. Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (4 proyek) dan PT. PLN (1 proyek). Penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2014 sebesar USD 156,89 juta atau 29,5% dari jumlah yang pinjaman, sehingga pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 375 juta (70,5%).

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Pada Triwulan II 2014, terdapat satu proyek baru yang dipantau pelaksanaannya yaitu 21661901 *Parit Baru Coal Fired System Power Plant Project*. Proyek tersebut dilaksanakan oleh PT. PLN. Pada Triwulan II, proyek telah melakukan penarikan pinjaman sebesar USD 3,18 juta atau 5,25% dari target penarikan pinjaman TA 2014.

Penarikan pinjaman pada Triwulan II 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan Triwulan I 2014. Semua proyek sudah melakukan penarikan pinjaman dengan total penarikan sebesar USD 71,33 juta. Proyek 21595701-31 *Additional Loan for Jatigede Dam* melakukan penyerapan yang paling besar hingga Triwulan II 2014 yaitu sebesar USD 43,96 juta.

Tabel 2.32 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman RR Tiongkok menurut Instansi Penanggung jawab

(Dalam Juta USD)

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan kumulatif		Pinjaman belum ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	4	399,71	153,71	38,46	246,00	96,21	71,33	74,14
2	PT. PLN	1	132,19	3,18	2,40	129,01	60,46	3,18	5,25
Total		5	531,89	156,89	29,50	375,00	156,67	74,51	47,56

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

• Kementerian Pekerjaan Umum

Sebanyak 4 pinjaman proyek yang bersumber dari RR Tiongkok dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yaitu 1 proyek oleh Ditjen Sumber Daya Air dan 3 proyek Ditjen Bina Marga. Pada Triwulan II 2014 terdapat kemajuan fisik pada proyek-proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

- 21660201 *Tayan Bridge Construction*

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 40,62 juta atau 60,38% dari total pinjaman. Pada Triwulan II 2014, proyek sedang mengerjakan jasa konstruksi pembangunan jembatan Tayan. Pelaksana proyek sedang memproses amandemen kontrak untuk beberapa komponen pekerjaan fisik. Proses pengajuan amandemen kontrak tersebut telah dibahas oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- 21662601 *Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll*

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 48,76 juta atau 52,43% dari total pinjaman. Pekerjaan fisik proyek telah mengalami kemajuan pada Triwulan II 2014. Akan tetapi pekerjaan fisik proyek masih terkendala masalah pembebasan lahan

tambahan untuk penguatan struktur jalan. Pelaksana proyek berencana memperpanjang kontrak terkait keterlambatan pengadaan lahan tersebut. Selain itu, proyek juga mengalami kekurangan anggaran pada DIPA 2014. Anggaran yang tersedia pada DIPA 2014 yaitu sebesar Rp 100 miliar sedangkan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 246 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran hingga bulan November 2014.

- **21663301 Toll Road Development of Medan-Kualanamu**
Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 20,37 juta (16,64%) dari total pinjaman. Pekerjaan fisik proyek mengalami peningkatan sebesar 16,22% dibandingkan triwulan sebelumnya. Pekerjaan fisik proyek masih terkendala masalah pengadaan lahan yang mengalami keterlambatan dalam proses serah terima. Akan tetapi masalah tersebut tidak berdampak pada pekerjaan fisik TA 2014 karena lahan yang belum dibebaskan baru akan digunakan untuk pekerjaan fisik TA selanjutnya. Proyek juga mengalami kekurangan anggaran pada DIPA 2014. Proyek akan melakukan revisi DIPA dari Rp 187 miliar menjadi Rp 284 miliar untuk membayar tagihan sampai bulan November 2014. Pelaksana proyek berencana akan melakukan perpanjangan kontrak terkait masalah pengadaan lahan.
- **21595701-31 Additional Loan for Jatigede Dam**
Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 43,96 juta atau 37,57% dari total pinjaman. Pada Triwulan II 2014, proyek melaksanakan 4 paket kontrak pekerjaan fisik yaitu pembangunan *maindam*, *spillway*, *power waterway*, dan *grouting*. Pelaksana proyek membutuhkan tambahan dana sebesar USD 53,2 juta untuk melanjutkan pekerjaan fisik pada TA 2014.
- **Pinjaman Proyek pada PT. PLN**
 - **21661901 Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project**
Proyek telah melakukan penyerapan pada Triwulan II 2014 yaitu sebesar USD 3,18 atau 2,4% dari total pinjaman. Pekerjaan fisik proyek terdiri dari 4 paket kontrak yaitu *civil works and structural works*, *mechanical works*, *electrical and I & C*, dan pekerjaan fisik lainnya. Hingga akhir Triwulan II 2014, pekerjaan fisik baru berjalan hingga 3,5%. Dalam pelaksanaannya, PT. PLN mengalami hambatan yaitu permasalahan teknis di lapangan yang menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan fisik.

1.2 Progress Variant Proyek ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan II TA 2014 diketahui terdapat 1 proyek pinjaman RR Tiongkok yang berada pada kategori *at risk* ($PV \leq -30$) yaitu proyek 21663301 Toll Road Development of Medan – Kualanamu. Meskipun demikian, proyek tersebut sudah menyerap pinjaman sebesar USD 6,69 juta (40,59%) pada Triwulan II 2014.

Tabel 2.33 Progress Variant Proyek Pinjaman RR Tiongkok

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013			TA 2014
					TW II	TW III	TW IV	TW I
1	21663301	Toll Road Development of Medan - Kualanamu	11/03/2013	12/06/2014	-44,32	-53,24	-72,89	-83,36

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

1.3 Pinjaman Proyek RR Tiongkok yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat 1 proyek yang dibiayai pinjaman RR Tiongkok berakhir masa berlakunya yaitu 21663301 *Toll Road Development of Medan – Kualanamu*. Proyek akan mengajukan perpanjangan masa laku pinjaman.

Tabel 2.34 Daftar Pinjaman Proyek RR Tiongkok yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	21663301	<i>Toll Road Development of Medan - Kualanamu</i>	11/03/2013	12/06/2014	20,37	16,64	6,69	40,59

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Box 3: Kunjungan Lapangan

Loan RR Tiongkok 21661901: Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project

Executing Agency: PT. PLN

Tujuan kunjungan lapangan:

Perjalanan kunjungan lapangan ke proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant dilakukan dalam rangka pemantauan ke lokasi proyek dan melihat perkembangan proyek.

Hasil kunjungan Lapangan:

Pada proyek PLTU Parit Baru, kontrak pelaksanaan kegiatan proyek ditandatangani pada 30 April 2011 antara PT. PLN (Persero) dengan *China Gezhouba Group Company Limited (CGGC)* dan telah terealisasi sejak 4 Juli 2013, dengan pembiayaan 85 persen dibiayai dari pinjaman *Consessional Expot-Import Bank of China*. Tujuan proyek adalah untuk menggantikan sejumlah PLTD yang selama ini menjadi andalan interkoneksi listrik di Kalimantan Barat. Berikut ini secara ringkas hasil survey lapangan pada proyek yang dikelola PT. PLN:

• **Status pelaksanaan:**

- Pekerjaan fisik proyek PLTU Parit Baru sampai dengan Mei 2014 mencapai 14,07%. Dari target sebesar 27,23%. Pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan karena tahap persiapan dan proses pengadaan (*procurement*) yang lama dari jadwal yang ditargetkan.
- *Disbursement* sampai dengan 13 Juni 2014 sudah mencapai 16,07% dari total pinjaman.
- Dalam hal perijinan, proyek ini sudah memiliki ijin penetapan lokasi dan ijin lingkungan (Kelayakan Lingkungan Hidup/ANDAL), sementara itu untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin terminal khusus/jetty masih dalam proses penyelesaian.
- Proyek ditargetkan akan selesai pada tahun 2016.



Gambar 1. Kondisi Lapangan Proyek PLTU Parit Baru

• **Kendala/rencana tindak lanjut:**

- Keterlambatan dalam proses *procurement*, maka pelaksanaan kegiatan perlu dipercepat agar kebutuhan pasokan listrik di Kalimantan Barat dapat dipenuhi.
- Terdapat lahan yang belum dapat dibebaskan, namun hal ini tidak mengganggu proses pengerjaan konstruksi proyek karena lahan tersebut dalam perencanaan akan digunakan sebagai lahan hijau atau untuk pengembangan PLTU di masa yang akan datang.
- Masalah teknis yang memperlambat pelaksanaan seperti pengerjaan pondasi lebih lama karena tanah di daerah proyek termasuk tanah rawa. Pengerjaan pondasi akan terus dikerjakan sesuai dengan target, sehingga perlu komitmen dari penanggung jawab dan pekerja.

Spanyol

Pada Triwulan II TA 2014, hanya terdapat 2 (dua) pinjaman proyek bersumber dari Spanyol yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, yaitu proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production* dengan nilai pinjaman sebesar EUR 14,7 juta dan *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* dengan nilai pinjaman sebesar EUR 24,86 juta.

Tabel 2.35 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari-Maret)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Kementerian PU	1	24,86	33,92	13,64	18,61	11,22	15,31	7,31	9,98	39,70
LIPI	1	14,70	20,06	9,18	12,53	5,52	7,53	0,00	0,00	0,00
Total	1	39,56	53,98	22,81	31,14	16,74	22,84	7,31	9,98	31,51

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 Juni 2014 (1 EUR = 1,364525 USD)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

Sampai dengan Triwulan II TA 2014, penyerapan kumulatif kedua proyek ini sebesar EUR 22,81 juta (57,67%), sedangkan pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar EUR 16,74 juta. Penyerapan untuk Tahun Anggaran sampai dengan Triwulan II mencapai EUR 7,31 juta (31,51% dari target yang telah ditetapkan).

- **LIPI**

- *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production*

Proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production* menyediakan peralatan laboratorium, *processing* pakan dan susu, serta penyiapan sarana fisik berupa gedung laboratorium peternakan seluas 1500 m², *Processing unit* untuk pakan ternak seluas 512 m², *unit processing* susu seluas 450 m², kandang ternak (108 m²), kandang otomatis (180 m²), prasarana lingkungan (1 paket) yang akan dibangun di Cibinong di Bogor. Disamping itu, untuk peningkatan sumber daya manusia terkait pelaksanaan kegiatan ini, akan dilakukan *training* yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu i) *operasional training program*, ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi dan operasional peralatan-peralatan, menangani peralatan-peralatan, memahami protocol dan mampu melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat tersebut, ii) *Overseas Training Program*, akan dilaksanakan di Spanyol selama 2 minggu, total jumlah peserta 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok (*Embryo Transfer dan Embryo Manipulasi, Feed Management, Dairy Product, Beef product dan Project Management*), iii) *Domestik Training Program*, yang akan dilaksanakan di Indonesia selama 8 minggu dengan jumlah peserta sebanyak 105 orang.

Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II TA 2014. Realisasi pencapaian fisik pengadaan peralatan laboratorium dan instalasi mencapai 64% dari keseluruhan pekerjaan proyek dan pengembangan SDM (Pelatihan) belum dapat dilaksanakan. Sedangkan, realisasi penyerapan anggaran mencapai 62,43% dari total anggaran.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- ***Bridge Material Supply for Bridge Replacement***

Proyek *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* bertujuan agar pembangunan jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar. Disamping itu, proyek ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas transportasi dasar untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan jalan dan jembatan akan dilaksanakan di beberapa propinsi di Indonesia, diantaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan II 2014. Realisasi pencapaian fisik untuk pengadaan barang mencapai 92,42% dari keseluruhan proyek, sedangkan untuk pekerjaan jasa services 93,27%.

1.3 Pinjaman Proyek Spanyol yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

Terdapat 1 proyek pinjaman Spanyol yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014 yaitu proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production*. Proyek ini berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan anggaran proyek pinjaman Spanyol yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36 Daftar Pinjaman Proyek Spanyol Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

(Dalam Juta EUR)

Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	
				Jumlah	%	Jumlah	%
LA.15.04.2011	<i>Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production</i>	20/10/2011	30/09/2014	9,18	62,43	5,52	37,57

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

- **LIPI**

- ***Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production***

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement* pada Triwulan II 2014 terkait masalah krisis ekonomi yang terjadi di Eropa termasuk Spanyol yang berimbas pada kontraktor Spanyol untuk proyek ini. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan padahal progres pekerjaan

fisik telah mencapai 70%. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kontraktor berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut dan telah bekerjasama dengan mitra lokal Indonesia untuk melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut hingga selesai. Namun, terdapat permasalahan administrasi pada saat dilakukan penagihan pembayaran atas pengiriman barang yang telah dilakukan. Pihak kontraktor telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut segera mengingat batas waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas (*closing date* pada bulan Desember 2014)

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- ***Bridge Material Supply for Bridge Replacement***

Sedangkan permasalahan pada proyek *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* pada Triwulan II 2014 adalah terkait pencantuman DIPA. Terdapat kekurangan alokasi anggaran proyek ini pada DIPA 2014 dimana kebutuhan anggaran sebesar Rp 298 Miliar, namun dalam DIPA tercantum sebesar Rp 135 Miliar. Proses revisi mengenai hal tersebut sedang dilakukan.

PROYEK FASILITAS KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING (LPKE/KSA)

Jumlah proyek Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE)/Kredit Swasta Asing (KSA) yang efektif dan sedang berjalan pada Triwulan II TA 2014 adalah sebanyak 56 proyek yang dikelola oleh 3 (tiga) instansi yaitu: Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebanyak 50 proyek, Kepolisian RI (Polri) 4 proyek, dan PT. PLN 2 proyek. Total nilai pinjaman LPKE/KSA bernilai USD 5,38 miliar. Adapun rekapitulasi pelaksanaan pinjaman KSA/LPKE menurut instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.37 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Target Penyerapan TA 2014
<i>Dilaksanakan oleh K/L</i>				
Kemenhan	50	5.229,93	2.769,87	1.086,75
Kepolisian RI	4	17,47	4,06	15,10
<i>Di SLA kan</i>				
PT. PLN	2	54,73	19,95	16,44
Total	56	5.302,13	2.793,88	1.118,29

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan : USD 1 = IDR 11.969,00

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Output

- **Kementerian Pertahanan**

Total nilai alokasi proyek LPKE/KSA Kemenhan yang sedang berjalan saat ini mencapai USD 6,07 miliar, dengan persentase terbesar terdapat pada alokasi Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tahun 2011-2014 sebesar 80,78%. Pada triwulan ini terdapat 4 kegiatan yang selesai dilaksanakan. Keempat kegiatan tersebut terdiri dari 2 kegiatan yang

dilaksanakan TNI AU dan 2 kegiatan TNI AL. Di samping itu, terdapat 2 kegiatan TNI AD yang efektif pada triwulan ini. Total penyerapan pinjaman kumulatif sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 mencapai USD 2,77 miliar atau 52,96% dari total komitmen pinjaman. Alokasi total PHLN Kemenhan pada tahun 2014 mencapai Rp 13,01 triliun atau ekuivalen USD 1,09 miliar

Tabel 2.38 Total Alokasi, Komitmen Pinjaman dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA
(Dalam USD)

No.	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi	Total Komitmen Pinjaman	Total Penyerapan Kumulatif
1	AKE 2002	11.176.000,00	9.499.600,00	0,00
2	AKE 2004	29.796.000,00	25.326.585,76	8.867.076,00
3	AKE 2005	212.200.000,00	186.917.798,53	91.477.079,83
4	APP 2006	296.500.000,00	252.696.332,40	239.628.538,22
5	APP 2008	39.000.000,00	33.782.297,37	23.375.222,88
6	APP 2009	578.750.000,00	494.402.030,58	397.253.752,14
7	PSP 2011-2014	4.906.260.000,00	4.227.311.330,47	2.009.272.538,94
Total		6.073.682.000,00	5.229.935.975,11	2.769.874.208,01

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan : USD 1 = IDR 11.969,00

Sementara itu, dari target penyerapan pinjaman luar negeri tahun 2014 sebesar IDR 13,01 triliun, Kemenhan berhasil menyerap pinjaman kumulatif sebesar Rp 11,17 triliun atau 85,89% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.39 Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014

(Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun Alokasi	Target TA 2014	Realisasi Penyerapan	
			Kumulatif	TW II
1	AKE 2002	13.007,34	0,00	0,00
2	AKE 2004		37,46	37,46
3	AKE 2005		74,03	14,63
4	APP 2006		278,93	14,71
5	APP 2008		118,36	71,23
6	APP 2009		316,18	136,78
7	PSP 2011-2014		10.347,73	4.532,58
Total		13.007,34	11.172,69	4.807,40

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

- **Kepolisian RI**

Total alokasi Pinjaman Luar Negeri Polri yang tercantum dalam DIPA TA 2014 mencapai Rp 1.699.268.000.000,00 atau ekuivalen USD 141,97 juta. Selain dialokasikan untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, anggaran PLN sebesar ini juga dialokasikan untuk proyek-proyek yang direncanakan efektif pada tahun 2014 ini.

Sementara itu, alokasi rupiah murni pendamping (RMP) mengalami revisi dari sebesar Rp 150 miliar (ekuivalen USD 12,53 juta) pada Triwulan II menjadi hanya Rp 20 miliar (ekuivalen USD 1,67 juta) pada triwulan ini.

Terkait proyek-proyek KSA/LPKE, pada Triwulan II ini terdapat 4 (empat) proyek yang sedang *on-going* dengan total alokasi KE sebesar USD 20,55 juta. Target penyerapan pada tahun 2014 untuk keempat proyek ini mencapai Rp 180,77 miliar atau ekuivalen USD 15,1

juta. Namun, seperti status triwulan sebelumnya pada Triwulan II ini pun keempat proyek tersebut belum melakukan penyerapan sama sekali (realisasi penyerapan 0%).

Tabel 2.40 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia

(Dalam Juta USD)

No.	Alokasi Tahun	Jumlah Alokasi	Total Komitmen Pinjaman	Total Penyerapan Kumulatif	Penyerapan TA 2014	
					Target	Realisasi
1	POLRI TA 2004	3,60	3,06	0,12	15,10	0,00
2	POLRI TA 2005	5,95	5,06	3,94		0,00
3	POLRI TA 2008	10,99	9,35	0,00		0,00
Total		20,55	17,47	4,06	15,10	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan : USD 1 = IDR 11.969,00

- **PT. PLN**

Jumlah proyek FKE yang dikelola PT. PLN mencapai 2 (dua) proyek dengan nilai pinjaman USD 54,73 juta. Kedua proyek tersebut adalah *Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4* dan *Scattered Transmissions and Substantions Package 8*. Proyek-proyek tersebut dibiayai dengan pinjaman JBIC melalui skema SLA (*subsidiary loan agreement*). Sampai dengan Triwulan II tahun 2014 penyerapan kumulatif untuk kedua proyek ini mencapai USD 19,95 juta atau 36,45% dari total pinjaman proyek. Pada tahun 2014 PT. PLN menargetkan total penyerapan untuk kedua proyek ini sebesar USD 16,44 juta.

Tabel 2.41 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN

(Dalam Juta USD)

No.	Nama Proyek	Jumlah Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Penyerapan TA 2014	
				Target	Realisasi
1	<i>Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4</i>	34,35	19,95	14,00	0,00
2	<i>Scattered Transmissions and Substantions Package 8</i>	20,38	0,00	2,44	0,00
Total		54,73	19,95	16,44	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Kedua proyek ini menggunakan mata uang Japanese Yen. Nilai kurs yang digunakan dalam laporan ini adalah USD 1 = JPY 101,305; USD 1=IDR 11.969,00

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

- Pengurangan alokasi rupiah murni pendamping (RMP) dari sebesar Rp 150 miliar (ekuivalen USD 12,53 juta) pada TW II menjadi hanya Rp 20 miliar (ekuivalen USD 1,67 juta) pada triwulan ini dapat menjadi masalah bagi pelaksanaan proyek-proyek Polri yang dibiayai LPKE/KSA. Anggaran sebesar Rp 20 miliar tersebut diperkirakan tidak dapat mencukupi kebutuhan dana rupiah pendamping untuk beberapa proyek baru yang akan efektif tahun 2014 ini.

Tindak Lanjut:

Pihak Polri telah mengajukan surat terkait revisi RMP ini kepada Kementerian Keuangan namun Kementerian Keuangan belum menyampaikan tanggapan atas surat tersebut sampai laporan ini disusun.

- Masa laku *Loan Agreement* Proyek Harsucad Pesawat (Alokasi KE Polri TA 2008) akan segera berakhir pada tanggal 17 Juli 2014 karena itu Polri diharapkan dapat segera memproses usulan perpanjangan masa laku *Loan Agreement* kepada instansi terkait.
- Proyek *Scattered Transmissions and Substations Package 8* yang dilaksanakan PLN perlu mendapat perhatian karena hingga Triwulan II 2014, kontrak proyek ini belum efektif meskipun *Loan Agreement* telah ditandatangani sejak 19 bulan lalu. Saat ini PLN sedang memproses amandemen kontrak untuk mengubah mekanisme pencairan pinjaman dari pembukaan *Letter of Credit* (L/C) menjadi pembayaran langsung (*direct payment*). Perubahan ini tidak memerlukan amandemen *Loan Agreement* (LA) karena dokumen perjanjian tersebut juga mengatur mekanisme *direct payment*.

Terkait pekerjaan fisik, PLN dan pihak kontraktor telah melakukan pengukuran tanah di Daan Mogot. Proses konstruksi baru dapat dilakukan apabila kontrak yang sudah diamendemen dinyatakan efektif. Sementara itu, untuk lokasi Semanggi Barat, sampai triwulan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerbitkan ijin penggunaan lokasi meskipun secara prinsip telah menyetujui rencana penggunaan lokasi ini untuk pembangunan gardu.

Tindak Lanjut:

Pembangunan gardu diperkirakan memakan waktu sekitar 1,5 tahun oleh karena itu PLN perlu mengantisipasi perpanjangan masa berlaku *Loan Agreement* yang akan berakhir pada 15 Mei 2015.

BAB III

KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pada Triwulan II TA 2014, terdapat 129 proyek hibah yang dilaporkan oleh 13 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah sebesar USD 969.302.817. Dari 13 Kementerian/Lembaga, Kementerian Pertanian mengelola 73 proyek dengan total nilai hibah sebesar USD 127.217.244, Kementerian Lingkungan Hidup mengelola 16 proyek dengan total nilai hibah USD 44.786.138 dan Kementerian ESDM mengelola 8 proyek dengan total nilai hibah USD 31.534.159. Rekapitulasi hibah berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen USD)

Instansi Penanggung Jawab	Hibah Lainnya*)			Hibah Langsung dalam Bentuk Uang			Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga		
	Jml	Nilai	Realisasi Penyerapan	Jml	Nilai	Realisasi Penyerapan	Jml	Nilai	Realisasi Penyerapan
Kemen PU	3	72.291.292	3.163.236	-	-	-	-	-	-
Kemendagri	1	521.110	-	1	173.000	26.021	1	800.000	-
Kemen LH	-	-	-	6	17.627.273	495.935	10	27.158.865	-
Kemenkeu	1	2.097.567	-	-	-	-	6	61.012.632	-
Kemen ESDM	1	12.547.646	-	1	1.661.558	-	6	17.324.955	-
Kemenkominfo	1	1.868.338	6.000	-	-	-	-	-	-
Kementan	4	6.537.104	815.881	50	6.754.917	-	19	113.925.223	-
Bappenas	4	15.505.876	479.241	1	600.000.000	3.847.384	-	-	-
DNPI	-	-	-	-	-	-	4	7.179.637	-
LIPI	1	61.935	-	5	938.342	567.653	-	-	-
BKKBN	1	445.356	118.225	-	-	-	-	-	-
BPOM	-	-	-	1	1.622.956	-	-	-	-
PPATK	-	-	-	-	-	-	1	1.247.235	-
Total	17	111.876.224	4.582.583	65	628.778.045	4.936.992	47	228.648.549	-
Total Jumlah Proyek	129								
Total Nilai Proyek	969.302.817								
Total Realisasi Penyerapan	9.519.574								

*Keterangan: *) Hibah Lainnya merupakan hibah yang tidak termasuk dalam kategori hibah langsung dalam bentuk uang maupun barang/jasa/surat berharga.*

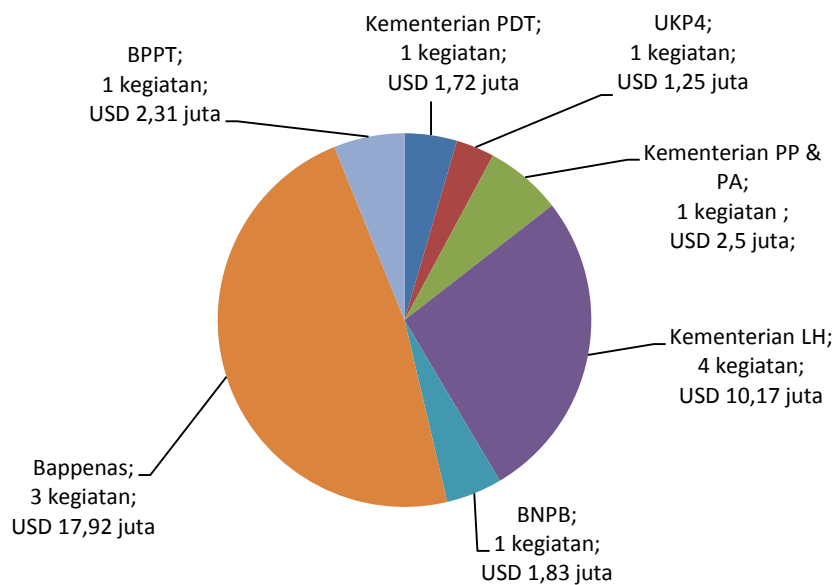
HIBAH LEMBAGA PBB

United Nations Development Programme (UNDP)

Pemantauan dan evaluasi terhadap hibah lembaga-lembaga PBB secara rutin mulai dilakukan sejak tahun 2013. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi tersebut agar dapat mengakomodasi tipe hibah lembaga-lembaga PBB yang cukup beragam.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hibah lembaga-lembaga PBB, disadari perlunya langkah-langkah yang sistematis untuk penguatan sistem pemantauan dan evaluasi tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2014 sebagai langkah awal, pemantauan dan evaluasi untuk hibah lembaga-lembaga PBB akan difokuskan pada kegiatan hibah yang terdaftar dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dengan ruang lingkup yang lebih fokus tersebut diharapkan perumusan langkah-langkah penguatan untuk sistem pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan. Pada tahap selanjutnya ruang lingkup pemantauan dan evaluasi hibah lembaga-lembaga PBB dapat diperluas.

Pada Tahun 2014 terdapat 11 (sebelas) kegiatan hibah dari lembaga-lembaga PBB yang masih aktif dan tercatat dalam DRKH, dengan total nilai hibah indikatif sebesar USD 37,69 juta. Kegiatan yang dibiayai hibah tersebut dilaksanakan oleh 7 Kementerian/Lembaga, untuk lebih jelasnya disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 3.1 Jumlah Hibah *On-going* Lembaga-lembaga PBB yang Tercatat dalam DRKH menurut Instansi Penanggung Jawab

Informasi umum mengenai kegiatan hibah yang dilaksanakan tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Hibah *On-going* Lembaga-lembaga PBB yang Tercatat dalam DRKH

No	Nama Kegiatan Hibah	Donor	Jumlah Hibah (USD ribu)
Kementerian Lingkungan Hidup (LH)			
1.	<i>Third National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i>	UNDP	4.561
2.	<i>National Biodiversity Planning to Support the Implementation of CBD 2011-2020 Strategic Plan in Indonesia</i>	UNDP & GEF	510
3.	<i>Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities in Nusa Tenggara Timur (SPARC)</i>	UNDP	5.100
Kementerian PPN/Bappenas			
4.	<i>Strengthening Access to justice in Indonesia (SAJI)</i>	UNDP	2.392
5.	<i>Strengthening Innovative Partnership for Dev Cooperation (SIP-DC)</i>	UNDP	1.221

No	Nama Kegiatan Hibah	Donor	Jumlah Hibah (USD ribu)
6.	<i>Support to the Acceleration of the MDG Achievement in Indonesia 2012-2015</i>	UNDP	14.307
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)			
7.	<i>Safer Communities through Disaster Risk Reduction in Development(SCDRR) - Phase II</i>	UNDP	1.831
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)			
8.	<i>Wind Hybrid Power Generation (WHyPGen)Marketing Dev Initiatives</i>	UNDP	2.306
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)			
9.	<i>Low Emission Capacity Building Programme (LECB) for Indonesia</i>	UNDP	1.247
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)			
10.	<i>Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA)</i>	UNDP	1.718
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA)			
11.	<i>Strengthening Women Participation and Representation in Governance in Indonesia (SWARGA)</i>	UNDP	2.500
Total			37.693

- **Low Emission Capacity Building Programme (LECB) for Indonesia**

Kegiatan LECB direncanakan dilaksanakan selama 17 bulan dengan nilai hibah pada saat penandatanganan *project document* sebesar USD 1.03 juta. Seiring waktu, terdapat tambahan dana sehingga total hibah menjadi USD 1,25 juta. Instansi penanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memformulasikan sistem *finance-ready Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)* dan *country-owned the Measuring, Reporting and Verification (MRV) system* pada sektor transportasi dan industri. LECB dilaksanakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 realisasi dana hibah LECB mencapai USD 0,9 juta atau 72% dari total pinjaman hibah. Dengan demikian masih terdapat sisa dana sebesar USD 300,5 ribu, namun sebanyak USD 150 ribu diantaranya sudah teralokasikan.

Hibah ini akan berakhir pada bulan Desember tahun 2014, semua komponen kegiatan diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan September 2014. Adapun progres capaian untuk masing-masing output kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian output *Low Emission Capacity Building Programme (LECB)*

No	Output	Capaian
1.	<i>Output 1: Green Economy approaches integrated into the RPJMN (2015---2019) and the RAN-GRK as a basis to prepareThe country NAMA</i>	<p>a. <i>Green Economy Model (GEM)</i> Pada tingkat nasional, <i>Indonesia Green Economy Model (I-GEM)</i> telah berhasil disusun, sedangkan pada tingkat regional GEM untuk Provinsi Kalimantan Tengah juga telah berhasil disusun. Saat ini sedang dilakukan penyusunan GEM untuk Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>b. Satu Data Telah dilakukan pertemuan inter-Kementerian untuk mengidentifikasi</p>

No	Output	Capaian
	<i>implementation in selected industry sub---sector and transport sector for the greater Jakarta area</i>	<p>permasalahan terkait data khususnya mengenai <i>green economy</i>. Koordinasi terkait <i>blue print</i> satu data yang menghasilkan kesepakatan bahwa satu data akan berada di bawah Bappenas, BPS dan Badan Informasi Geospasial (BPS).</p> <p>c. <i>E-Learning</i> Sistem <i>e-learning</i> digunakan untuk memberikan informasi dan pembelajaran mengenai GEM, NAMAs dan MRV. Sistem ini diharapkan dapat membantu stakeholder dalam mengimplementasikan <i>green economy</i> dan pembangunan berkelanjutan.</p>
2.	<p>Output 2: <i>Finance---ready NAMAs in a selected industrySub sector andThe transport Sector for Greater Jakarta developed</i></p> <p>Output3: <i>MRV systems Proposed forNAMAs in the selected industry sub sector In Greater Jakarta</i></p>	<p>a. <i>Workshop</i> peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai <i>green economy</i>, NAMAs dan MRV telah dilakukan pada tahun sebelumnya di Jakarta.</p> <p>b. Pemetaan dan konsultasi dengan stakeholder terkait terus dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang terkait dengan NAMAs dan MRV.</p> <p>c. <i>Bus Rapid transport</i> (BRT) telah disepakati sebagai project utama untuk NAMAs pada sektor transportasi dengan fokus area pada Jakarta, Bogor, dan Tangerang.</p> <p>d. Untuk NAMAs pada sektor industri telah disepakati proyek utamanya adalah <i>green building</i>, dengan cakupan arena Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Depok.</p>

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan kegiatan LECB tidak terdapat permasalahan yang signifikan sehingga semua output diperkirakan dapat dicapai sesuai target. Namun, untuk output yang terkait dengan satu data yang ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2014 (bertepatan dengan berakhirnya proyek) perlu dipantau secara komprehensif agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian.

Dalam hal administrasi di Kementerian Keuangan, realisasi untuk hibah ini belum tercatat karena proses BAST (Berita Acara Serah Terima) masih dalam proses penyelesaian oleh UKP4. Proses BAST tersebut diharapkan dapat diselesaikan sebelum kegiatan berakhir.

- ***Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI)***

Proyek SAJI dilaksanakan pada kurun waktu 2012-2015 dengan jumlah hibah sebesar USD 2,3 juta. Adapun executing agency untuk hibah ini adalah Kementerian PPN/Bappenas.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Total anggaran pada triwulan ke-2 tahun 2014 adalah sebesar USD 310.473. Sementara realisasi dana pada triwulan ke-2 tahun 2014 sebesar USD 89.500.

Secara umum, kegiatan SAJI telah menunjukkan pencapaian hasil yang baik. Adapun hasil yang sudah dicapai pada masing-masing output dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian output *Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI)*

No	Output	Capaian
1.	Output 1: Pelaksanaan Strategi Kunci dalam SNAK	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan operasional kantor untuk Sekretariat Nasional Akses terhadap Keadilan di Wisma Bakrie • Dukungan untuk pengkinian SNAK dan penyelarannya dengan naskah RPJMN • Dukungan untuk pemutakhiran data di <i>website</i> Sekretariat A2J • Pelatihan dan pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk sekretariat A2J
2.	Output 2: Penguatan mekanisme pengaduan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian <i>assessment</i> efektivitas pelaksanaan UP3 rintisan di 3 Kab/Kota (Bener Meriah, Palangkaraya dan Palu) • Bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan UP3 di 3 kab/ kota • Sosialisasi dan advokasi anggaran UP3 di Bener Meriah
3.	Output 3: Implementasi dan efektivitas layanan bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian <i>assessment</i> efektivitas dana sesibilitas layanan bantuan hukum di 5 Provinsi prioritas SAJI • Penyelesaian sistem <i>database</i> bankum nasional di BPHN • Dukungan pendampingan teknis bagi OBH dan koordinasi antara BPHN, Kanwil, OBH dan penegak hukum yang mendiskusikan kemajuan dan kendala-kendala pelaksanaan layanan bantuan hukum di Aceh dan Sulawesi Tengah
4.	Output 4: Penguatan akuntabilitas peradilan informal/ adat	<ul style="list-style-type: none"> • Di Aceh : bekerjasama dengan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam rangka penguatan partisipasi perempuan dan advokasi dukungan anggaran pemerintah Aceh terhadap penyelenggaraan peradilan adat Aceh. • Di Sulawesi Tengah: bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan tokoh adat merancang struktur, fungsi dan keanggotaan forum peradilan adat. • Di Kalimantan Tengah: bersama tim Sekda Provinsi Kalimantan Tengah melakukan finalisasi draft pedoman peradilan adat daya.
5.	Output 5: Manajemen pengetahuan untuk menginformasikan kebijakan dan inisiatif untuk secara efektif memperkuat A2J dan berkontribusi terhadap pelaporan Indonesia mengenai pelaksanaan instrumen HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan video hasil-hasil SAJI • Pengembangan dan kompilasi <i>knowledge product</i> SAJI untuk kepentingan advokasi. • Dukungan pemantauan senior management UNDP ke Banda Aceh untuk meninjau hasil proyek SAJI.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pada tahun 2013 dan 2014 mekanisme pencairan dana seharusnya dilakukan melalui rekening khusus (reksus) dan penganggarnya melalui alokasi DIPA Kementerian PPN/Bappenas. Untuk anggaran tahun ini belum masuk dalam DIPA Kementerian/PPN Bappenas dan direncanakan akan dimasukkan dalam DIPA tahun 2015. Namun, penganggaran dalam DIPA 2015 tersebut diperkirakan tidak dapat dilakukan karena pihak NPD mengusulkan agar pencairan dana tidak lagi melalui DIPA, namun dilakukan secara langsung oleh UNDP melalui *Country Office Support Services* (COSS). Usulan untuk penutupan rekening proyek juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sedang dilakukan pembahasan intensif di internal pelaksana kegiatan.

Dari sisi substansi, dana yang dibutuhkan agar proyek dapat mencapai output adalah sebesar USD 5 juta. Namun dana yang tersedia sampai dengan saat ini baru mencapai USD 2,39 juta. Dengan demikian, terdapat kekurangan dana sebesar USD 2,61 juta yang perlu ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil diskusi awal, terdapat potensi pendanaan yang berasal dari Pemerintah Norwegia. Namun demikian, mengingat jumlah dana yang dibutuhkan masih cukup besar, perlu dilakukan langkah-langkah dalam upaya mencari sumber pendanaan lain atau menyesuaikan kegiatan dengan jumlah alokasi dana yang tersedia.

- ***Third National Communication (TNC) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)***

Proyek TNC didanai dari hibah UNDP dengan instansi penanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan TNC tergolong masih baru karena *project document* baru saja ditandatangani pada bulan Maret 2014. Adapun nilai hibah yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebesar USD 4,56 juta, dengan jangka waktu pelaksanaan 36 bulan.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Hibah ini dilaksanakan oleh UNDP dengan modalitas COSS (*Country Office Support Services*) dan difokuskan untuk identifikasi dan *update* informasi terkait kegiatan-kegiatan penanggulangan Gas Rumah Kaca sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 yaitu telah dibentuk *working group* untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dilakukan inisiasi kerjasama dengan Universitas Islam Riau dalam hal pengolahan limbah yang mempengaruhi emisi Gas Rumah Kaca. Saat ini, proyek masih dalam proses penyusunan rencana kerja lebih detail dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 belum ditemui permasalahan yang signifikan menghambat pelaksanaan proyek.

- ***Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities in Nusa Tenggara Timur (SPARC)***

SPARC merupakan kegiatan adaptasi perubahan iklim yang difokuskan pada dampak perubahan iklim yang sedang berlangsung dan diproyeksikan akan melebihi kapasitas masyarakat pedesaan untuk mengatasinya. Kegiatan ini fokus pada peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat di daerah percontohan agar lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim dibidang mata pencaharian, makanan dan keamanan air. Adapun Kabupaten percontohan untuk kegiatan ini yaitu Sumba Timur, Manggarai dan Sabu Raijua.

Kegiatan SPARC telah dimulai sejak bulan Februari tahun 2013 dan akan berakhir pada bulan Desember 2016. Jumlah hibah yang diberikan untuk kegiatan ini adalah sebesar USD 5.100.000.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pengelolaan dana untuk kegiatan SPARC dibagi menjadi 2 yaitu dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dikelola oleh UNDP. Pada tahun 2014 total pagu DIPA untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2,52 milyar. Realisasi dana pada triwulan II tahun 2014 adalah sebesar Rp 494,5 juta. Dengan demikian, total realisasi dana mulai Januari – Juni tahun 2014 adalah sebesar Rp 1,04 milyar.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II TA 2014 yaitu inisiasi pada level provinsi, Kabupaten dan juga komunitas. Selain itu, koordinasi dengan SKPD provinsi, kabupaten dan komunitas juga telah dilakukan, begitu juga dengan pelatihan untuk SKPD mengenai dampak perubahan iklim. Kegiatan lain yang telah dilakukan adalah studi kerentanan perubahan iklim di 3 lokasi percontohan untuk kemudian ditentukan aksi-aksi adaptasi yang akan dilakukan.

Box 4: Kunjungan Lapangan **Proyek FAO OSRO/INS/103/USA**

Pada tanggal 25 Januari 2004 Indonesia melaporkan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*) wabah penyakit H5N1 avian influenza (AI). Wabah AI tersebut menyebar sangat cepat dan saat ini 32 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia dinyatakan terinfeksi virus AI H5N1. Sejak tahun 2005 FAO telah membantu pemerintah Indonesia dalam pengendalian penyakit AI terutama dalam penguatan kegiatan pengendalian penyakit AI. Saat ini dukungan FAO ECTAD dilaksanakan di bawah proyek OSRO/INS/103/USA: *Penguatan Kapasitas Pemerintah Indonesia dan Mitra Kerjanya untuk Mengendalikan HPAI*.

Tahun 2013 terdapat kegiatan yang difasilitasi FAO yaitu Pelayanan Veteriner Unggas Komersial (PVUK) yang direplikasi dengan dana APBN di 8 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi. Pada tahun 2014 kegiatan PVUK direncanakan direplikasi di 8 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi dengan dana APBN dan 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan fasiltasi FAO. Selain melatih petugas Dinas Kabupaten/Kota, pelatihan PVUK juga melibatkan staf laboratorium di wilayah masing-masing seperti BBVet/Bvet dan Laboratorium Provinsi dengan jumlah total petugas yang telah dilatih sebanyak 78 orang dokter hewan. Sebagian besar petugas PVUK merupakan petugas PDSR yang telah dilatih sebelumnya.

Monitoring lapangan terpadu ke Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 22 – 25 April 2014. Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai lokasi monitoring karena terdapat replikasi kegiatan NVS yang cepat dan komprehensif, serta adanya kegiatan PVUK dan PDSR yang cukup aktif di Provinsi tersebut.

Berdasarkan hasil monitoring lapangan terpadu ke Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa pembelajaran yang diperoleh, yaitu komitmen dari berbagai pihak seperti Dinas Peternakan Provinsi Sumatra Barat dan Dinas Peternakan Kabupaten Limapuluh Kota untuk untuk keberlanjutan kegiatan untuk mendukung pengendalian Avian Influenza dengan mencantumkan program dan kegiatan dalam RKA-SKPD provinsi sehingga dana APBD provinsi dapat dialokasikan sejak tahun 2011 untuk mendukung operasional kegiatan. Hal ini mengingat kegiatan PVUK di Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan salah satu sentra perunggasan sangat bermanfaat dalam menjembatani komunikasi antara petugas Dinas, peternak dan *Technical Service*.

Namun demikian, masih terdapat beberapa isu dalam pelaksanaan proyek, salah satunya adalah serah terima aset. Dalam hal ini, Berita Acara Serah Terima (BAST) aset FAO terutama kendaraan diupayakan agar dapat secepatnya dilakukan karena Polda Provinsi Sumatera Barat hanya akan membantu proses perpanjangan surat-surat kendaraan sampai dengan tahun 2014 saja.

Tim monitoring lapangan terpadu sangat mengapresiasi komitmen Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang telah mengalokasikan dana APBD provinsi untuk memberlanjutkan kegiatan pengendalian AI dan PHMS lain yang telah diinisiasi FAO dan mengharapkan agar keberhasilan ini dapat menjadi model dan *success story* bagi provinsi lain.



Gambar 1. Pelatihan NVS Tahap 2 Angkatan 1 di Indarung



Gambar 2. Pertemuan dengan Kepala Dinas Peternakan Kab. Lima Puluh Kota (kiri) dan Kegiatan PVUK (kanan)

Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact

Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah institusi independen Pemerintah AS yang menyalurkan bantuan dengan misi penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. MCC menyalurkan hibah kepada negara mitra dalam bentuk program *Threshold* dan *Compact*. Program *Threshold* merupakan hibah kecil yang diberikan kepada negara-negara dengan kriteria tertentu dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kebijakan mereka. Program *Compact* adalah hibah bersaing dalam jumlah besar yang diberikan kepada negara-negara yang telah berhasil melewati skor median korupsi dan berhasil melaksanakan program *Threshold*.

Millennium Challenge Compact untuk Indonesia telah ditandatangani tanggal 19 November 2011 dan mulai efektif sejak tanggal 2 April 2013 dan akan berlaku sampai dengan 1 April 2018 (tidak dapat diperpanjang lagi).

Tabel 3.5 Gambaran umum Hibah Program MCC *Compact*

Gambaran Umum		
Instansi Penanggung jawab	Kemen PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	
Sumber Dana	<i>Millennium Challenge Corporation</i> (MCC)	
Waktu Efektif	2 April 2013 – 1 April 2018 (5 Tahun)	
Nilai Hibah	USD 600.000.000	
		<i>Implementing Entity</i>
Komponen kegiatan	<i>Green prosperity</i>	Masih dalam proses
	<i>Community-based Health and Nutrition</i>	Kementerian Kesehatan
	<i>Procurement modernization</i>	LKPP

Hibah Program *Compact* sebesar USD 600 juta untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 3.6 Komponen Pembiayaan Program MCC *Compact*

No.	Komponen	Nilai (USD)	Persentase (%)
1	<i>Green Prosperity</i>	332.500.000	55,40
2	<i>Community-based Nutrition</i>	131.500.000	22,00
3	<i>Procurement Modernization</i>	50.000.000	8,00
4	<i>Administration and Control</i>	75.800.000	12,60
5	<i>Monitoring and Evaluation</i>	10.200.000	2,00
Total		600.000.000	100,00

Penyerapan Anggaran *Compact*

Dana Hibah senilai USD 600 juta dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan tingkat penyerapan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran Compact

No.	Kegiatan	Jumlah (USD)	Penyerapan (s/d Juni 2014)	
			USD	%
1	<i>Green Prosperity Project</i>	332.500.000	263.631,00	0,08
2	<i>Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project</i>	131.500.000	22.672.978,00	17,50
3	<i>Procurement Modernization Project</i>	50.000.000	1.274.510,00	2,50
4	<i>Monitoring & Evaluation</i>	75.800.000	-	0,00
5	<i>Administration and Control</i>	10.200.000	8.776.718,00	11,60
Total		600.000.000	32.987.837,00	5,49

Kemajuan dan Perkembangan Program Compact (s/d Juni 2014)

1. Green Prosperity Project

- Rapat MWA MCA-Indonesia pada tanggal 27 Juni 2014, menyetujui bahwa fasilitas pembiayaan *Green Prosperity Project (GP Facility)* terdiri dari 3 (tiga) jendela/windows hibah yakni:
 1. *Partnership Grant*
 2. *Community Based Natural Resources Management (CBNRM) Grant*
 3. *Renewable Energy Grant*
- MCA-Indonesia pada tanggal 3 Juli 2014 akan melakukan peluncuran *GP Facility*-Jendela *Partnership Grant* untuk kegiatan *Sustainable Cocoa Partnership*, termasuk *call for proposal* untuk kegiatan tersebut;
- MCA-Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan 7 kabupaten untuk lokasi baru (Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah) pada tanggal 25 April 2014. Dengan demikian, hingga bulan Juni 2014 terdapat 13 kabupaten lokasi GP yang sudah melakukan MoU dari target 24 kabupaten;
- MCA-Indonesia sudah menyelesaikan *Operation Manual* untuk *Grant Windows* dari *GP Facility* untuk jendela *Partnership Grant* dan *CBNRM Grant*. Sedangkan untuk jendela *Renewable Energy Grant* sedang dalam penyusunan;
- MCA-Indonesia telah menyusun modul Peningkatan Kapasitas *Gender* untuk Proyek GP;
- *Technical Assistant* untuk PMC (*Program Management Consultant*) GP Project sedang dalam penyiapan akhir oleh MCA-Indonesia;
- *Technical Assistant* untuk *Village Boundary Setting* sedang dalam persiapan, sedangkan *Technical Assistant GIS Capacity Building* sudah dilakukan mobilisasi oleh MCA-Indonesia sejak akhir Januari hingga Oktober 2014. Kegiatan yang dilakukan pada periode ini melakukan finalisasi *GIS Dashboard*. Sedangkan pada periode berikutnya akan dilakukan kegiatan *Install Software* dan *Training*;
- MCA-Indonesia sedang mendiskusikan *feed in* tarif yang akan dibeli oleh PT. PLN dari jendela *Renewable Energy Grant*;
- Penyerapan dana hibah untuk GP Project masih rendah (dibawah 1%), dikarenakan MCA-Indonesia sedang melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan proyek sebagaimana hal-hal tersebut diatas.

2. *Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting (CBHN) Project*

- CBHN *Project* terdiri dari kegiatan: *demand side* (Proyek Masyarakat) melalui PNPM Generasi; *supply side* (penguatan penyedia pelayanan) melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan *Multiple Micro Nutrient*, penyediaan alat ukur dan pengukuran panjang badan, pemucuan sanitasi, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, pelibatan pihak swasta dan kegiatan komunikasi, pengelolaan proyek dan evaluasi;
- Lokasi CBHN *Project* meliputi 5.294 Desa di 499 Kecamatan pada 64 Kabupaten yang terletak di 11 Provinsi;
- Kegiatan *Demand Side*:
 - PNPM Generasi sudah melaksanakan perencanaan partisipatif diseluruh lokasi proyek, melakukan pelatihan dan mobilisasi fasilitator untuk 3 provinsi baru, pelatihan TPMD (Tim Pertimbangan Musyawarah Desa) dan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) serta sosialisasi Modul Revisi PNPM Generasi (aspek *stunting* dan *gender*) kepada fasilitator dan pelaku lainnya.
- Kegiatan *Supply Side*:
 - MCA-Indonesia bersama Kemenkes telah melakukan ToT Pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak untuk 14 *Master Training* di Bandung – Jawa Barat, *On The Job (OJT) Training* Pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak untuk 28 *Master Training* dengan sasaran pelatihan untuk 350 kader Posyandu di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut – Jawa Barat dan menyusun spesifikasi *multiple micro nutrient* untuk anak;
 - MCA-Indonesia sedang melakukan penyediaan material dan peralatan pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak, *Workshop* Nasional untuk Sosialisasi CBHN *Project*, penyiapan Tim Sekretariat Nasional CBHN *Project*,
 - MCA-Indonesia bersama Kemenkes sedang melakukan finalisasi modul pelatihan Monitoring Pertumbuhan dan M&E, spesifikasi *multiple micro nutrient* untuk ibu hamil, *full design for sanitation and hygiene activity* dan disain *base-line survey*;
 - MCA-Indonesia sudah melakukan mobilisasi Tim Konsultan untuk kegiatan *National Awareness Campaign*.
- Kegiatan Komunikasi, Manajemen Proyek dan Evaluasi:
 - MCA-Indonesia sudah melakukan mobilisasi Tim Konsultan untuk kegiatan *National Awareness Campaign* dan sedang melakukan finalisasi disain *base-line survey*.

3. *Procurement Modernization Project*

- Kegiatan pengembangan *Sustainable Public Procurement (SPP)*:
 - MCA-Indonesia sedang melakukan *Market Research Study* (bersama dengan KPMG-konsultan) untuk melihat kesiapan lembaga pemerintah dan rekanan (vendor) dalam menerapkan SPP;
 - Data dari kajian ini akan menjadi salah satu dasar untuk penyiapan kegiatan *Regulatory Review and Awareness Campaign*.
- Kegiatan *Human Resources Development (HRD)*:
 - Telah ditandatangani MoU untuk 29 ULP (Unit Layanan Pengadaan) Percontohan antara Kepala Daerah dan Instansi dengan Kepala LKPP. Sampai dengan April 2018 target 100 ULP Percontohan dan 500 orang telah dilatih harus tercapai;
 - MCA-Indonesia bersama LKPP sudah melakukan *Procurement Skills Training Stream* untuk *Basic Level* (Modul 1) dengan peserta dari perwakilan 29 ULP Percontohan;

- MCA-Indonesia bersama LKPP sudah menyusun *Procurement Skills Training Stream* untuk Modul 2, dan sedang melakukan penyusunan untuk modul 3 dan sedang melakukan *review* indikator M&E untuk komponen HRD.
- Kegiatan Penguatan ULP:
 - Telah ditandatangani MoU untuk 29 ULP (Unit Layanan Pengadaan) Percontohan antara Kepala Daerah dan Instansi dengan Kepala LKPP. Sampai dengan April 2018 target 100 ULP Percontohan harus tercapai;
 - MCA-Indonesia sudah menghasilkan model pengembangan ULP dan sedang melakukan mentoring terhadap 29 ULP Percontohan dengan tiga target penguatan yaitu pengembangan kelembagaan ULP untuk menjadi permanen, kejelasan jenjang karir bagi ahli pengadaan, dan pengembangan profesi berkelanjutan. Sampai Juni 2014, sudah ada 8 ULP yang telah menjadi permanen.
- Kegiatan Pengembangan PMIS (*Procurement Management Information System*):
 - MCA-Indonesia dan LKPP sedang menyusun modul *General Procurement Plan* dan modul *Contract Management* dan mempersiapkan kegiatan PMIS lainnya (*e-catalogue, procurement classification, integration service, data warehouse-reporting & BI, LPSE Assesment & Capacity Building, Security-Infrastructure-Governance-Legal*). Kontrak dengan konsultan *e-catalogue* akan ditandatangani di pertengahan Agustus 2014.
- Kegiatan Pengembangan *Framework Contract*:
 - MCA-Indonesia sudah melakukan mobilisasi *technical assistance* untuk kegiatan Pengembangan *Framework Contract*.
 - MCA-Indonesia bersama LKPP sudah melakukan *asesment* kepada 8 ULP yang diharapkan menjadi lokasi pilot.

Rencana Tindak Lanjut

MWA MCA-Indonesia telah meminta Direktur Eksekutif MCA-Indonesia beserta jajarannya untuk:

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan penyerapan yang hingga saat ini baru mencapai 5,49% dari USD 600 juta mengingat waktu pelaksanaan tinggal 4 (empat) tahun lagi;
- b. Segera melaksanakan 3 jendela/*windows* GP *Facility* yang sudah disepakati oleh MWA (*Partnership Grant, CBNRM Grant, Renewable Energy Grant*).Direncanakan tanggal 3 Juli 2014 akan dilakukan peluncuran komponen *Partnership Grant*. Sementara untuk CBNRM dan RE *Grant* direncanakan akan diluncurkan pada bulan Oktober 2014
- c. Disetujui oleh MWA dan MCC bahwa penyaluran hibah *Green Prosperity* hanya melalui jendela hibah (*Grant Windows*), tidak ada jendela komersial.
- d. Segera menyelesaikan Petunjuk Teknis Fasilitas Perpajakan yang dibiayai dari dana hibah MCC
- e. Melakukan pengelolaan organisasi dan *staffing* lebih efektif agar kegiatan *Compact* berjalan optimal.

BAB IV

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI

Java Bali Power Restructuring and Strengthening & Add. Financing for the Extended Deployment of the ERP System (ERP Sumatera and Sulawesi)

Proyek bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan efisiensi sistem pembangkit listrik di Jawa-Bali, dan memperkuat kapasitas pengelolaan PT.PLN. *Executing agency* proyek adalah PT.PLN, dengan komponen proyek i) Penguatan infrastruktur sistem kelistrikan PLN yang terdiri dari Sistem Transmisi 500 kV dan Sistem Sub-Transmisi 150 kV; ii) Pengembangan Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan iii) Dukungan restrukturisasi dan penguatan kapasitas PT.PLN. Pendanaan proyek didukung oleh pinjaman Bank Dunia sebesar USD 137,43 juta untuk proyek *Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project* dan sebesar USD 20,9 juta untuk *ERP (Enterprise Resources Planning) Sumatera and Sulawesi*. Proyek telah efektif sejak tanggal 7 Juli 2004, dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Tabel 4.1 Profil Proyek *Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening*

Kode Loan	7758-ID
Nama Proyek	<i>Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project</i>
Instansi Penanggung Jawab	PT. PLN
Nilai Pinjaman	USD 137,43 juta
Masa Laku Pinjaman	7 Juli 2004 s/d 31 Desember 2013

Tabel 4.2 Profil Proyek *ERP (Enterprise Resources Planning) Sumatera and Sulawesi*

Kode Loan	7905-ID
Nama Proyek	<i>ERP (Enterprise Resources Planning) Sumatera and Sulawesi</i>
Instansi Penanggung Jawab	PT. PLN
Nilai Pinjaman	USD 20,9 juta
Masa Laku Pinjaman	21 April 2011 s/d 31 Desember 2013

Proyek bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan efisiensi sistem pembangkit listrik di Jawa-Bali, dan memperkuat kapasitas pengelolaan PT.PLN. *Executing agency* proyek adalah PT.PLN, dengan komponen proyek: i) Penguatan infrastruktur sistem kelistrikan PLN yang terdiri dari Sistem Transmisi 500 kV dan Sistem Sub-Transmisi 150 kV; ii) Pengembangan Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP); dan iii) Dukungan restrukturisasi dan penguatan kapasitas PT.PLN. Pendanaan proyek didukung oleh pinjaman Bank Dunia sebesar USD 137,43 juta untuk proyek *Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project* dan sebesar USD 20,9 juta untuk *ERP (Enterprise Resources Planning) Sumatera and Sulawesi*. Proyek telah efektif sejak tanggal 7 Juli 2004, dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

1. Capaian Proyek

Hingga akhir pelaksanaan proyek pada 31 Desember 2013, target keluaran proyek hampir seluruhnya telah tercapai. Kendala pencapaian proyek adalah pada indikator perluasan infrastruktur sub-transmisi 150 kV, dan peningkatan *dispatch capability* di Jawa Timur. Capaian indikator tidak dapat tercapai dikarenakan permasalahan perijinan dan pembebasan lahan kehutanan yang berlarut-larut, sehingga proyek diusulkan untuk dibatalkan didanai menggunakan pinjaman dan dilanjutkan oleh dana PT. PLN setelah proses perijinan diselesaikan. Meskipun terdapat target keluaran proyek yang tidak tercapai, proyek dinilai telah berhasil berkontribusi untuk meningkatkan kinerja sistem penyediaan listrik di Jawa-Bali.

Melalui Sistem ERP, PT.PLN dapat menyamakan proses bisnis keuangan, logistik dan sumber daya manusia serta meningkatkan transparansi, mekanisme kontrol dan pemantauan proses bisnis dengan sistem informasi yang terintegrasi di seluruh unit PT.PLN

Keberhasilan proyek ini terutama adalah pada komponen *Enterprise Resources Planning* (ERP) yang merupakan *pilot* untuk mendukung pelaksanaan program restrukturisasi perusahaan dan proses bisnis PT.PLN. Pelaksanaan sistem ERP mencakup modul dan *rollout* untuk Manajemen SDM, Manajemen Keuangan dan Manajemen Logistik. Melalui Sistem ERP, PT.PLN dapat menyamakan proses bisnis keuangan, logistik dan sumber daya manusia serta meningkatkan transparansi, mekanisme kontrol dan pemantauan proses bisnis dengan sistem informasi yang terintegrasi di seluruh unit PT. PLN. Pada awalnya, Sistem ERP diimplementasikan pada area Kantor Pusat, Distribusi Jawa, Distribusi Bali dan P3B (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban) Jawa Bali, kemudian dengan tambahan dana Bank Dunia, dilakukan *rollout* ERP pada area Sumatera dan Sulawesi. Selain melanjutkan implementasi Sistem ERP, tambahan dana Bank Dunia juga digunakan untuk penguatan proses bisnis pembayaran pelanggan.

Melalui proyek ini, juga telah dilakukan *Engineering Services* untuk pembangunan *Upper Cisokan Pumped Hydro Electric Power Plant* yang akan meningkatkan kapasitas penyediaan sistem kelistrikan Jawa-Bali.

2. Pembelajaran

Dari hasil pelaksanaan proyek didapatkan hasil dan manfaat dari pembangunan dan perluasan infrastruktur listrik yang dapat mendukung pemindahan beban dari transmisi dan sub-transmisi eksisting Jawa-Bali yang telah *overload*. Proyek ini juga telah mendukung penguatan perusahaan dan proses bisnis PT. PLN melalui implementasi sistem ERP. Dalam proses pelaksanaannya, juga telah dilakukan transfer pengetahuan dari Bank Dunia kepada pengelola proyek mengenai proses pengadaan dan *environmental safeguard* yang diberlakukan di seluruh proyek-proyek Bank Dunia.

Banyak pembelajaran yang didapatkan dari proyek ini untuk memperkuat proses perencanaan pinjaman luar negeri di masa mendatang. Misalnya, adalah lamanya proses perencanaan menuju implementasi yang memakan waktu cukup lama, sementara kebutuhan pemenuhan sektor listrik sangat mendesak. Akibatnya, banyak terjadi perkembangan kondisi dan kebutuhan dari saat perencanaan dan menyebabkan perencanaan tersebut tidak relevan lagi. Dalam hal ini, lamanya proses administrasi pinjaman juga berkontribusi pada keterlambatan pelaksanaan proyek.

Harapannya, di masa mendatang, koordinasi antar instansi dan mekanisme pinjaman dapat terus diperkuat untuk mempercepat pelaksanaan proyek, berikut evaluasi atas relevansi dari dokumen perencanaan proyek.

Proses perijinan dan pengadaan lahan yang berbelarut-larut, menjadi pembelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan proyek. Jika memungkinkan, diharapkan agar proses tersebut dapat diselesaikan sejak saat perencanaan proyek. Permasalahan teknis seperti proses pengadaan dan *handover asset* juga menjadi pembelajaran di masa mendatang, agar dapat meningkatkan kapasitas, koordinasi internal PT. PLN, dan koordinasi dengan Bank Dunia.

3. Keberlanjutan dan Replikasi

Dukungan penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui proyek ini, merupakan bagian dari program PT. PLN untuk meningkatkan pelayanan di Jawa-Bali. Setelah proyek berakhir, aset yang dihasilkan diserahkan kepada unit operasional PT. PLN yang akan bertanggung jawab untuk memelihara aset tersebut selama masih berfungsi, yang diperkirakan akan lebih dari 30 tahun. Dukungan untuk Sistem ERP merupakan bagian dari keseluruhan program PT. PLN untuk meningkatkan pelayanan dan proses bisnis perusahaannya. Sistem ini akan berperan penting untuk pengembangan bisnis PT. PLN selanjutnya. Kelanjutan implementasi Sistem ERP di lokasi lain di Indonesia akan menggunakan dana PT. PLN. Pendanaan ES untuk Upper Cisokan telah ditindaklanjuti melalui dukungan pendanaan IBRD Bank Dunia, yang akan menjadi *pumped storage* pertama di Indonesia.

Pembelajaran dari pelaksanaan proyek ini, diusulkan untuk menjadi masukan bagi Bappenas dalam melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi proyek-proyek pinjaman luar negeri di masa mendatang. Pelaporan proyek sangat diperlukan untuk mengidentifikasi setiap permasalahan agar dapat terdokumentasikan dan Bappenas diharapkan dapat berperan sebagai institusi yang mendorong tindak lanjut penyelesaian permasalahan proyek yang membutuhkan koordinasi antar instansi.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Hasil pemantauan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri di Triwulan II TA 2014 yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 154 proyek yang dipantau di Triwulan II TA 2014 dengan nilai total pinjaman sebesar ekuivalen USD 19.696,28 juta. Total penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan II TA 2014 (posisi 30 Juni 2014) adalah sebesar ekuivalen USD 7.550,41 juta atau 38,33% dari total nilai pinjaman. Realisasi penyerapan pada TA 2014 periode Januari – Juni 2014 sebesar ekuivalen USD 1.306,42 juta atau 41,3% dari target penyerapan TA 2014 sebesar ekuivalen USD 3.163,04 juta.
2. Permasalahan umum yang diidentifikasi pada pelaksanaan proyek di Triwulan II TA 2014 antara lain i) pengadaan barang dan jasa yang menjadi kendala di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian perhubungan dan PT. PLN, ii) pengadaan lahan yang umumnya terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan PT. PLN, iii) revisi DIPA dan v) proses pencairan dan pencatatan yang dikarenakan sistem baru yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
3. Terdapat 129 proyek hibah yang dilaporkan oleh 13 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 969.302.817. Dari 13 Kementerian/Lembaga, Kementerian Pertanian mengelola 73 proyek dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 127.217.244, Kementerian Lingkungan Hidup mengelola 16 proyek dengan total nilai hibah ekuivalen USD 44.786.138, dan Kementerian ESDM mengelola 8 proyek dengan total nilai hibah ekuivalen USD 31.534.159.
4. Laporan pelaksanaan proyek yang telah selesai dan ditampilkan di triwulan ini yaitu proyek *Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening* serta proyek ERP (*Enterprise Resources Planning*) *Sumatera and Sulawesi* yang keduanya dibiayai oleh Bank Dunia. Beberapa contoh pembelajaran yang dapat diambil pada proyek-proyek ini adalah lamanya proses perencanaan menuju implementasi, sementara kebutuhan pemenuhan sektor listrik sangat mendesak. Akibatnya, banyak terjadi perkembangan kondisi dan kebutuhan dari saat perencanaan dan menyebabkan perencanaan tersebut tidak relevan lagi. Dalam hal ini, lamanya proses administrasi pinjaman juga berkontribusi pada keterlambatan pelaksanaan proyek. Sehingga diperlukan koordinasi antar instansi dan mekanisme pinjaman dapat terus diperkuat untuk mempercepat pelaksanaan proyek, berikut evaluasi atas relevansi dari dokumen perencanaan proyek.

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan proyek di Triwulan II TA 2014 dalam upaya peningkatan kinerja pelaksanaan yaitu:

1. Penanggung jawab proyek perlu menyusun rencana pelaksanaan secara rinci termasuk rencana penyerapan sampai akhir masa laku pinjaman dan segera memperbaharunya apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan.
2. Komunikasi intensif dengan mitra pembangunan dalam mencari titik temu dalam masalah pengadaan barang jasa, disamping terus meningkatkan kapasitas pengelola proyek dan pendampingan oleh LKPP, BPKP dan lain-lain.
3. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan secara formal maupun informal sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan proyek sehingga proses pengadaan lahan dapat segera dipenuhi sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. *Project Completion Report* merupakan laporan akhir pelaksanaan proyek mencakup laporan capaian output, termasuk pembelajaran dalam pelaksanaannya sejak persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan proyek beserta *exit strategy* keberlanjutannya yang dapat berupa dokumen acuan untuk perencanaan berikutnya.